RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng

2025 - 2029

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI

JL. PAHLAWAN NO.16 TELP. (024) 8311713

SEMARANG

2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Pahlawan No. 16 Semarang, Kode Pos 50241 Telepon (024) 8311713
Faksimile (024) 8311711 Laman : http://disnakertrans.jatengprov.go.id
Pos-el : disnakertrans@jatengprov.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor: S/000.7.2.11/97/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Ahmad Aziz, SE., M.Si.
NIP : 196806171998031007
Jabatan : Kepala Dinas Berdasar SK Gubernur Nomor 821.3/151/2023 Tanggal 18 Bulan April Tahun 2023, bertugas untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 16 Kota Semarang

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan serta program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 September 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah

Ahmad Aziz, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196806171998031007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

SAMPUL **1**

SURAT PERNYATAAN **2**

DAFTAR ISI **3**

Daftar Tabel **4**

Daftar Gambar **5**

BAB I PENDAHULUAN **6**

1.1 Latar Belakang 6

1.2 Landasan Hukum 9

1.3 Maksud dan Tujuan 13

1.4 Sistematika Penulisan 14

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **16**

2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 16

2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 27

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 29

2.4 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 33

2.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 57

2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah 76

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **83**

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 83

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 86

3.3 Manajemen Resiko Strategis Perangkat Daerah 94

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **111**

4. 1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah 111

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah 357

BAB V PENUTUP **359**

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Aset dan Sarana Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018 s/d 2023 321
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 34
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan..... 56
Tabel 2.6 Data Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan 2024..... 62
Tabel 2.7 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah 63
Tabel 2.8 Jumlah Not In Employment, Education or Training (NEET) di Jawa Tengah 64
Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 66
Tabel 2.10 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 77
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029..... 84
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 91
Tabel 3.2.1 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah 92
Tabel 3.3 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029..... 95
Tabel 4.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 112
Tabel 4.1.2 Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam mendukung Program Daerah Tahun 2025-2029 349
Tabel 4.2.1 Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 357
Tabel 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 358

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah..... 26
Gambar 2.2 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025..... 27
Gambar 2.3 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025..... 28
Gambar 2.4 Pegawai Dikelompokkan Berdasarkan Struktur..... 29

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting. *Pertama,* tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan memberikan kontribusi terhadap produk domistik bruto maupun produk domistik regional bruto; *Kedua* tenaga kerja sebagai anggota kelompok masyarakat yang menjadi target untuk ditingkatkan kapasitas, ketrampilan, pendapatan dan kesejahteraannya. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Disisi lain transmigrasi juga merupakan hal penting yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat;

Sejalan dengan upaya pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini merupakan peluang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum sebagai tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut, pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang termuat baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) , Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan OPD diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang dimuat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra OPD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut penyusunan dan penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berkenaan dengan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2025-2029 dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus menyusun dokumen penjabaran visi, misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perangkat Daerah juga menyusun dokumen Rencana Strategis perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 dengan berpedoman RPJMD.

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk jangka menengah yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dana atau urusan pilihan sesuai tugas dan pokok fungsi setiap perangkat daerah .

Dalam bidang pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif di Jawa Tengah, masalah yang harus kita hadapi dalam 5 tahun kedepan diantaranya adalah tingginya angka pengangguran yang ditunjukkan oleh angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) khususnya TPAK Perempuan yang berakibat meningkatnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) serta akan berdampak pada kinerja pembangunan Gender yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).

Pembangunan ketenagakerjaan yang merupakan sasaran makro ekonomi, karena tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian baik produk domistik bruto maupun produk domistik regional bruto berpengaruh pada indikator pembangunan daerah selain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu pertumbuhan ekonomi, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Gini Ratio (Koefisien Gini : mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah atau ketimpangan ekonomi dalam masyarakat).

Salah satu indikator kinerja utama pembangunan daerah tersebut adalah Indeks Kesenjangan Gender (IKG), yang mencerminkan tingkat kesenjangan antara laki – laki dan perempuan dalam 3 (tiga) dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Pada dimensi ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan

menjadi salah satu komponen penting yang mempengaruhi capaian IKG. Data menunjukkan bahwa TPAK perempuan masih lebih rendah dari laki - laki (2024 : TPAK perempuan 61,82 persen dan TPAK Laki -laki 85,66 persen). Rendahnya partisipasi perempuan dalam Angkatan kerja dipengaruhi beberapa faktor , antara lain : Beban ganda perempuan yang harus membagi waktu antara pekerjaan domestik dan pekerjaan produktif, Akses terhadap peluang kerja yang belum setara, termasuk terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan keterampilan kerja, Norma sosial budaya yang masih memandang pekerjaan tertentu lebih layak bagi laki-laki.

Pembangunan ketenagakerjaan inklusif di Jawa Tengah diarahkan tidak hanya untuk menciptakan kesempatan kerja yang luas, tetapi juga untuk memastikan akses dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali pada disabilitas dan juga masyarakat rentan lainnya . Sejalan dengan agenda nasional dan komitmen daerah terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mengintegrasikan isu kesetaraan gender dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Dalam pembangunan Ketenagakerjaan yang inklusif ini harus merupakan upaya terpadu dari berbagai pihak yang mengarah pada upaya-upaya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lansia (lanjut usia), pemberdayaan dan pengembangan kelompok seperti perempuan, pemuda (penduduk usia muda), pekerja migran, buruh tani dan petani penggarap, nelayan, buruh industry kecil dan sektor UMKM. Upaya pengurangan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru, dan yang kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Isu-isu terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan tugas yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan urusan tenaga kerja dan transmigrasi secara khusus di Jawa Tengah, oleh karenanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disesuaikan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Isu-isu lain dalam penyusunan Renstra PD diantaranya sebagai langkah tindak lanjut dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 kemudian penyesuaian terhadap kebijakan nasional (RPJMN 2020-2024 dan Renstra K/L Tahun 2020-2024), juga dampak dari pandemi Covid 19 dan adanya perubahan regulasi (PP 12 Tahun 2019, Permendagri 90/2019 dan

Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 dan pemuthakirannya Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, serta perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050 5889 Tahun 2021 dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Hasil Verifikasi,Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah .

Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Jawa Tengah menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah dan mencabut Undang- undang Nomor : 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang–Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 6856);

9. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
11. Undang -Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja .
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
19. Peraturan Presiden Nomor : 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional;
22. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan ;
23. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Instruksi Presiden Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017. No. 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019. No. 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019. No. 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Penyelenggaraan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP 70 Tahun 2019; Memuat RAN Penyandang Disabilitas untuk periode 5 Tahun.
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi Dan Inventarisasi Pemuthakiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi Dan

Inventarisasi Pemuthakiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka panjang Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPA Nomor : 270/M.PPN/11/2021, No: SE.33/MK.02/2012, No:050/4389A/SJ dan No: SE.46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91) ;
38. Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender di Jawa Tengah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (5-66/2026), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 169);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 1, tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 159 ;
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor : 161)
46. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;
47. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

48. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
49. Surat Edaran Gubernur Nomor 463.23/0005918 tanggal 4 April 2023 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah.
50. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 0007/0001565 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra PD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.
51. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 0007/0001565 tanggal 26 Februari 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
52. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.7.2.2/0002764 tanggal 9 April 2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan gambaran kondisi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Memberikan acuan landasan yang jelas bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan program pembangunan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala Dinas atas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama 5 (lima) tahun, yang disusun setiap 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

Tujuan dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah untuk:

1. Menjelaskan, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5(lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
2. Mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok rentan sesuai misi daerah diantaranya meningkatkan kualitas dan perluasan kesempatan kerja bagi laki – laki dan perempuan, mengurangi kesenjangan partisipasi Angkatan kerja antara laki -laki dan perempuan sebagai kontribusi terhadap

perbaikan IKG (Indeks kesenjangan Gender), mewujudkan lingkungan kerja yang aman, inklusif dan bebas kekerasan terutama bagi perempuan dan kelompok rentan.

3. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (Renja Tahunan) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan, khususnya di urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD tahun 2025 -2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan umum mengenai latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ; Sumber Daya Perangkat Daerah ; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Serta Permasalahan / identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigras Provinsi Jawa Tengah; dan Penentuan Isu – isu Strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TRANSMIGRASI

Berisi tentang Tujuan, Sasaran , Strategi, Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ; Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Manajemen Resiko Strategis Perangkat Daerah merupakan pengelolaan terhadap resiko OPD yang diintegrasikan dalam Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang dan pendanaan indikatifnya sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan renstra OPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD; Penguatan peran stakeholder dalam pelaksanaan Renja OPD; Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 tahunan, catatan dan harapan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA (Sekretaris Daerah). Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan pada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, dan bidang pengawasan ketenagakerjaan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, dan bidang pengawasan ketenagakerjaan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, dan bidang pengawasan ketenagakerjaan;
d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi dan Tugas Pokok, Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas;**
   Kepala dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
2. **Sekretariat;**
   Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi :

a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;

b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;

f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;

g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah Daerah;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas dan;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Bidang Pelatihan dan Produktivitas,** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melaksanakan fungsi :

a. perumusan kebijakan terkait pemagangan dalam dan luar negeri, seritifikasi akreditasi lembaga pelatihan kerja, uji kompetensi sumber daya manusia; dan peningkatan dan pengukuran produktivitas.
b. pelaksanaan kebijakan terkait pemagangan dalam dan luar negeri, sertifikasi, akreditasi lembaga pelatihan kerja, uji kompetensi sumber daya manusia; dan peningkatan dan pengukuran produktivitas;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pemagangan dalam dan luar negeri, sertifikasi, akreditasi lembaga pelatihan

kerja, uji kompetensi sumber daya manusia; dan peningkatan dan pengukuran produktivitas;

d. monitoring dan evaluasi terkait pemagangan dalam dan luar negeri, sertifikasi, akreditasi lembaga pelatihan kerja, uji kompetensi sumber daya manusia; dan peningkatan dan pengukuran produktivitas; dan
e. pelaporan dan rekomendasi terkait pemagangan dalam dan luar negeri, sertifikasi, akreditasi lembaga pelatihan kerja, uji kompetensi sumber daya manusia; dan peningkatan dan pengukuran produktivitas;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. **Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi,** mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan fungsi :

a. perumusan kebijakan terkait pelaksanaan penempatan tenaga kerja dalam negeri, pelaksanaan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, perluasan kesempatan kerja, fasilitasi pemberi kerja tenaga kerja asing dalam penggunaan tenaga kerja asing, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing, dan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas kabupaten/kota dalam Daerah.
b. pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan penempatan tenaga kerja dalam negeri, pelaksanaan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, perluasan kesempatan kerja, fasilitasi pemberi kerja tenaga kerja asing dalam penggunaan tenaga kerja asing, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing, dan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas kabupaten/kota dalam Daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan penempatan tenaga kerja dalam negeri, pelaksanaan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, perluasan kesempatan kerja, fasilitasi pemberi kerja tenaga kerja asing dalam penggunaan tenaga kerja asing, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing, dan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas kabupaten/kota dalam Daerah;

d. monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan penempatan tenaga kerja dalam negeri, pelaksanaan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, perluasan kesempatan kerja, fasilitasi pemberi kerja tenaga kerja asing dalam penggunaan tenaga kerja asing, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing, dan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas kabupaten/kota dalam Daerah;
e. pelaporan dan rekomendasi terkait pelaksanaan penempatan tenaga kerja dalam negeri, pelaksanaan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, perluasan kesempatan kerja, fasilitasi pemberi kerja tenaga kerja asing dalam penggunaan tenaga kerja asing, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing, dan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas kabupaten/kota dalam Daerah dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. **Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial,** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial melaksanakan fungsi :

a. perumusan kebijakan terkait syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagaan hubungan industrial ; dan pengupahan dan fasilitas kesejahteraan pekerja.
b. pelaksanaan kebijakan terkait syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagaan hubungan industrial, dan pengupahan dan fasilitas kesejahteraan pekerja;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagaan hubungan industrial,; dan pengupahan dan fasilitas kesejahteraan pekerja;
d. monitoring dan evaluasi terkait syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagaan hubungan industrial,; dan pengupahan dan fasilitas kesejahteraan pekerja;
e. pelaporan dan rekomendasi terkait syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagaan hubungan industrial,; dan pengupahan dan fasilitas kesejahteraan pekerja; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan,** mempunyai tugas :

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan ketenagakerjaan

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, melaksanakan fungsi :

a. perumusan kebijakan terkait pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan.

b. pelaksanaan kebijakan terkait pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan;

c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan

d. monitoring dan evaluasi terkait pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan;

e. pelaporan dan rekomendasi terkait pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mendasarkan pada Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1) Balai Latihan Kerja Industri Kelas A, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelatihan tenaga kerja industri. Dan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelatihan kerja berupa pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi di bidang industri.

Balai Latihan Kerja Industri Kelas A melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan kerja dan pemasaran program pelatihan, dan pemasaran calon tenaga kerja yaitu pada pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi bidang/sektor industri;

b. pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi di bidang industri;

c. pengoordinasian dalam rangka kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja di bidang industri;

d. monitoring dan evaluasi pelatihan kerja pada di bidang industri;

e. pelaporan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi bidang industri; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Balai Latihan Kerja Jasa Dan Pariwisata Kelas A, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelatihan jasa dan pariwisata. Dan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang jasa dan pariwisata.

Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan jasa dan pariwisata;

b. penggordinasian pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi di bidang jasa dan pariwisata meliputi :

   1. pelaksanaan *training needs analysis*;

   2. kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta pemangku kepentingan terkait; dan

   3. penyesuaian kurikulum dan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri.

c. pelaporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi bidang jasa dan pariwisata, pemasaran program pelatihan, dan penempatan alumni; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengembangan produktivitas. Dan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengembangan

produktivitas berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan konsultansi peningkatan produktivitas serta inovasi dan kerjasama peningkatan produktivitas di kalangan masyarakat, tenaga kerja, perusahaan, dan instansi pemerintah

Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A melaksanakan fungsi:

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan produktivitas;
b. pelaksanaan kegiatan pelatihan, bimbingan konsultansi, inovasi, dan kerjasama peningkatan produktivitas untuk masyarakat, tenaga kerja, perusahaan dan instansi pemerintah;
c. pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan, bimbingan konsultasi, inovasi dan kerjasama peningkatan produktivitas dengan pemangku kepentingan terkait;
d. monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan, bimbingan konsultansi, inovasi, dan kerjasama peningkatan produktivitas untuk masyarakat, tenaga kerja, perusahaan dan instansi pemerintah;
e. pelaporan kegiatan pelatihan, bimbingan konsultansi, inovasi, dan kerjasama peningkatan produktivitas untuk masyarakat, tenaga kerja, perusahaan dan instansi pemerintah; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Kelas A, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Dan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang keselamatan dan kesehatan kerja .

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelas A melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional pengujian dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja;
b. pelaksanaan teknis operasional pengujian dan analisis keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, ergonomi dan psikologi kerja serta pengembangan sumber daya manusia dan konsultansi bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
c. pengoordinasian dengan pemangku kepentingan terkait keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan pengujian dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja;
d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengujian

keselamatan dan kesehatan kerja dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja;

e. pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan kegiatan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Balai Latihan Kerja Pertanian Kelas A, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi sektor bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Dan empunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi sektor bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

Balai Latihan Kerja Pertanian Kelas A melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan kerja dan pemasaran program pelatihan, dan pemasaran calon tenaga kerja yaitu pada pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi bidang/sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;

b. pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;

c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;

d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja pada di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;

e. pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Kelas B, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan ketenagakerjaan. Dan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengawasan ketenagakerjaan meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan penegakan hukum ketenagakerjaan

Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Kelas B melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengawasan ketenagakerjaan meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
b. pelaksanaan pemeriksaan perusahaan terhadap norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pengawasan ketenagakerjaan meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
c. pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan ketenagakerjaan meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
d. evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan ketenagakerjaan, meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan penegakan hukum ketenagakerjaan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan kelas B di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 6 (enam) Satuan Pengawasan Ketenaga-kerjaan yaitu sebagai berikut :

(1) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang dengan Tempat Kedudukan Kota Semarang; Wilayah Kerja : Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga.

(2) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pati dengan Tempat Kedudukan Kabupaten Pati; Wilayah Kerja : Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora.

(3) Satuan Pengawasan KetenagakerjaanWilayah Surakarta dengan Tempat Kedudukan di Kota Surakarta; Wilayah Kerja : Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo.

(4) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang dengan Tempat Kedudukan Kota Magelang; Wilayah Kerja : Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Purworejo.

(5) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas dengan Tempat Kedudukan Kabupaten Banyumas; Wilayah Kerja : Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banjarnegara.

(6) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan dengan Tempat Kedudukan Kota Pekalongan; Wilayah Kerja : Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang.

Selengkapnya Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersaji pada Gambar berikut::

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

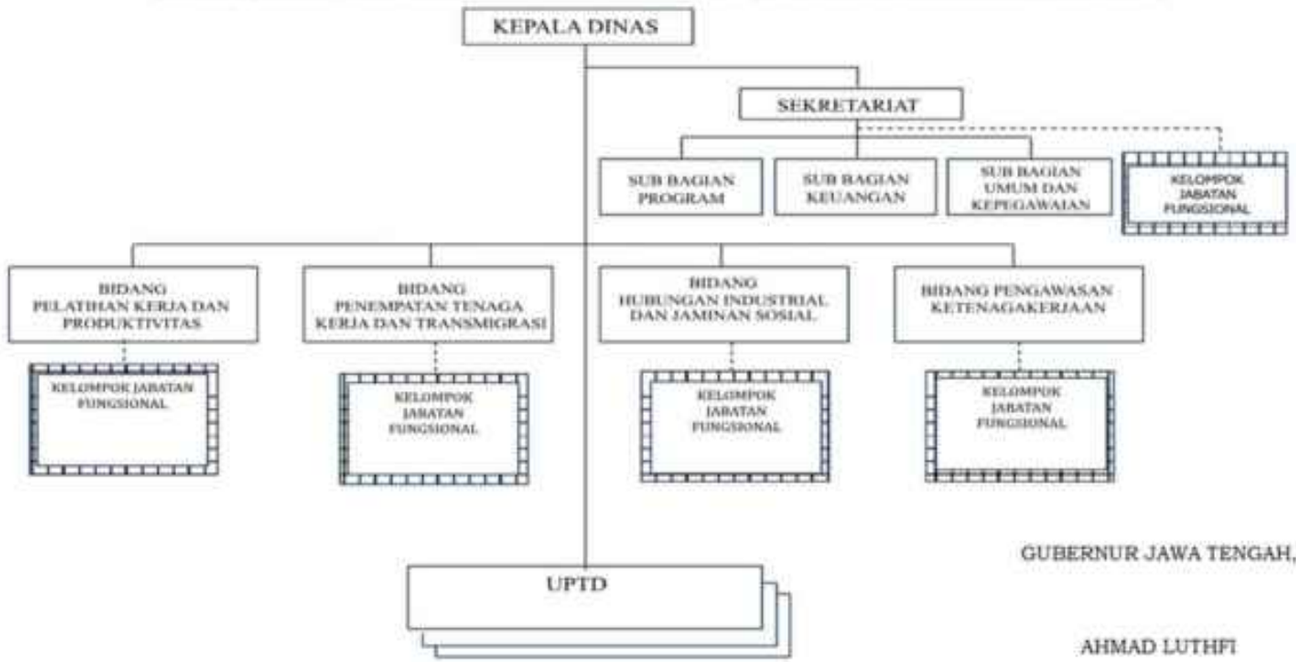

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah didukung personil/pegawai sejumlah 368 orang. Daftar jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana Gambar berikut.

Gambar 2.2.
Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat sebaran jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, dimana jumlah pegawai laki-laki lebih dominan yakni sebanyak 225 orang atau 61% sedangkan jumlah pegawai perempuan berjumlah 142 orang atau 38,6%. Dan termasuk 1 orang pegawai perempuan penyandang disabilitas daksa/fisik pada kaki kiri atau 0,3 % dari total pegawai. (Sumber Data : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Juni 2025)

Sementara itu, selain sebaran berdasarkan jenis kelamin, pada gambar dibawah juga terlihat sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang ada dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Gambar berikut.

Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

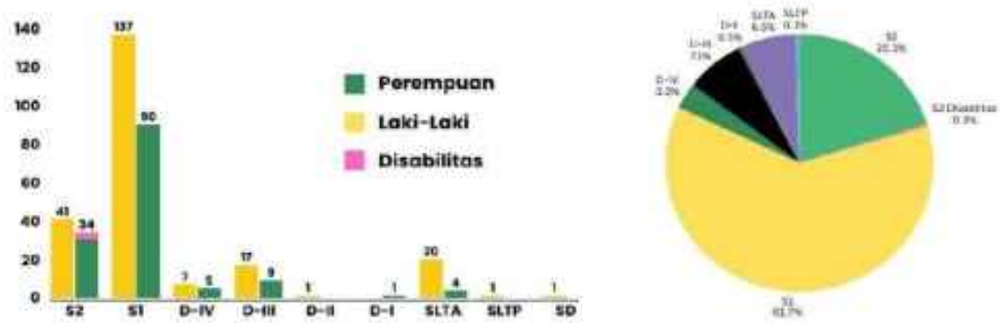

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 didominasi oleh lulusan S-1 sebanyak 227 orang pegawai (L: 137 P: 90) atau sebesar 61,7%, dan lulusan S-2 sebanyak 75 orang pegawai (L: 41 P: 34) atau 20,1% dan 1 orang pegawai perempuan penyandang disabilitas daksa/fisik berpendidikan S2 atau 0,3 %, lulusan D.III sebanyak 26 orang (L:17 P:9) atau 7,1 % dan D.IV.sebanyak 13 orang (L:7 P: 5) atau 3,3 % ; D.II sebanyak 1 orang (L) atau 0,3 % dan D. I sebanyak 1 orang (P) atau 0,3 %, serta lulusan SLTA sebanyak 24 pegawai (L:20 P:4) atau 6,5%; lulusan SLTP: 1 orang (L) dan SD :1 orang (L) . Artinya, dengan tingkat pendidikan yang baik (lulusan S-1 dan S-2), pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memiliki kompetensi secara akademis yang mendukung dalam menjalankan tugas pokok fungsinya masing masing.

Dan sebaran pegawai juga dapat dikelompokkan berdasarkan struktur seperti terlihat pada Gambar berikut :

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan sebaran pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (Juni 2025) berdasarkan struktur adalah sebagai berikut : Untuk Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 230 pegawai atau 62,3%. Sementara untuk Jabatan Fungsional Umum berjumlah sebanyak 110 pegawai atau 29,8% dan jabatan struktural sebanyak 28 pegawai atau 7,6 %. Dari jumlah sebaran pegawai fungsional tertentu tersebut diatas, termasuk jumlah pegawai penyandang disabilitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 (satu) orang pegawai atau 0,3 %, dengan jenis kelamin perempuan, yaitu mengalami disabilitas daksa atau disabilitas fisik pada kaki kiri .

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah merupakan kondisi capaian indikator di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan kondisi keadaan aset dan sarana prasarana yang dimiliki.

Gambaran kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, termasuk gambaran keadaan Aset dan Sarana Prasarana yaitu tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan irigasi serta aset tetap lainnya dijelaskan berdasarkan realisasi capaian target Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2018-2023 berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan yang diampu, yaitu Urusan Ketenagakerjaan (Urusan Wajib) ; dan Urusan Transmigrasi (Urusan Pilihan) . Selengkapnya

Aset dan Sarana Prasarana Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 s/d 2023 diuraikan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1.
Aset dan Sarana Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018 s/d 2023

No	Nama Bidang Barang	Keadaan Per 31- Desember-2018		Keadaan Per 31-Desember-2019		Keadaan Per 31- Desember-2020		Keadaan Per 31- Desember-2021		Keadaan Per 31-Desember 2022		Keadaan Per 31-Desember 2023	
		Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga(Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga(Rp)
1	TANAH												
	Tanah	24	90.352.753.000	24	90.352.753.000	24	90.352.753.000	24	90.352.753.000	23	90.270.673.000	23	90.270.673.000
2	Peralatan Mesin												
	Alat Besar	30	317.786.664	27	316.916.998	27	316.916.998	27	316.916.998	17	312.979.998	10	270.290.000
	Alat Angkutan	76	3.812.240.235	92	10.488.088.115	94	10.847.576.292	95	11.005.626.292	98	11.010.526.292	85	10.907.432.292
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.774	3.795.013.548	418	3.597.089.890	418	3.597.089.890	487	3.892.906.730	489	3.936.456.730	438	2.901.144.854
	Alat Pertanian	399	2.114.340.000	131	2.103.239.925	131	2.103.239.925	133	2.148.239.925	133	2.148.239.925	135	2.148.469.925
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.575	13.661.072.347	4.664	13.299.586.603	4.831	13.614.106.603	5.054	14.589.209.603	5	14.923.261.732	4.158	12.498.910.451
	Alat Studio dan Komunikasi	273	1.657.716.018	230	1.817.205.085	242	1.834.305.085	275	2.114.108.085	277	2.120.001.631	197	1.636.623.111
	Alat Kedokteran	173	550.242.305	127	541.292.525	127	541.292.525	127	541.292.525	127	541.292.525	93	263.868.685
	Alat Laboratorium	629	7.420.529.740	397	7.890.914.043	414	8.876.396.543	442	9.111.382.743	443	9.112.204.743	346	5.439.193.575
	Alat Komputer	726	5.195.845.085	768	5.568.628.145	786	5.673.278.145	916	6.919.482.945	934	7.059.062.945	725	6.266.957.160
	Alat Peraga	1	2.336.400	1	2.336.400	1	2.336.400	17	211.718.320	17	211.718.320	12	180.761.440
	Peralatan Olah Raga			1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
	Alat Persenjataan / keamanan												
3	GEDUNG DAN BANGUNAN												
	Bangunan Gedung	117	52.562.783.646	121	53.425.462.980	132	56.660.544.130	151	57.510.532.130	152	57.876.579.430	153	58.076.672.170
	Bangunan Monumen												
	Tugu Titik/Kontrol Pasti	1											
4	Jalan dan Irigasi												

No	Nama Bidang Barang	Keadaan Per 31- Desember- 2018		Keadaan Per 31- Desember-2019		Keadaan Per 31- Desember- 2020		Keadaan Per 31- Desember- 2021		Keadaan Per 31- Desember- 2022		Keadaan Per 31- Desember- 2023	
		Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)
	Jalan dan Jembatan												
	Bangunan Air / Irigasi	1	4.317.600	1	4.317.600	1	4.317.600	1	4.317.600	1	4.317.600	2	54.487.600
	Instalasi	13	664.890.192	13	664.890.192	13	743.895.492	14	763.895.492	14	763.895.492	15	798.195.195.492
	Jaringan	5	107.706.800	5	107.706.800	5	107.706.800	5	107.706.800	5	107.706.800	3	23.236.800
5	ASET TETAP LAINNYA												
	Buku Perpustakaan	1.697	129.988.870	2.785	156.471.092	2.831	162.022.092	2.999	193.742.092	2.999	193.742.092	2.864	190.250.092
	Barang Bercorak seni dan Budaya	31	79.613.505	29	78.285.500	29	78.258.500	29	78.258.500	29	78.258.500	21	77.908.500
	Hewan Ternak dan Tanaman	6	9.500.000	6	9.500.000	6	9.500.000	6	9.500.000				
6	KONSTRUKSI DLM PENGERJAAN												
	JUMLAH KESELURUHAN	15.551	182.438.675.955	9.84	184.853.720.348	10.115	196.116.507.320	10.806	200.473.200.280	10.917	201.407.256.055	9.284	192.743.413.447

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat kondisi aset dan sarana prasarana per 31 Desember 2019 yang terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan dan irigasi, aset tetap lainnya dimana terjadi perkembangan dan penambahan nilai aset dari per 31 Desember 2018, dari Rp. 182.438.675.955,- menjadi Rp.184.853.720.348,- atau mengalami peningkatan nilai di tahun 2019 sebesar Rp.2.415.044.393,- . Pada tahun 2020 penambahan nilai aset menjadi Rp. 196.116.507.320,- (per 31 – Desember 2020) dan di tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 200.473.200.280,- (per 31 Desember 2021). Pada tahun 2022 penambahan nilai aset menjadi Rp. 201.407.256.055,- (per 31 Desember 2022) dan ditahun 2023 menurun menjadi Rp. 192.748.418.447,- (per 31 Desember 2023).

2.4 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan kondisi capaian indikator di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Gambaran kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dijelaskan berdasarkan realisasi capaian target Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan yang diampu, yaitu Urusan Ketenagakerjaan (Urusan Wajib); dan Urusan Transmigrasi (Urusan Pilihan) . Selengkapnya pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan OPD Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase pengangguran yang ditangani	%				25,86	27,37	28,15	28,55		10,10	19,70	28,02	29,27		0,39	0,72	1,00	1,03	
	Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai				72,00	73,00	74,00	75,00		84,25	85,25	85	84,89		1,17	1,17	1,15	1,13	
2	**Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja daerah**																			
	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja dilakukan Pembinaan	%				N/A	N/A	28,57	57,14		N/A	N/A	34,00	68,57		N/A	N/A	1,19	1,20	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Sasaran 2 : Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja																			
	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%				7,09	7,39	7,89	8,19		11,08	5,34	12,20	13,65		1,56	0,72	1,55	1,67	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah (Rp/Juta)	Rp/ juta				54,59	54,60	54,61	54,62		55,01	55,91	57,11	55,47		1,01	1,02	1,05	1,02	
	Sasaran 3: Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja																			
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%				69,54	70,09	70,47	71,01		37,07	50,63	70,52	71,04		0,53	0,72	1,00	1,00	
	Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Baru di Sektor Informal	%				59,00	62,00	65,00	68,00		40,05	43,42	55,26	68,11		0,68	0,70	0,85	1,00	
	Sasaran 4: Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dalam hubungan Industrial dan jaminan sosial																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%				92,50	93,00	95,50	96,00		91,43	89,74	98,57	96,15		0,99	0,96	1,03	1,00	
	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%				87,26	87,41	87,56	87,70		96,56	97,60	97,70	98,72		1,11	1,12	1,12	1,13	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)					N/A	N/A	90,56	91,07		N/A	N/A	90,83	91,07		N/A	N/A	1,00	1,00	
	Sasaran 5 : Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja																			
	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%				92,09	89,26	86,21	82,97		90,56	89,51	88,10	81,51		0,98	1,00	1,02	0,98	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Sasaran 6 : Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi																			
	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	%				3,38	3,39	3,40	3,41		0,00	0,79	5,28	4,44		0,00	0,23	1,55	1,30	
	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian	%				0,00	2,54	3,40	3,60		0,00	0,79	3,99	4,44		N/A	0,31	1,17	1,23	
	Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai				72,00	73,00	74,00	75,00		84,25	85,25	85,00	80,00		1,17	1,17	1,15	1,07	
	Sasaran 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai				74,75	75,00	75,25	75,50		78,34	77,23	80,12	83,10		1,05	1,03	1,06	1,10	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
3	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**																			
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	%				N/A	N/A	28,57	57,14		N/A	N/A	34	68,57		N/A	N/A	1,19	1,2	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja																			
	Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%				7,09	7,39	7,89	8,19		4,99	5,34	12,2	13,65		0,70	0,72	1,55	1,67	
	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%				33,00	35,00	37,50	38,50		5,46	3,54	37,5	38,14		0,17	0,10	1,00	0,99	
	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%				3,90	4,00	4,10	4,20		0,31	0,81	4,01	4,63		0,08	0,20	0,98	1,10	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%				1,33	1,12	1,33	1,12		2,97	1,85	4,13	12,21		2,23	1,65	3,11	10,90	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%				8,33	7,69	7,69	6,67		23,07	8,16	9,44	21,22		2,77	1,06	1,23	3,18	
	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%				28,00	21,88	17,95	13,04		4,78	5,4	13,38	20		0,17	0,25	0,75	1,53	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran	%				33,00	25,00	20,00	16,00		16,91	46,59	68,72	78,54		0,51	1,86	3,44	4,91	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%				1,25	1,50	2,00	2,25		1,12	0,77	2,45	5,1		0,90	0,51	1,23	2,27	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja																			
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%				69,54	70,09	70,47	71,01		36,20	36,2	50,63	70,52		0,52	0,52	0,72	0,99	
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%				69,54	70,09	70,47	71,01		36,20	36,2	50,63	N/A		0,52	0,52	0,72		
	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	%				59,00	62,00	65,00	68,00		40,05	40,05	43,42	55,26		0,68	0,65	0,67	0,81	
	Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal	%				N/A	N/A	60	71,03		N/A	N/A	70,52	73,76		N/A	N/A	1,18	1,04	
	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	%				87,26	87,41	87,56	87,70		96,56	97,60	97,70			1,11	1,12	1,12		
	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%				22,00	29,00	36,00	43,00		15,65	16,02	36,24			0,71	0,55	1,01		
	Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%				44,66	45,65	46,62	47,61		47,59	49,63	54,59			1,07	1,09	1,17		
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%				92,50	93,00	95,50	96,00		91,43	89,74	98,57			0,99	0,96	1,03		
	Persentase perusahaan yang memenuhi ketentuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	%				23,05	23,42	23,79	24,15		24,29	24,36	N/A			1,05	1,04	N/A		
	Program Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%				92,09	89,26	86,21	82,97		91,92	89,51	N/A			1,00	1,00	N/A		
	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%				25,29	25,54	25,89	26,14		30,56	25,55	25,90			1,21	1,00	1,00		
	Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan	%				N/A	N/A	89,56	89,57		N.A	N/A	89,56							
	Program Pengembangan dan Penempatan Transmigrasi																			
	Persentase kenaikan transmigran yang ditempatkan memiliki rumah dan lahan usaha	%				3,38	3,39	3,40	3,41		0,00	N/A	N/A			0,00	N/A	N/A		
	Persentase kenaikan calon transmigram dilatih di bidang pertanian	%				3,38	3,39	3,40	3,41		0,00	0,79	3,99			0,00	0,23	1,17		
	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	%				3,38	3,39	3,40	3,41		0,00	0,79	5,28			0,00	0,23	1,55		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian	%				3,38	3,39	3,40	3,41		0,00	0,79	3,99			0,00	0,23	1,17		
	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang difasilitasi	%				N/A	N/A	3,18	3,60		N/A	N/A	5,28							
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah																			
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00			1,00	1,00	1,00		
B	**Renstra PD Tahun 2024-2026**																			
1	**Tujuan 1 : Meningkatkan Pengurangan Pengangguran**																			
	Persentase pengangguran yang ditempatkan	%								28,6					29,86					1,04
	Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Nilai								72					79,19					1,10
2	**Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja daerah**																			
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	%								62,85					68,57					1,09
	Sasaran 2 : Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja																			
	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Juta/Rupiah)	Rp/juta								56					55,47					0,99
	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%								9,24					13,65					1,48
	Sasaran 3: Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%								71,04					73,66					1,04
	Sasaran 4: Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dalam hubungan Industrial dan jaminan sosial																			
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%								91,07					91,07					1,00
	Sasaran 5 : Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%								81,53					81,51					1,00
	Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah																			
	Indeks Manajemen Risiko	Angka								3,01					2,96					0,98
	Sasaran 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka								85,1					87,5					1,03
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA																			
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%								62,85					68,57					1,09

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA																			
	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%								38,14					38,14					1,00
	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%								4,4					4,53					1,03
	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%								2,3					5,1					2,22
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%								2,88					12,21					4,24

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%								9,45					21,22					2,25
	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	%								13,13					20					1,52
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%								46,9					78,54					1,67
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA																			
	Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	%								45,05					73,76					1,64

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%								68,1					68,11					1,00
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL																			
	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%								98					98,72					1,01
	Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%								49,75					49,75					1,00
	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%								44,27					44,33					1,00
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%								96,15					98,78					1,03
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%								89,58					89,91					1,00
	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%								26,4					26,4					1,00
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI																			
	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%								3,61					4,4					1,22
	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	%								3,61					4,4					1,22
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%								100					100					1,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								100					100					1,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								100					100					1,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								100					100					1,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								100					100					1,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								100					100					1,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tar-get NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								100					100					1,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								100					100					1,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 20 (duapuluh) Indikator target kinerja urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 20 (duapuluh) indikator RPJMD yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan evaluasi hasil perencanaan pada tahun 2019-2024, dari 20 (duapuluh) indikator sebanyak 20 (duapuluh) indikator telah tercapai, dalam artian semua target indikator pada tahun 2024 telah tercapai seluruhnya.

Tabel 2.5.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada tahun 2020 sd 2024					APBD pada tahun 2020 sd 2024					Realisasi Anggaran Tahun 2020 sd 2024				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pendapatan						5.375.000.000	4.250.000.000	3.500.000.000	2.901.250.000	4.844.220.000	5.915.605.528	5.632.189.040	2.538.422.500	2.896.179.000	7.140.605.085
2	Belanja		137.198.821.000	101.320.993.000	111.000.000.000	135.991.940.000	95.236.787.000	100.753.877.000	99.020.993.000	108.951.470.000	121.142.670.000	92.095.777.971	96.399.253.357	96.072.012.396	102.120.454.634	116.741.463.646
3	Pembiayaan															

Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun 2020 sd 2024 (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
19	20	21	22		23	24
110,06	132,52	72,53	99,83	147,40	- 10.615.600.000	24.499.991.140
96,70	95,68	97,02	93,73	96,37	518.117.660.000	492.913.713.500

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tenaga Tahun 2019-2023 mengalami penurunan, yaitu realisasi Belanja pada tahun 2019 sebesar Rp. 120.869.395.717,- (94,24 % dari alokasi anggaran sebesar Rp.128.258.917.000,-), tahun 2020 menjadi Rp.92.095.777.971.000,- (96,7% dari alokasi anggaran sebesar Rp.95.236.787.000,-), sedangkan realisasi belanja pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp.96.399.253.971.000,- (95,68 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 100.753.877.000,-), dan ditahun 2022 realisasi belanjanya menjadi Rp.96.072.012.396 (97,02 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 99.020.993,-), ditahun 2023 realisasi belanja menurun menjadi Rp.15.544.808,314 (13,58 dari alokasi anggaran sebesar Rp114.451.470,-), tahun 2024 realisasi belanja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah meningkat menjadi sebesar Rp. 116.741.463.000 (dari alokasi anggaran sebesar Rp. 121.142.670.000).

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah juga telah berkomitmen mengintegrasikan isu kesetaraan gender dalam setiap kebijakan, program dan sub kegiatan yaitu dengan diarahkan dan dimplementasikan untuk mengalokasikan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang telah terealisasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.261.753.000,- (7,8 persen) dari total anggaran Perangkat Daerah setelah dikurangi belanja pegawai sebesar Rp. 54.529.471.000,-. Dan untuk alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) meningkat pada tahun 2025 menjadi 15,18 persen yaitu sebesar Rp. 13.044.138.000,- (15,18 persen) dari total anggaran dikurangi belanja pegawai sebesar Rp 85.950.127.000,- yaitu pada beberapa Program yang langsung untuk masyarakat yang sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
c. Progrram Penempatan Tenaga Kerja
d. Program Hubungan Industrial
e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

2.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pengembangan pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dijelaskan berikut ini.

Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting. Tanpa data ketenagakerjaan, program pembangunan bisa kurang tepat dalam pelaksanaannya. Ketersediaan data ketenagakerjaan yang semakin lengkap dan tepat akan memudahkan pemerintah dalam membuat rencana pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Provinsi Jawa Tengah dibutuhkan sekali data mengenai jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

Penduduk Usia Kerja (*working age population*) di Provinsi Jawa Tengah menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada

bulan Agustus 2024 tercatat berjumlah 29.712.182 orang terdiri dari Penduduk Usia Kerja (PUK) tidak memiliki Disabilitas berjumlah 28.939.798 orang dan yang memiliki disabilitas berjumlah 772.384 orang. Bila dirinci menurut jenis kelamin, penduduk usia kerja perempuan tercatat sebanyak 14.860.118 orang atau 50,01 persen dari total penduduk usia kerja di Jawa Tengah. Jumlah tersebut sedikit lebih banyak bila dibanding dengan penduduk usia kerja laki-laki yang tercatat sebanyak 14.852.064 orang (49,99 persen).

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. PUK cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Jawa Tengah, yaitu di tahun 2024 sebanyak 37.892.282 orang lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk di tahun 2023 sejumlah 37.540.900 orang. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 29,71 juta orang, meningkat sebanyak 334,55 ribu orang dibandingkan Agustus 2023 (tabel 2.6). Sebagian besar PUK merupakan angkatan kerja yaitu 21,91 juta orang, sedang sisanya termasuk dalam bukan angkatan kerja sebanyak 7,80 juta orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri atas 20,86 juta orang penduduk yang bekerja dan 1,05 juta orang pengangguran. Sementara itu, komposisi angkatan kerja pada Agustus 203 terdiri atas 19,99 juta orang penduduk bekerja dan 1,08 juta orang pengangguran. Artinya terdapat kenaikan angkatan kerja sebanyak 839.71 juta orang, kenaikan jumlah
penduduk bekerja sebanyak 872,52 juta orang dan penurunan penganguran sebanyak 32,81 juta orang pada periode tersebut. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Dalam kurun waktu Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024, TPAK Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 73,74 persen, meningkat sebesar 2,02 persen poin dibanding Agustus 2023. Jika dilihat berdasarkan kategori jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 85,66 persen. Lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 61,82 persen. Apabila dibandingkan pada
periode Agustus 2023, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 1,14 persen poin. Begitu pula dengan TPAK perempuan yang mengalami kenaikan sebesar 2,90 persen poin. GAP Gender (Kesenjangan) antara TPAK laki –laki dan perempuan tahun 2024 sebesar 23,84 persen, lebih baik dari pada GAP Gender tahun 2023 sebesar 25,60 persen . Dan TPAK yang tidak memiliki disabilitas tahun 2024 sebesar 75,16 persen, TPAK memiliki disabilitas sebesar 20,28 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka. TPT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja, dinyatakan dalam persen. Ukuran ini dapat digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di Jawa Tengah. TPT di Jawa Tengah pada Agustus 2024 tercatat sebesar 4,78 persen yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat hampir

sekitar 5 orang yang menganggur. Bila dilihat menurut jenis kelamin, TPT perempuan lebih rendah dari pada TPT Laki-Laki, tercatat masing-masing sebesar 4,71 persen dan 4,83 persen. TPT di Jawa Tengah pada Agustus 2024 tersebut lebih baik dari TPT pada Agustus Tahun 2023 tercatat sebesar 5,13 persen, yang terdiri TPT laki – laki sebesar 5,43 persen dan TPT perempuan sebesar 4,69 persen.

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bila dilihat berdasarkan Data Disabilitas pada tahun 2024 adalah TPT yang tidak memiliki Disabilitas sebesar 4,77 persen (laki – laki : 4,82 persen dan perempuan : 4,71 persen) dan TPT memiliki Disabilitas sebesar 6,00 persen (laki – laki : 5,86 persen dan perempuan : 6,31 persen). Bila TPT dilihat menurut Data Disabilitas, maka TPT yang tidak memiliki disabilitas pada tahun 2024 sebesar 4,77 persen lebih baik dari TPT yang tidak memiliki Disabilitas tahun 2023 yaitu sebesar 5,12 persen. Bila berdasarkan jenis kelamin, TPT yang tidak memiliki disabilitas untuk laki – laki di tahun 2024 tercatat 4,82 persen lebih baik dari tahun 2023 yaitu sebesar 5,45 persen, tetapi untuk perempuan tercatat 4,70 persen lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 4,65 persen atau meningkat 0,05 poin. Untuk TPT memiliki disabilitas pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,00 persen lebih baik dari pada tahun 2023 sebesar 6,07 persen dan tahun 2024 TPT memiliki disabilitas laki – laki tercatat 5,86 persen lebih rendah daripada perempuan 6,31 persen. Tetapi bila dibandingkan dengan TPT memiliki disabilitas tahun 2023 (laki – laki tercatat 3,12 persen , dan perempuan 10,14 persen), maka TPT memiliki disabilitas untuk untuk laki-laki tahun 2023 lebih rendah atau lebih baik dari tahun 2024, tetapi untuk TPT memiliki disabilitas perempuan tahun 2024 sebesar 6,31 persen lebih baik atau lebih rendah dari tahun 2023 yaitu sebesar 10,14 persen.

Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja, atau tidak mampunya pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya sejumlah pekerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan perekonomian. Hal ini terutama terjadi di daerah perkotaan dimana antara permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak seimbang.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu wilayah. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) diukur sebagai persentase jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja. Dalam pengertian ”kesempatan kerja” tidaklah sama dengan “lapangan kerja yang masih terbuka”. Di Provinsi Jawa Tengah, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada bulan Agustus 2024 sebesar 95,22 persen, berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja sekitar 95 orang mempunyai kegiatan bekerja atau sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu sekitar 5 orang.

Untuk Tingkat kesempatan Kerja (TKK) tidak memiliki disabilitas (%) tahun 2024 sebesar 95,23 persen, lebih baik dari tahun 2023 sebesar 94,88 persen, berarti dari 100 orang angkatan kerja , sekitar 95 orang yang bekerja atau atau sementara yang tidak bekerja selama seminggu yang lalu sekitar 5 orang. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) memiliki disabilitas (%) tahun 2024 sebesar 94,00 persen, lebih baik dari

tahun sebesar 2023 sebesar 93,93 persen, berarti dari 100 orang angkatan kerja, sekitar 94 orang yang bekerja dan atau sementara yang tidak bekerja selama seminggu yang lalu sebesar 6 persen. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja (BAK) Tahun 2024 sejumlah 7.803.338 orang (laki – laki : 2.129.458 dan perempuan :5.673.880), jumlahnya meningkat dibandingkan Bukan Angkatan Kerja (BAK) tahun 2023 : 8308.494 orang (laki-laki:2.273.363 dan perempuan: 6.035.131). Gambaran data umum ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.6.
Data Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan 2024

K A T E G O R I	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Penduduk	18.866.400	18674500	37.540.900	19.037.742	18.854.541	37.892.283
Penduduk Bukan Usia Kerja (PBUK)	**4.179.586**	**3.983.685**	**8.163.271**	**4.185.678**	**3.994.423**	**8.180.101**
Penduduk Usia Kerja (PUK : 15 tahun keatas)	**14.686.814**	**14.690.815**	**29.377.629**	**14.852.064**	**14.860.118**	**29.712.182**
Penduduk Usia Kerja (PUK : 15 tahun keatas)	**14.686.814**	**14.690.815**	**29.377.629**	**14.852.064**	**14.860.118**	**29.712.182**
PUK tidak memiliki Disabilitas	14.358.484	14.311.408	28.669.892	14.471.362	14.468.436	28.939.798
PUK memiliki Disabilitas	328.330	379.407	707.737	380.702	391.682	772.384
a. Angkatan Kerja (AK)	**12.413.451**	**8.655.684**	**21.069.135**	**12.722.606**	**9.186.238**	**21.908.844**
a.a) A K tidak memiliki Disabilitas	12.322.510	8.589.452	20.911.962	12.614.989	9.137.179	21.752.168
a.b) A K memiliki Disabilitas	90.941	66.232	157.173	107.617	49.059	156.676
1) Bekerja	**11.739.366**	**8.249.509**	**19.988.875**	**12.107.961**	**8.753.432**	**20.861.393**
1.a) Bekerja tidak memiliki Disabilitas	11.651.259	8.189.991	19.841.250	12.006.652	8.707.471	20.714.123
1.b) Bekerja memiliki Disabilitas	88.107	59.518	147.625	101.309	45.961	147.270
2) Pengangguran Terbuka (PT)	**674.085**	**406.175**	**1.080.260**	**614.645**	**432.806**	**1.047.451**
2.a) P T tidak memiliki Disabilitas	671.251	399.461	1.070.712	608.337	429.708	1.038.045
2.b) P T memiliki Disabilitas	2.834	6.714	9.548	6.308	3.098	9.406
b. Bukan Angkatan Kerja (B A K)	**2.273.363**	**6.035.131**	**8.308.494**	**2.129.458**	**5.673.880**	**7.803.338**
b.a) B A K tidak memiliki Disabilitas	**2.035.974**	**5.721.956**	**7.757.930**	**1.856.373**	**5.331.257**	**7.187.630**
b.b) B A K memiliki Disabilitas	**237.389**	**313.175**	**550.564**	**273.083**	**342.623**	**615.706**
a) Sekolah	945.665	987.978	1.933.643	964.874	1.020.248	1.985.122
b) Mengurus Rumah Tangga	508.391	4.579.887	5.088.278	494.561	4.215.624	4.710.185
c) Lainnya	819.307	467.266	1.286.573	670.023	438.008	1.108.031

KATEGORI	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	**84,52**	**58,92**	**71,72**	**85,66**	**61,82**	**73,74**
Gender GAP (antara TPAK Laki-laki dan Perempuan)	**25,60**			**23,84**		
TPAK tidak memiliki Disabilitas (%)	85,82	60,02	72,94	87,17	63,15	75,16
TPAK memiliki Disabilitas (%)	27,70	17,46	22,21	28,27	12,53	20,28
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	**5,43**	**4,69**	**5,13**	**4,83**	**4,71**	**4,78**
TPT tidak memiliki Disabilitas (%)	5,45	4,65	5,12	4,82	4,70	4,77
TPT memiliki Disabilitas (%)	3,12	10,14	6,07	5,86	6,31	6,00
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	**94,57**	**95,31**	**94,87**	**95,17**	**95,29**	**95,22**
TKK tidak memiliki disabilitas (%)	94,55	95,35	94,88	95,18	95,30	95,23
TKK memiliki disabilitas (%)	96,88	89,86	93,93	94,14	93,69	94,00

Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah dan Pusdatik Kemnaker RI (data diolah)

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan kondisi capaian indikator di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Gambaran kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diuraikan sebagai berikut:

Pencari kerja yang ditempatkan selama periode Tahun 2018 – 2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2018 ditempatkan sebanyak 167.247 orang meningkat menjadi 210.889 orang ditahun 2019. Namun terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi 81.835 karena Pandemi Covid meningkat di tahun 2021 sebesar 136.611 orang , menjadi 227.088 di tahun 2022. ditahun 2023 mengalami peningakatan menjadi 236,491 orang dan ditahun 2024 mengalami penurunan menjadi 233.767 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan jumlah tenaga kerja di Jawa Tengah yang ditempatkan sesuai kompetensinya dipasar kerja. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel.2.7
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2024 (%)

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2018	240.246	167.247	69,61
2019	300.098	210.889	70,27
2020	220.763	81.835	37,07
2021	269.810	136.611	50,63
2022	322.041	227.088	70,52
2023	332.644	236.491	71,09
2024	316.940	233.767	73,76

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024

Sedangkan secara makro di Provinsi Jawa Tengah, masih tinggi jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun yang merupakan Angkatan kerja Kelompok Usia Muda yang sedang tidak sedang bekerja, tidak Sekolah atau mengikuti pelatihan (NEET).

Not in Employment, Education or Training (NEET) adalah penduduk usia 15 - 24 tahun (Angkatan Kerja kelompok umur muda) yang sedang tidak bekerja, tidak sekolah atau mengikuti pelatihan . Jumlah NEET di Jawa Tengah relatif meningkat sejak tahun 2021 : 1.097.209 orang meningkat menjadi 1.101.412 orang di tahun 2022 , dan tahun 2023 menjadi 1.185.589 orang dan menurun di tahun 2024 menjadi 1.009.075 orang dan gambaran jumlah *Not in Employment, Education or Training* (NEET) di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 2.8
Jumlah *Not In Employment, Education or Training (NEET)* di Jawa Tengah
Tahun 2021 - 2024

No	Tahun	*Not in Employment, Education or Training*		Jumlah *NEET* (Orang)	Penduduk Usia Kerja Muda 15-24 tahun)		Jumlah Penduduk Usia Muda (Orang)	Persentase NEET		Persentase NEET
		Laki-laki	Pe-rempuan		Laki - laki	Perempuan		Laki - laki	Pe-rempuan	
1	2021	489.883	607.326	1.097.209	2.756.403	2.643.769	5.400.172	18	23	20
2	2022	492.275	609.137	1.101.412	2.752.808	2.636.652	5.389.460	18	23	20
3	2023	548.538	637.051	1.185.589	2.908.664	2.740.087	5.648.751	19	23	21
4	2024	450.476	558.599	1.009.075	2.897.689	2.729.347	5.627.036	16	20	18

Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021,2022,2023,2024 (data diolah)

Jumlah NEET berdasarkan jenis kelamin tersebut lebih banyak didominasi oleh perempuan. Hal tersebut menandakan bahwa dalam masyarakat masih terdapat sekelompok orang yang termasuk dalam angkatan kerja atau kelompok usia muda, yang bila fenomena NEET secara masif dan berkepanjangan akan berpotensi memberikan dampak negatif yang lebih besar, baik pada diri dan lingkungannya serta berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja. Produktivitas rendah, karena banyaknya jumlah NEET yang mengakibatkan hilangnya kesempatan mereka untuk menghasilkan output yang meningkatkan pendapatan daerah dan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Kondisi ini mencerminkan terbatasnya penyerapan tenaga kerja baru dan tantangan transisi sekolah ke dunia kerja . Rendahnya penyerapan diperparah oleh ketimpangan wilayah; peluang kerja banyak tersentralisasi di kota besar, sementara di daerah lain , pemuda kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Pada lingkup keluarga, NEET akan mengalami ketergantungan secara permanen pada orang tua dan dapat menjadi beban ekonomi keluarga. Pada ruang lingkup yang lebih luas yaitu dalam kehidupan bermasyarakat , NEET dianggap sebagai sekompok orang yang tidak hanya membahayakan stabilitas negara tetapi juga merusak tatanan masyarakat yang dapat berdampak terburuk yang mungkin terjadi adalah terhambatnya roda perekonomian suatu negara terlebih pada negara yang memiliki penduduk usia muda yang tinggi dan negara harus mengimpor Tenaga kerja (TKA) untuk membantu proses pelaksanaan industri, pembangunan dan perekonomian di daerah atau wilayah / negara. Hal – hal tersebut merupakan beberapa permasalahan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berikut pemetaan permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi sebagaimana tabel berikut ini

Tabel. 2.9
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	**Tenaga Kerja**		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka masih tinggi di Provinsi Jawa Tengah	1) Ketidaksesuaian keterampilan (***Skill Mismatch***) dari lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang mendominasi pengangguran di Jawa Tengah . 2) Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka lulusan SMK tahun 2024 : 9,52 persen atau 331.152 orang dan penganggur muda (15 th sd 29 tahun) : 66,22 persen atau 693.687 orang , sedangkan jumlah penganggur terbuka sebanyak : 1.047.451 orang yang mencermin- kan ketidak sesuaian keterampilan (***Skill Mismatch***) antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan Industri .	a. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 didominasi oleh golongan umur 15 -24 tahun (51,06 persen), yang pada dasarnya golongan umur tersebut merupakan generasi Z yang memiliki kecenderungan untuk memilih lingkungan kerja yang lebih fleksibel, baik jam kerja maupun lokasi kerja. Sehingga mereka lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki budaya kerja yang positif dan cenderung meninggalkan pekerjaan apabila beban kerja terlalu tinggi . b. Pertumbuhan ekonomi yang relative stagnan (2024 sebesar 4,95 persen), diperkirakan pertumbuhan ekonomi 1 persen akan menyerap tenaga kerja kita – kira 250 ribu orang . c. Tingginya Turn Over Tenaga Kerja Muda d. Metode penghitungan TPT adalah perbedaan usia angkatan kerja yang dilakukan survei oleh BPS adalah 15 tahun , sedangkan usia bekerja di perusahaan adalah 18 tahun e. Kurikulum , sarana dan prasarana (alat praktek) dan pelatihan di SMK tidak sesuai dengan kondisi DUDIKA (Dunia Usaha , Dunia Industri dan Dunia kerja) saat ini . f. Tenaga pengajar SMK /guru SMK masih terdapat 408

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	**Tenaga Kerja**		
			guru atau 56,20 persen yang belum memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Total guru 726 dari 11 SMK yang diuji petik oleh BPKP) g. Kurangnya pelatihan ***softskill*** dan ***hardskill*** h. Balai Latihan Kerja belum bisa menampung pencari kerja yang berminat mengikuti pelatihan vokasi, karena keterbatasan kuota pelatihan
		3) Penyerapan tenaga kerja atau penduduk yang bekerja golongan umur 15 sd 29 tahun masih rendah (22,49 persen) dan pengangguran usia muda (15 sd 29 tahun) masih tinggi : 66,22 persen atau 693.687 orang .	a. Pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari penciptaan lapangan kerja baru (terjadi peningkatan pengangguran, terutama pada usia muda dan lulusan baru), diantaranya ditunjukkan banyaknya jumlah NEET : 17,93 persen dari Penduduk Usia Kerja (PUK) gol umur 15 -24 tahun. Hal tersebut mencermin-kan ketidak mampuan pertumbuhan ekonomi menyerap lonjakan Angkatan kerja. b. Adanya *mismatch* atau ketidak sesuaian keterampilan antara dunia Pendidikan dan dunia usaha , yang menyebabkan tidak terserapnya mereka dalam pasar kerja . c. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kerja tidak mampu diakses oleh Generasi Z , karena jenis pelatihannya harus sesuai dengan karakteristik Gen Z . d. Upaya peningkatan kualitas SDM melalui jenjang Pendidikan tidak diantisipasi dengan ketersediaan lapangan kerja yang layak untuk level Pendidikan yang tinggi. e. Akses informasi pasar kerja belum merata , terbatasnya *job matching* digital dan kurangnya

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	**Tenaga Kerja**		
			peluang kerja di daerah rural /pedesaan f. Masih banyaknya penduduk usia kerja umur 15-49 tahun tidak mampu untuk mengakses internet g. *Missmatch* geografis dan sektoral yaitu ketidaksesuaian antara lokasi ketersediaan kerja dan domisili pencari kerja , serta jenis keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan sektor usaha h. Masih tingginya Penduduk Yang Bekerja dengan status pekerja keluarga (pekerja tak dibayar) tahun 2024 yaitu sebanyak 2.672.660 orang (12,81 persen) yaitu Laki-laki 699.534 orang (26,17 persen) dan perempuan1.973.126 (73,82 persen) i. Fragmentasi data dan kesenjangan informasi pasar kerja sehingga jumlah pencari kerja yang terdaftar dengan system pasar kerja baik di Kemnaker dan di Disnakertrans Jateng sedikit jika dibandingkan dengan angka pengangguran (BPS) j. Kapasitas jumlah pegawai pengantar kerja terbatas yaitu 160 orang dibandingkan jumlah perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan di WLKP Online 13.406 perusahaan di tahun 2024.
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan penyandang disabilitas masih rendah di Jawa Tengah, yang mengindikasikan bahwa rendahnya persentase angkatan kerja atau persediaan tenaga kerja perempuan terhadap Penduduk Usia Kerja (PUK) yang aktif secara ekonomi.	1) Partisipasi kerja perempuan dan penyandang disabilitas masih rendah , akibat dipengaruhi beberapa factor, antara lain: a. Beban ganda perempuan yang harus membagi waktu antara pekerjaan domestic dan pekerjaan b. Akses terhadap peluang kerja belum setara , diskriminatif , termasuk terbatasnya akses untuk mendapatkan pelatihan dan keterampilan. c. Norma sosial budaya yang masih memandang pekerjaan tertentu lebih layak bagi laki – laki .	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 : 73,74 persen dan Gender GAP atau kesenjangan Gender tahun 2024 : 23 , 84 persen lebih baik dari tahun 2023 : 25,60 persen b. TPAK laki -laki lebih besar dari perempuan dan TPAK perempuan cenderung meningkat , sehingga Gender Gap atau kesenjangan gender semakin menurun . c. Penduduk usia kerja (PUK) di Jawa Tengah 2024 tingkat pendidikannya rendah yaitu SD (40,47 persen

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	**Tenaga Kerja**		
		2) Rendahnya penyandang disabilitas yang bekerja tahun 2024 di sektor formal 15,14 persen (22.306 orang), hal ini akibat dipengaruhi sebagai berikut : a. Kurangnya akses terhadap pendidikan dasar atau penyetaraan dan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor formal atau perusahaan b. Perusahaan telah menginfokan lowongan kerja bagi penyandang disabilitas , tapi yang lolos verifikasi atau memenuhi sedikit , penyebabnya karena kualitasnya rendah dan banyak yang penyandang disabilitas tidak punya ijasah penyetaraan atau ijasah SD . c. Belum adanya data profil Penyandang Disabilitas d. Belum adanya pemetaan kebutuhan pelatihan dan kualifikasinya bagi penyandang disabilitas	) dan SMP (23,65 persen) , sehingga banyak lowongan kerja di perusahaan yang tidak bisa dipenuhi oleh pencari kerja . d. ULD (Unit Layanan Disabilitas) Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dalam menempatkan tenaga kerja Penyandang Disabilitas di perusahaan terkendala aturan pemenuhan ***Buyer*** terkait order /pesanan barang yang diproduksi yaitu : syarat bagi penyandang disabilitas bekerja di perusahaan /sector formal harus mempunyai ijasah SD atau penyetaraan / Kejar Paket A melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan kewenangan dari kabupaten /kota . e. Di PKBM tersedia anggaran BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk peserta penyetaraan /kejar paket A bagi yang berumur dibawah 24 tahun alias Gratis tidak membayar biaya sekolah. f. Tetapi yang terjadi di masyarakat , banyak pencari kerja umurnya lebih dari 24 tahun dan belum mempunyai ijasah SD dan atau penyetaraan. Kebanyakan mereka termasuk keluarga yang berpotensi miskin. g. Sedangkan ULD Pendidikan belum memfasilitasi pendidikan penyetaraan atau PKBM untuk penyandang disabilitas khususnya untuk yang berumur 24 tahun ke atas h. Kurangnya partisipasi perempuan dalam akses dan pelatihan pada program kegiatan peningkatan partisipasi ekonomi perempuan, khususnya pada sasaran manfaat yaitu bagi perempuan yang mengurus rumah tangga yang termasuk Bukan

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	**Tenaga Kerja**		
			Angkatan Kerja (BAK) ; i. Kurangnya kontrol dan intervensi kebijakan pada implementasi untuk penetapan sasaran manfaat tersebut yaitu bagi perempuan yang mengurus rumah tangga (yang termasuk Bukan Angkatan Kerja) untuk diberikan akses pelatihan keterampilan, pemberdayaan , supaya dapat meningkatkan kualitas ketrampil- an dan atau pemberdayaan dalam perluasan kesempatan kerja, sehingga akan meningkatkan pendapatan karena dapat bekerja (bekerja sektor informal/wirausaha) sehingga meningkat produktivitasnya .
3.	Rendahnya perlindungan pekerja	1) Rendahnya cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal sebesar 11,96 persen dibandingkan sector formal sebesar 68,92 persen. 2) Rendahnya literasi atau pembinaan terkait perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di sektor formal maupun informal .	a. Masih adanya perusahaan yang kurang patuh untuk mendaftarkan pekerjanya untuk ikut Jaminan social ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan. b. Struktur ketenagakerjaan di Jawa Tengah, penduduk yang bekerja di sektor informal masih dominan (59,64 persen) yang sulit di data dan dijangkau oleh BPJS Ketenagakerjaan. c. Regulasi perlindungan pekerja informal masih lemah d. Sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor informal yang rentan dan tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. e. Kapasitas jumlah Pegawai Mediator terbatas (107 orang) di bandingkan jumlah perusahaan yang harus dibina (perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan (104.911 perusahaan) -Kapasitas pengawas ketenagakerjaan yang

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	**Tenaga Kerja**		
			terbatas (130 orang pegawai) , dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaannya dalam WLKP Online 13.406 perusahaan . f. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Pengusaha dalam pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) g. Rendahnya partisipasi Serikat Pekerja (SP) / Serikat Buruh (SB) dalam penyusunan Hukum otonom Perjanjian Kerja Bersama (PKB). h. Lemahnya koordinasi pada Kelembagaan Hubungan Industrial untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau perselisihan ketenagakerjaan yang sering terjadi i. Kurangnya dialog antara pekerja dan pengusaha terhadap pemahaman dan literasi perlunya perlindungan dasar pekerja dan cara perhitungannya melalui penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) ,UMK (Upah Minimum Kab/Kota) , Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Mimum Sektoral Kabupaten/Kota j. Rendahnya kesadaran pengusaha untuk membuat Struktur Skala Upah yang adil dan proporsional di perusahaan
4.	Penegakan Norma Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja belum optimal.	1) Kurangnya fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan yaitu di tahun 2024 dari 13.406 perusahaan di Jawa Tengah yang mempunyai day	a. Masih kurangnya perlindungan hak normatif pekerja perempuan dan anak di sektor formal maupun informal yang adil dan nondiskriminatif

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	**Tenaga Kerja**		
		care sebanyak 53 perusahaan (data WLKP) dan yang mempunyai koperasi pekerja sebanyak 135 perusahaan (berdasarkan data Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Disnakertrans Prov. Jateng 2024) 2) Masih banyaknya perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan, norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan norma lingkungan) 3) Masih adanya ketimpangan upah yang diterima oleh perempuan 2024 (BPS) : Rata – rata Upah pekerja per bulan : Rp. 2.246.703 Rata- rata upah pekerja Laki –laki : per bulan Rp. 2.446.050 Rata-rata upah pekerja Perempuan per bulan : Rp. 1.891.758 4) Rasio pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak memadai (130 orang) , sehingga kemampuan mengawasi seluruh perusahaan dan yang melaporkan ke WLKP Online 13.406 perusahaan.	b. Masih tingginya Penduduk Usia Kerja umur 10-17 tahun yang bekerja = 328.986 orang (7,16 %) dari Penduduk Usia Kerja umur 10-17 tahun = 4.589.142 orang dan umumnya anak yang bekerja di sektor informal c. Banyaknya perusahaan yang tidak memahami peraturan ketenagakerjaan d. Banyaknya pengaduan dari masyarakat / pekerja terkait pelayanan ketenagakerjaan : jaminan sosial ketenagakerjaan, upah (upah setara) dan kesejahteraan pekerja , jam kerja , cuti hamil e. Tingginya ego masing – masing para pihak (pengusaha dan pekerja) dalam proses penyelesaian perselisihan, sehingga tidak terjadi kesepakatan sehingga dikeluarkan atau diterbitkan anjuran . f. Masih adanya pengaduan kasus kekerasan verbal, pelecehan seksual , penyebaran video asusila di tempat kerja g. Perusahaan tidak mengetahui dan memahami atau tidak melaksanakan aturan tentang Peraturan Perusahaan (PP_) dan Peraturan Kerja Bersama (PKB) , Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit, Struktur dan Skala Upah dan BPJS Ketenagakerjaan. h. Masih banyaknya perusahaan , khususnya yang skala menengah ke bawah yang belum menerapkan Norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dengan baik. i. Menurunnya Produktivitas tenaga kerja di perusahaaan, akibat dari kondisi lingkungan kerja yang belum memenuhi Standar K3 , seperti kondisi penerangan yang masih kurang, intensitas kebisingan yang tinggi dan banyak peralatan mesin yang tidak

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	**Tenaga Kerja**		
			menggunakan pengaman dengan baik. j. Masih tingginya angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta belum terlaksananya standarisasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja k. Banyaknya perusahaan yang tidak melaporkan kembali terkait laporan ketenagakerjaan di WLKP Online l. Kurangnya pegawai pengawas KK (Ketenagakerjaan), baik pegawai pengawas KK (Ketenagakerjaan) umum maupun spesialis dibandingkan dengan jumlah perusahaan dan obyek K3 .
5	Produktivitas dan daya saing tenaga kerja masih rendah .	1) Rendahnya produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah , hal ini karena sebagian besar tenaga kerja berada di sektor padat karya informal (pertanian, perdagangan) , sehingga menyebabkan rendahnya kontribusi PDRB/Kapita 2) Masih banyak pekerja sektor informal seperti industry dan keuangan dengan pendidikan ≤ SMTA 3) Kurangnya ***high – skilled worker*** (pekerja yang berkemampuan tinggi , mempunyai keterampilan,pengetahuan yang memerlukan pendidikan tinggi , pelatihan khusus atau pengalaman yang signifikan) , yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing	a. Sebagian besar penduduk yang bekerja berpendidikan SMP kebawah (71,77 %) , yang berkeahlian rendah, menyebabkan produktivitasnya rendah dan daya saing rendah b. Rendahnya jumlah lulusan pendidikan tinggi, menengah yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi sbb : Penduduk yang bekerja (PYB) = 20.861.393 orang menurut pendidikan sebagai berikut : Pendidikan tinggi : 1941238 orang ; Pendidikan menengah : 6030413 orang ; Pendidikan dasar : 12.889.742 orang **PYB Keahlian Tinggi** =1723511 orang, menurut pendidikan sbb : pendidikan tinggi : 1.033.128 orang ; pendidikan menengah : 439.337 orang ; pendidikan dasar : 401844 orang **PYB Keahlian Menengah** : 9709309 orang menurut pendidikan sbb: Pendidikan tinggi : 713917 orang ; Pendidikan menengah : 2723528 orang ;

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	**Tenaga Kerja**		
		4) Kurangnya ketersediaan pekerjaan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja 5) Sektor informal mendominasi , namun tidak produktif secara ekonomi , karena sebagian besar tenaga kerja berada di sektor informal, dengan produktivitas rendah, margin kecil dan akses terbatas ke teknologi dan pelatihan.	Pendidikan dasar : 6721864 orang c. Masih lemahnya budaya kerja produktif, disiplin waktu, penggunaan teknologi atau kerja berbasis target; dan soft skill (Komunikasi , manajemen waktu , problem solving) d. Masih adanya tenaga kerja yang akhirnya terpaksa menerima pekerjaan walau tidak sesuai dengan keahlian dan kompetensinya dengan konsekueni jabatan yang tidak sesuai dan upah yang lebih rendah mengakibatkan produktivitas tenga kerja lebih rendah dibandingkan kemampuannya . e. Rendahnya produktivitas karena banyaknya jumlah NEET yang mengakibatkan hilangnya kesempatan mereka untuk menghasilkan output yang meningkatkan pendapatan daerah dan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja . f. Minimnya akses pelatihan berbasis produktivitas dan inovasi kerja , sebagian besar pelatihan masih focus pada ketrampilan teknis , belum banyak yang mengembangkan pelatihan efisiensi kerja dan inovasi proses produksi . g. Di Jawa Tengah, belum dibentuk Lembaga Produktivitas Daerah (LPD) sebagai pelaksana di Daerah mendasarkan Inpres 1 Tahun 2023 tentang yang Lembaga Produktivitas Nasional h. Mayoritas tenaga kerja terserap di sektor pertanian dan informal tersebut produktivitas rendah i. Jenis jabatan yang menjadi pilihan antar generasi juga memilki perbedaan j. Rendahnya adopsi teknologi dan budaya kerja efisien

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	**Tenaga Kerja**		
			k. Rendahnya investasi teknologi dan digitalisasi pada sektor padat karya sbb : masih banyak sektor terutama UMKM dan pertanian masih menggunakan metoda kerja tradisional dan peralatan manual ; dan adopsi teknologi digital rendah, padahal dapat meningkatkan produktivitas per tenaga kerja secara signifikan
2	Transmigrasi		
	Masih tingginya jumlah penduduk Miskin di Jawa Tengah (Tahun 2023 =10,77 Persen dan tahun 2024 =10,47 Persen)	Rendahnya jumlah penempatan calon transmigran ke daerah tujuan transmigrasi dibandingkan animo calon transmigran	a. Jumlah animo calon transmigran tidak sebanding dengan target/ kuota yang diberikan dari Pusat b. Mulai Tahun 2024 terbentuk nomenklatur baru Kementerian Transmigrasi. c. Rendahnya rata-rata tingkat pendidikan calon transmigran d. Adanya penolakan daerah tujuan transmigrasi sebagai daerah tujuan transmigrasi , setelah diterbitkan surat rekomendasi penetapan daerah tujuan transmigrasi dan target calon transmigran oleh Kementerian Transmigrasi

2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ke depan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam mengidentifikasi isu strategis dimaksud juga memperhatikan lingkungan dinamis (isu global, isu nasional dan isu regional) serta implikasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) maupun dan KLHS (Kajian Lingkungan Strategis Lingkungan Hidup) bagi pelayanan daerah. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut dilakukan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.

Berdasarkan telaahan dokumen tersebut, yaitu tema isu pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) maupun KLHS (Kajian Lingkungan Strategis Lingkungan Hidup) yaitu pada Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas dan masih terjadinya kesenjangan ekonomi dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Perumusan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tabel berikut ini pada halaman sebaliknya.

Tabel. 2.10
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Provinsi Jawa Tengah mempunyai potensi besar yaitu sebagai berikut : Industri Manufaktur yaitu terutama sektor padat karya contoh pada -industri alas kaki dan barang dari kulit , Industri tekstil , Jateng menjadi salah satu pusat produksi tekstil utama di Indonesia (menyumbang 2,474 triliun) ; - Industri mesin dan elektronik nilai investasinya mencapai Rp. 2, 776 triliun menunjukkan potensi besar dalam teknologi dan manufaktur. -Industri makanan dan minuman sektor ini menyumbang sekitar 22,3 % dari total produksi manufaktur di pulau Jawa .	Tingkat Pengangguran Terbuka masih tinggi di Provinsi Jawa Tengah	**1. Ancaman Perubahan Iklim dan Transisi Ekonomi** KLHS memetakan bahwa perubahan iklim berdampak pada keberlangsungan sektor-sektor berbasis sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga. Ini berimplikasi langsung pada hilangnya lapangan kerja tradisional dan mendesak transisi menuju green jobs.	**1.Disrupsi teknologi. Dahsyatnya perkembangan teknologi menggantikan pekerjaan (automasi)** Banyak pekerjaan manual, terutama di sektor manufaktur dan administrasi, digantikan oleh AI/robot. Pengaruh isu ini di Jawa Tengah Pekerja industri padat karya di Jawa Tengah (garmen, tekstil, dll) rentan kehilangan pekerjaan jika tak siap bertransformasi memperburuk pengangguran terbuka.	**1.Bonus demografi nasional.** Indonesia akan memiliki proporsi usia produktif lebih tinggi, dibandingkan dengan usia tidak produktif, hal ini memiliki implikasi positif bila pendudukan usaia produktif tersebut bekerja (betul-betul produktif) dan sebaliknya. Jawa Tengah menghadapi tantangan besar untuk menyerap angkatan kerja baru setiap tahun, melalui penciptaan kesempatan kerja.	**1. Peluang kerja di tingkat regional Asean terbuka,** namun dengan persainan yang sangat keras, sehingga poisi Jawa Tengah belum optimal memanfaatkan kesempatan ini, dan bisa terjadi sebaliknya banyaknunya tenga kerja dari negara-negara Asean ini masuk ke Indonesia tak terkecuali Jawa Tengah.	Rendahnya kualitas SDM tenaga kerja dan ketidaksesuaian kompetensi ;
- Industri Logam dan Komponen otomotif : Jawa Tengah memprioritaskan pengembangan industry ini terutama di kawasan industry - Keramik dan furniture kayu :	. ***Mismatch*** antara pendidikan dan industri, Kurikulum pendidikan belum terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja.	**2. Kesenjangan Sosial dan Keterbatasan Akses Ekonomi.** KLHS mengidentifikasi bahwa kesenjangan sosial masih tinggi antarwilayah maupun	**2.Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, ancaman terhadap kenekaragaman hayati, munculnya**	**2. Mismatch antara pendidikan dan industri, Kurikulum pendidikan belum terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja**. Lulusan SMA/SMK	**2. Tingginya tuntutan qualifikasi tenaga kerja di ASEAN Qualifications Reference**	- Terjadinya ***Gap Skill*** (Kesenjangan keterampilan) antara pendidikan dan industry pada pasar kerja .

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Sektor ini juga menjadi focus pengembangan industry di jawa Tengah . - Peralatan Transportasi : Industri peralatan dan mesin memiliki potensi besar untuk bertumbuh, dengan lebih dari 80 persen kontribusi PDB dari sektor peralatan dan mesin berasal dari Jawa Tengah Dengan potensi ini, Jawa Tengah dapat meningkatkan perekonomiannya daerah dan menyerap lebih banyak tenagakerja melalui investasi di sektor padat karya .		antarkelompok masyarakat. Hal ini berdampak pada distribusi akses pekerjaan formal dan produktif. Masih banyak tenaga kerja Jawa Tengah, khususnya di wilayah perdesaan dan pinggiran kota, yang bekerja di sektor informal dan rentan	**semangan green economy dan green jobs,** Industri global beralih ke energi hijau, mengurangi peran sektor energi fosil & raw material tradisional. Jateng masih bergantung pada sektor pertanian dan energi konvensional, pekerja tidak siap masuk ke green economy dan green job, perlu peningkatan komptensi PVPV (Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi) yang berorientasi green job.	di Jateng banyak yang menganggur atau bekerja tidak sesuai keahlian hal ini dapat menyebabkan frustasi inefisiensi ekonomi.	**Framework (AQRF)**. Jawa Tengah memiliki banyak SMK dan LPK, namun sertifikasi dan akreditasi lembaganya belum kompatibel dengan standar ASEAN**,** sehingga pekerja Jateng sulit bersaing di pasar kerja regional (MEA). Ini juga memperparah **mismatch lulusan** dengan kebutuhan industri lokal	
Potensi komoditas unggulan di Jawa Tengah yaitu kontribusi dari 10 komoditas unggulan di Jawa Tengah yang mendukung Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional yaitu : a.Padi ; b.Jagung, c.Kedelai, d.ubi jalar , e.Ubi Kayu, f.Sorghum , g.Susu, h.daging,	Rendahnya Kualitas SDM dan Ketidaksesuaian Kompetensi serta rendahnya kualitas pendidikan vokasi dan keterampilan kerja menjadi penghambat utama daya saing tenaga kerja.	**3. Rendahnya Kualitas SDM dan Ketidaksesuaian Kompetensi**. Rendahnya kualitas pendidikan vokasi dan keterampilan kerja menjadi penghambat utama daya saing tenaga kerja. KLHS menekankan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat tergantung pada perbaikan mutu SDM dan konektivitas dengan kebutuhan sektor riil.	**3. Global talent war (Persaingan tenaga kerja Global)** Persaingan global membuat SDM unggul direkrut lintas negara SDM terbaik di Jawa Tengah bisa pindah ke luar negeri (brain drain), sementara SDM lokal menengah kebawah tetap tertinggal, terjadinya ketimpangan dan job	3. **Digitalisasi belum merata.** Pekerjaan digital tumbuh pesat, tapi infrastruktur belum menjangkau semua daerah Wilayah pedesaan terutama yang lebih besar mengalami ketertinggalan akses pelatihan digital, hal ini memperkuat kesenjangan ketenagakerjaan antar wilayah dalam provinsi.	Skill Gap dan disparitas pendapatan akibat adanya lapangan kerja baru, dampak dari digitalisasi pada pasar kerja atau adanya pekerjaan /lapangan kerja baru tumbuh dan kualitas SDM tidak terstandar , meskipun tersedia	Rendahnya kualitas pendidikan vokasi dan keterampilan kerja menjadi penghambat utama daya saing tenaga kerja.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
i.Ikan lele, j.Nila Salin menjadi potensi untuk diarahkan pada hilirisasi sektor pertanian 1. jagung			mismatch lokal.		lapangan kerja	
			4. Pasar kerja digital dan pola gig economy (pekerjaan jangka pendek kontrak-kontrak sementara) Dunia semakin bergeser ke pekerjaan fleksibel berbasis platform digital. Infrastruktur dan literasi digital di Jawa Tengah masih belum merata, masyarakat desa dan pekerja informal kesulitan beradaptasi hal ini menyebabkan terjadinya stagnasi produktivitas.	**Tujuan 8 TPB/SDGs : Pekerjaan Layak dan pertumbuhan Ekonomi** sebagai berikut : Target 8.1 mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestic bruto per tahun di negara kurang berkembang		
	Penyerapan tenaga kerja masih rendah dan pengangguran usia muda (15 sd 29 tahun) masih tinggi di Provinsi Jawa Tengah masih tinggi		G.20 di Indonesia ; Penciptaan lapangan kerja Berkelanjutan menuju perubahan Dunia Kerja	Target 8.2 : tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi , termasuk melalui focus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan	Tingginya turn over di Jawa Tengah pada sektor pekerjaan industri padat karya dan Skill Missmatch	Belum optimalnya pelatihan vokasi yang berbasis industry , dan berbasis kompetensi serta sertifikasinya .

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
				padat karya		
			Pasar tenaga kerja Inklusif dan pekerjaan afirmatif untuk penyandang disabilitas			Belum optimal penciptaan kesempatan dan Sistem Informasi Pasar Kerja yang inklusif untuk penyandang disabilitas ;
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan (61,82 persen) dan penyandang disabilitas (20,28 persen) masih rendah di Jawa Tengah .	Minimnya akses terhadap pekerjaan	Pengembangan Kapasitas Manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan	8.5 PadaTahun 2030, mencapai pekerjaaan tetap dan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, bagi semua perempuan dan laki – laki , termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya .	Upah rata – rata pekerja laki laki per bulan dan Upah rata – rata pekerja perempuan per bulan belum setara	Belum terjaminnya keberlanjutan pekerjaan
		Kualitas dan mutu sumber daya manusia yang rendah menyebabkan tingginya angka kemiskinan	G.20 India 2023 Mengatasi Kesenjangan keterampilan Global	8.5.1 Upah rata – rata per jam pekerja Target 2024 Rp 13.300 – Rp 13.600 dan Realisasi 2024 : Rp. 14.760		Rendahnya kualitas tenaga kerja
	Produktivitas dan daya saing tenaga kerja masih rendah .	Minimnya akses terhadap pelatihan untuk mengembangkan kualitas SDM atau mengembangkan kegiatan perekonomian	G.20 Indonesia 2022 Pengembangan Kapasitas Manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan	8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan umur : Target 2024 5,44-494 % Realisasi 2024 : 4,78 %	Banyak tenaga kerja di Jateng yang bekerja di sektor informal /UMKM yang berakibat pada tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah.	Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Rendahnya cakupan perlindungan jaminan sosial dan pekerja pada sektor informal	Kualitas dan mutu sumber daya manusia yang rendah menyebabkan tingginya angka kemiskinan	G20 India 2023 Pelindungan Tenaga akerja Adaptif di Dunia Kerja yang berubah	8.5.2 Tingkat setengah pengangguran ; Target 2024 : 5,06 % Realisasi 2024 : 7,48 %		Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja
	Penegakan Norma Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja belum optimal.	Kualitas dan mutu sumber daya manusia yang rendah menyebabkan tingginya angka kemiskinan	G20 India 2023 Pelindungan Tenaga akerja Adaptif di Dunia Kerja yang berubah	Target 8.6 Pada tahun 2030 secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan		Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja
	Masih tingginya jumlah penduduk Miskin di Jawa Tengah.	Kualitas dan mutu sumberdaya manusia yang rendah menyebabkan tingginya angka kemiskinan	Perang Tarif Konlik antar Negara	8.6.1 Persentase Usia Muda (15 – 24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) ; Target 2024 : 26,25 % Realisasi 17,93 %	Penduduk Usia Kerja di Jateng, masih tinggi yang berpendidikan SMP dan SD kebawah	Kualitas dan mutu SDM masih rendah
	Penegakan Norma Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja belum optimal.	**Rendahnya Kualitas SDM dan Ketidaksesuaian Kompetensi**. Rendahnya kualitas pendidikan vokasi dan keterampilan kerja menjadi penghambat utama daya saing tenaga kerja. KLHS menekankan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat tergantung pada perbaikan mutu SDM dan konektivitas dengan kebutuhan sektor riil.	**Pasar kerja digital dan pola gig economy (pekerjaan jangka pendek kontrak-kontrak sementara**) Dunia semakin bergeser ke pekerjaan fleksibel berbasis platform digital. Infrastruktur dan literasi digital di Jawa Tengah masih belum merata, masyarakat desa dan pekerja informal kesulitan beradaptasi hal ini menyebabkan terjadinya stagnasi	Target 8.7. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak –anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya	Dengan kondisi ketenagakerjaan / pasar kerja yang terus berkembang dampak dari digitalisasi, maka dibutuhkan perlindungan bagi tenaga kerja yang kondusif dan berkeadilan dan sesuai dengan norma – norma ketenagakerjaan yang berkembang maupun lingkungan kerja .	Penegakan Norma kerja dan Perlindungan tenaga kerja belum optimal

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
				8.7.1 (a) Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur ; Indikator persentase anak usia 10-17 yang bekerja Target 2024 ; 2,02 % Realisasi 2,42 %		
	Penegakan Norma Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja belum optimal.		**Pasar kerja digital dan pola gig economy (pekerjaan jangka pendek kontrak-kontrak sementara**) Dunia semakin bergeser ke pekerjaan fleksibel berbasis platform digital. Infrastruktur dan literasi digital di Jawa Tengah masih belum merata, masyarakat desa dan pekerja informal kesulitan beradaptasi hal ini menyebabkan terjadinya stagnasi produktivitas.	Target.8 .8 Melindungi hak – hak Tenaga keeja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja , termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan perempuan dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya 8.8.1 Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma K3 ; Target 2024 : 2.929 perusahaan Realisasi 2024 : 6.748	Dengan kondisi ketenagakerjaan / pasar kerja yang terus berkembang dampak dari digitalisasi, maka dibutuhkan perlindungan bagi tenaga kerja yang kondusif dan berkeadilan dengan norma – norma ketenagakerjaan yang berkembang maupun lingkungan kerja .	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selama 5(lima) tahun ke depan . Adapun rumusan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : " Meningkatkan Penduduk yang bekerja".

Tujuan 2 : " Meningkatkan Kualitas Tata kelola Perangkat Daerah berintegritas dan Dinamis ".

b. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 untuk mencapai Tujuan 1 tersebut diatas adalah :

1. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja.
2. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja
3. Meningkatnya Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Sasaran Jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mencapai Tujuan 2 dimaksud diatas adalah yang berkaitan dengan kesekretariatan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Selengkapnya relasi rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2025 – 2029 akan tersaji pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun	Target Capaian						Kondisi akhir Kinerja
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**Meningkatkan Penduduk Yang Bekerja**		**Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (EPR : Employment to Population Ratio)**	**%**	**70,21**	**69,06**	**69,54**	**70,03**	**70,55**	**71,08**	**71,40**	**71,40**
		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	**9.03**	**9,54**	**10,00**	**10,47**	**11,00**	**11,53**	**12,05**	**12,05**
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	Juta Rp	**55,47**	**56,00**	**56,40**	**56,90**	**57,20**	**57,60**	**58,00**	**58,00**
		Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	%	**73,76**	**74,07**	**74,39**	**74,70**	**75,02**	**75,34**	**75,65**	**75,65**
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	**61,82**	**62,49**	**63,15**	**63,82**	**64,48**	**65,15**	**65,81**	**65,81**

Untuk Tujuan dan Sasaran serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun	Target Capaian						Kondisi akhir Kinerja
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	**Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis**		**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Indeks**	**79,19**	**79,50**	**79,80**	**80,00**	**80,30**	**80,60**	**81,00**	**81,00**
		Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Resiko Indeks (MRI) perangkat daerah	Indeks	**2,955**	**3,00**	**3,01**	**3,02**	**3,03**	**3,04**	**3,05**	**3,05**
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indek Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	**87,50**	**87,55**	**87,60**	**87,65**	**87,70**	**87,75**	**87,80**	**87,80**

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan strategi yang telah disusun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah menjabarkan dari tujuan dan sasaran Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai dan dijabarkan pula dalam bentuk program-program, kegiatan-kegiatan, sub kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah atau kewenangan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yang disinkronisasikan dengan nomenklatur klasifikasi kodefikasi dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan yang terakhir Kepmendagri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 yaitu tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah.

Arah kebijakan Disnakertans Provinsi Jawa Tengah mengarahkan kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Perangkat daerah atau Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. Arah Kebijakan tersebut membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Arah Kebijakan tersebut untuk mengarahkan pemilihan program, kegiatan, sub kegiatan yang sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Arah kebijakan tersebut juga terintegrasi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diarahkan pada : 1)Peningkatan akses dan kapasitas perempuan di pasar kerja, memperluas penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas yang responsife gender, memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya termasuk penyediaan informasi pasar kerja yang ramah gender dan inklusif di bidang ketenagakerjaan yaitu adanya Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, serta mendorong kewirausahaan perempuan melalui pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan; 2) Penguatan Data dan Analisis Gender di Bidang Ketenagakerjaan dengan mengembangkan data ketenagakerjaan terpilah menurut jenis kelamin, umur dan disabilitas dan analisis gender digunakan sebagai dasar merumuskan program dan kegiatan; 3) Perlindungan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan yaitu memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan agar perusahaan mematuhi aturan terkait perlindungan pekerja perempuan, termasuk hak maternitas, jam kerja, dan upah setara. Mengintegrasikan perpektif gender dalam pemeriksaan dan mediasi hubungan industrial; 4) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Tempat Kerja yaitu Melaksanakan sosialisasi dan edukasi pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender di perusahaan; Menyusun pedoman atau SOP mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses;

Memperkuat koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, aparat penegak hukum, dan lembaga layanan untuk mendukung korban; 5) Kolaborasi dan kemitraan yaitu diantaranya : Mengajak asosiasi pengusaha, serikat pekerja, dan LSM untuk terlibat dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah gender , Mendorong dunia usaha menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan dan diskriminasi di tempat kerja.

Perumusan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun harus memperhatikan pohon kinerja dan *cascading* Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, dan selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : **Meningkatkan Penduduk Yang Bekerja**	Sasaran 1.1 :	Strategi 1.1.1	Arah Kebijakan 1.1.1.1
	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Penguatan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan pelatihan Vokasi untuk sektor tumbuh tinggi , sertifikasi tenaga kerja untuk sektor dengan kebutuhan kompetensi spesifik (contoh : akuntansi, pemasaran digital, pelayanan publik , operator manufaktur dan sebagainya) , link and Match dengan sektor jasa dan industri modern.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan keterampilan pada masyarakat pencari kerja untuk menghasilkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing .
		Strategi 1.1.2	Arah Kebijakan 1.1.2.1
		Penguatan kelembagaan pelatihan dan sumber daya pelatihan di Balai Latihan kerja (BLK) Pemerintah dan Lembaga Pelatihan kerja Swasta (LPKS)	Meningkatkan penguatan kelembagaan pelatihan dan sumber daya pelatihan di Balai Latihan kerja (BLK) Pemerintah dan LPKS , untuk menghasilkan Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi dan mampu menghasilkan luaran atau tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing
	Sasaran 1.2	Strategi 1.2.1	Arah Kebijakan 1.2.1.1
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Penguatan kapasitas tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan dan adaptasi teknologi serta manajemen usaha mikro guna mendorong produktivitas daya saing serta efisiensi kerja	Melakukan pelatihan peningkatan efisiensi kerja, manajemen usaha mikro , dan adaptasi teknologi sederhana untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Strategi 1.2.2	Arah Kebijakan 1.2.2.2
		Mengoptimalkan potensi unggulan melalui pelatihan berbasis kebutuhan lokal, kolaborasi dengan dunia usahan untuk meningkatkan keterampilan, daya saing dan produktivitas masyarakat di sektor informal dan usaha mikro kecil dan menengah	Meningkatkan penguatan ekosistem kerja produktif di sektor informal dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) dan mendorong kolaborasi dunia usaha untuk peningkatan produktivitas berbasis pelatihan berkelanjutan.
		Strategi 1.2.3	Arah Kebijakan 1.2.2.3
		Pengelolaan iklim kerja yang kondusif , perlindungan jaminan sosial dan penguatan kelembagaan Hubungan Industrial , mendorong perusahaan dalam kepesertaan jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan bagi tenaga kerja .	Meningkatkan dan menjaga pengelolaan iklim kerja yang kondusif, untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja dan meningkatkan kondisi kerja dan produktivitas tenaga kerja serta kesejahteraan mereka.
		Strategi 1.2.4	Arah Kebijakan 1.2.2.4
		Peningkatan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan dan norma Keselamatan dan kesehataan Kerja (Norma K3) serta penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga perusahaan dapat terjaga ketenangan dalam berusaha , yang berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja .	Meningkatkan koordinasi , pengawasan dan pemeriksaan serta pembinaan ketenagakerjaan melalui penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan secara berkesinambungan yang diprioritaskan pada perusahaan yang memiliki penyerapan tenaga kerja besar dan memiliki risiko keselamatan tenaga kerja menengah dan besar .
	Sasaran 1.3 :	Strategi 1.3.1	Arah Kebijakan 1.3.1.1
	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Pembinaan dan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) atau RTK Makro bagi Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota/Provinsi dan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro di perusahaan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Melakukan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) atau RTK Makro di Provinsi Jawa Tengah dan pembinaan serta pendampingan dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) / RTK Makro dan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro di perusahaan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Strategi 1.3.2	Arah Kebijakan 1.3.1.2
		Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri serta perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan kelompok rentan (Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna, Penyandang Disabilitas), penguatan system informasi pasar kerja, dan fasilitasi penciptaan lapangan kerja pada sektor formal maupun non formal .	Melakukan kualitas dan daya saing tenaga kerja agar terserap di pasar kerja dalam dan luar negeri dengan meningkatkan akses dan layanan bursa kerja online (Ayo Kerjo) dan Offline (Job Fair) serta Bursa Kerja Khusus (BKK), penguatan perlindungan dan pendampingan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum, selama dan purna penempatan. Memperluas kesempatan kerja di sektor formal dengan fasilitasi penciptaan lapangan kerja pada sektor potensial (manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif, jasa), dan di sektor informal dengan peningkatan progam wirausaha baru, tenaga kerja mandiri khususnya pada sektor perdagangan, kuliner, pariwisata. Memberdayakan kelompok rentan seperti PMI Purna agar terserap kembali ke pasar kerja, pelatihan dan program kerja layak bagi lansia produktif, peningkatan akses kerja bagi penyandang disabilitas melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD), penguatan kerjasama multi pihak dengan sektor swasta, pengusaha, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), Akademisi dan SMK.
		Strategi 1.3.3	Arah Kebijakan 1.3.1.3
		Peningkatan koordinasi dan integrasi kerjasama pelaksanaan transmigrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kab/Kota daerah tujuan transmigrasi , dalam pelatihan dan penempatan calon transmigran.	Melakukan sosialisasi, recruitment, pelatihan kepada calon transmigran , dan fasilitasi penempatan calon transmigrankedaerah tujuan transmigrasi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2 : **Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis**	Sasaran 2.1 :	Strategi 2.1.1	Arah Kebijakan 2.1.1.1
	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah	Peningkatan kualitas penilaian mandiri terhadap pengelolaan resiko melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berbasis resiko di Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah	Melakukan Peningkatan kualitas penilaian mandiri terhadap pengelolaan resiko melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berbasis resiko di Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi dengan Rencana Strategis Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
	Sasaran 2.2 :	Strategi 2.2.1	Arah Kebijakan 1.2.1.1
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik , berupa pelayanan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Perangkat Daerah melalui survei kepuasan masyarakat secara mandiri (9 unsur) dan atau menyediakan berbagai pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berbasis elektronik / digital .	Meningkatkan kualitas pelayanan publik , berupa pelayanan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Perangkat Daerah melalui survei kepuasan masyarakat secara mandiri (9 unsur) dan atau menyediakan berbagai pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berbasis elektronik / digital .

Tabel 3.2.1

Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Pemetaan Kebutuhan tenaga kerja laki -laki dan perempuan termasuk inklusif /kelompok rentan, penguatan kelembagaan dan pengembangan system informasi pasar tenaga Kerja sebagai dasar perencanaan .	Peningkatan Pelatihan berbasis kompetensi , sertifikasi tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan akses layanan penempatan tenaga kerja dan penguatan perlindungan tenaga kerja.	Pengembangan program pelatihan berbasis keutuhan local dan sector unggulan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja baru.	Integrasi Pendidikan Vokasi dengan dunia industry dan dunia usaha , peningkatan adaptasi teknologi dan literasi digital tenaga kerja,penguatan iklim kerja yang kondusif .	Peningkatan jumlah tenaga kerja yang kompeten dan produktif , perluasan penempatan tenaga kerja berkelanjutan, serta penguatan perlindungan tenaga kerja termasuk kelompok rentan,

Pentahapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang berisi prioritas pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah mendasarkan pada strategi dana rah kebijakan yang dirumuskan sebelumnya. Sebagaimana tabel 3.2.1 tersebut diatas, Pentahapan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu tahapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka terwujudnya SDM berdaya saing dan berkarakter untuk sektor ketenagakerjaan sebagai berikut :

Tahap I Tahun 2026 :

Pemetaan Kebutuhan tenaga kerja laki -laki dan perempuan termasuk inklusif /kelompok rentan, penguatan kelembagaan dan pengembangan system informasi pasar tenaga Kerja sebagai dasar perencanaan pada umumnya dan khususnya pada Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Tahap II Tahun 2027 :

Peningkatan Pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan akses layanan penempatan tenaga kerja dan penguatan perlindungan tenaga kerja.

Tahap III Tahap 2028 :

Pengembangan program pelatihan berbasis keutuhan local dan sector unggulan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja baru.

Tahap IV Tahap 2029 :
Integrasi Pendidikan Vokasi dengan dunia industry dan dunia usaha , peningkatan adaptasi teknologi dan literasi digital tenaga kerja,penguatan iklim kerja yang kondusif .
Tahap V Tahap 2030 :
Peningkatan jumlah tenaga kerja yang kompeten dan produktif , perluasan penempatan tenaga kerja berkelanjutan, serta penguatan perlindungan tenaga kerja termasuk kelompok rentan.

Penahapan dan fokus tema Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar dalam pentahapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dan fokus tema Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tahap I Tahun 2026	: Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional
Tahap II Tahun 2027	: Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan Ekonomi
Tahap III Tahap 2028	: Peningkatan dan pemeratan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau
Tahap IV Tahap 2029	: Menumbuhkan Daya saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan
Tahap V Tahap 2030	: Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan

3.3 Manajemen Resiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai identifikasi, analisis dan evaluasi risiko dan termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen resiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	Pencari kerja belum dapat ditempatkan karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja (tidak mempunyai ijazah SD atau penyetaraan)	12	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar kerja yang inklusif	Pencari kerja yang belum ditempatkan menambah jumlah pengangguran	Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan, Pembekalan, dan Pengembangan Aplikasi Ayo Kerjo	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan	Melakukan pembinaan dan pendampingan pada pegwai di Kab/Kota/Prov dalam menyusun Dokumen RTKD/RTK Makro dan RTK Mikro di perusahaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-			

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					masing			
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang	Melakukan Reviu terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing			

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang	Melakukan Evaluasi dan Monitoring terkait penyusunan RTK Makro / RTK Mikro pada Dinas di Kab/Kota/Prov dan perusahaan di Jateng	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing			
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan	Melakukan Bimtek penyusunan RTKD/RTK Makro dan RTK Mikro di perusahaan bagi Pegawai Kab/Kota/Provinsi dan perusahaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				- Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing			

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	Memaksimalkan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan, Berkolaborasi dengan stake holder pengusaha, pekerja serikat pekerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	Sosialisasi, pelatihan/bimtek peningkatan produktivitas, pengukuran produktivitas baik untuk pencari kerja, tenaga kerja di perusahaan dan wirausaha baru di masyarakat serta pengusaha / pengelola perusahaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	Perusahaan membuat SOP tentang bidang pekerjaan untuk tenaga kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	12	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/ merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb."	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan /belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri"	Intensifikasi dalam peningkatan kapasitas pegawai terkait etos kerja dan budaya kerja supaya berintegritas yang tinggi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	12	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/ merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb."	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan /belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri"	Sosialisasi Rekrutmen magang ke Jepang tidak dikenakan biaya	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	12	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. -Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian	- Pengelolaan aset diberikan kepada Pihak lain sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku Menyusun aturan/kebijakan serta Berita Acara dalam pengelolaan aset berkolaborasi dengan BPKAD Prov. Jateng, Biro APBJ Setda Prov. Jateng, Biro Hukum Setda Prov. Jateng sesuai dengan prosedur yang berlaku	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	12	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. -Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian	Menegur yang bersangkutan di kegiatan tersebut untuk mengajukan nota dinas sebelum menggunakan aset	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terdapat indikasi adanya pengancaman/intimidasi yang dilakukan pemeriksa dari Inspektorat sebagai peminat barang terhadap pengurus barang terkait dengan proses lelang/penjualan aset	12	Seseorang sebagai peminat lelang/penjualan aset mempunyai keinginan untuk memenangkan lelang tersebut tanpa prosedur yang benar	Proses lelang/penjualan aset tanpa prosedur sehingga tidak sesuai dengan aturan dan Pengurus barang menjadi ketakutan karena diintimidasi sehingga mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas kerja	Melaporkan secara lisan kepada Inspektorat Prov. Jateng	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunanan dengan Data dan infromasi seadanya /kurang optimal	12	-Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi , menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat . - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi opersional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan dserta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans)	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik , sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya , kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik - Kemnaker)	Mengkoordinasikan dengan Pusat Data dan Informasi ketenagakerjaan dan BPS , Bappeda serta Diskomfo Jateng terkait data dan informasi ketenagakerjaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 Bulan

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunanan dengan Data dan infromasi seadanya /kurang optimal	12	-Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi , menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat . - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi opersional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan dserta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans)	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik , sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya , kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik - Kemnaker)	Menyusun SK Satu Data ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah yang harus ditanda tangani oleh Gubernur (Tahun 2025 sampai saat ini belum ditanda tangani Gub) yang anggotanya dari Bidang dan UPTD Disnakertrans serta SDM Kab/Kota Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 Bulan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4. 1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Pada rencana strategis tahun 2025 – 2029 ini disusun rencana program dan kegiatan,sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Renstra Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah mendasarkan hasil pohon kerja dan cascading yang telah disusun. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang akan dilaksanakan mencakup program pokok :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ;

Untuk mendukung program pokok tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar akan dilaksanakan program penunjang yaitu :

Alur tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran, Strategi, Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 selengkapnya tersaji pada Tabel sebagaimana tersaji pada halaman sebalik berikut :

Tabel 4.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan Penduduk Yang Bekerja *												14.633.510.000		14.887.713.000		15.190.475.000		19.051.987.000		35.247.316.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (EPR) *	%	70,21	69,06	69,54		70,03		70,55		71,08		71,4		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja **											2.038.494.000		2.104.393.000		2.156.734.000		2.333.149.000		2.555.472.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja **	%	73,76	74,07	74,39	1.791.754.000	74,7	1.857.653.000	75,02	1.909.994.000	75,34	2.076.539.000	75,65	2.273.199.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA ***									1.645.081.000		1.710.571.000		1.762.502.000		1.884.347.000		2.061.787.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Transmigrasi	
						Meningkatnya penciptaan lapangan kerja di sektor formal	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal ***	%	40,36	42	44,05	876.290.000	46,1	929.360.000	48,15	967.862.000	50,2	1.050.878.000	52,25	1.155.969.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04.1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****								508.215.000		509.995.000		547.028.000		568.911.000		625.804.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi perantaraan kerja ****	%	60	75	75	508.215.000	75	509.995.000	75	547.028.000	75	568.911.000	75	625.804.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Kab/Kota																
		2.07.04.1.01.0001			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja *****							89.426.000		89.739.000		90.054.000		93.657.000		103.023.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja (PengAntar Kerja dan Petugas Antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya *****	Orang	100	120	50	89.426.000	50	89.739.000	50	90.054.000	50	93.657.000	50	103.023.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.04.1.01.0002			Pelayanan Antar Kerja *****							372.144.000		373.447.000		410.000.000		426.400.000		469.040.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Transmigrasi	
						Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD *****	Orang	1000	1150	1500	372.144.000	1650	373.447.000	1815	410.000.000	1997	426.400.000	2196	469.040.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja *****							18.724.000		18.790.000		18.856.000		19.611.000		21.573.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan	Orang	100	350	100	18.724.000	100	18.790.000	100	18.856.000	100	19.611.000	100	21.573.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penemp

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Pencari Kerja	Jabatan *****															atan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.04.1.01.0004			Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) *****							27.921.000		28.019.000		28.118.000		29.243.000		32.168.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL *****	Orang	50	50	50	27.921.000	55	28.019.000	61	28.118.000	67	29.243.000	73	32.168.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Lokal)																
		2.07.04.1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ****								4.955.000		4.973.000		4.991.000		5.191.000		5.711.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya ijin LPTKS yang diterbitkan	Persentase ijin LPTKS yang diterbitkan ****	%	N/A	60	60	4.955.000	60	4.973.000	60	4.991.000	60	5.191.000	60	5.711.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.07.04.1.02.0001			Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi *****	Lembaga	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.04.1.02.0002			Pengawasan dan Pengendalian LPTKS *****							4.955.000		4.973.000		4.991.000		5.191.000		3.711.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan	Lembaga	N/A	N/A	2	4.955.000	2	4.973.000	2	4.991.000	2	5.191.000	2	3.711.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penemp

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Aturan yang Berlaku *****														Kesempatan Kerja	atan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.04.1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja ****								350.080.000		401.306.000		402.711.000		463.118.000		509.430.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar	Presentase pelaporan Informasi Pasar Kerja Kabupaten/ Kota yang meliputi data pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja ****	%	19,37	83,33	83,33	350.080.000	95,24	401.306.000	95,24	402.711.000	95,24	463.118.000	95,24	509.430.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Kerja Antar Negara (AKAN)																
		2.07.04.1.03.0002			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) *****	Orang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1000	2.000.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.04.1.03.0003			Job Fair/Bursa Kerja *****							350.080.000		401.306.000		402.711.000		463.118.000		507.430.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja *****	Orang	N/A	N/A	200	350.080.000	200	401.306.000	200	402.711.000	220	463.118.000	220	507.430.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.04.1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1								13.040.000		13.086.000		13.132.000		13.658.000		15.024.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				(satu) Daerah Provinsi ****																		
						Meningkatnya pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan penggguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing) ****	%	100	100	100	13.040.000	100	13.086.000	100	13.132.000	100	13.658.000	100	15.024.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.04.1.05.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							13.040.000		13.086.000		13.132.000		13.658.000		15.024.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pendataan TKA	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA *****	Orang	15	N/A	15	13.040.000	15	13.086.000	15	13.132.000	15	13.658.000	15	15.024.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Meningkatnya tenaga kerja baru di sektor informal	Persentase penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal ***	%	68,1	68,3	68,5	596.003.000	68,77	598.091.000	69,03	600.187.000	69,39	624.197.000	70,01	686.618.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					an Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04.1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****								426.603.000		428.097.000		429.596.000		446.780.000		491.458.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .	Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . ****	%	51,85	47,5	47,68	426.603.000	48	428.097.000	48,1	429.596.000	48,3	446.780.000	48,5	491.458.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.07.04.1.01.0005			Perluasan Kesempatan Kerja *****							426.603.000		428.097.000		429.596.000		446.780.000		491.458.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					an Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja *****	Orang	230	230	200	426.603.000	200	428.097.000	200	429.596.000	220	446.780.000	220	491.458.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.04.1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi ****								169.400.000		169.994.000		170.591.000		177.417.000		195.160.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya Calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI Purna diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI Purna diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal ****	%	75	50	51,25	144.801.000	51,25	145.308.000	52	145.818.000	53	151.652.000	53,33	166.818.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.07.04.1.04.0001			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) *****							28.277.000		28.376.000		28.476.000		29.616.000		32.578.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya *****	Orang	65	60	50	28.277.000	50	28.376.000	50	28.476.000	50	29.616.000	50	32.578.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.04.1.04.0004			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan *****							116.524.000		116.932.000		117.342.000		122.036.000		134.240.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan *****	Orang	80	80	60	116.524.000	60	116.932.000	60	117.342.000	60	122.036.000	60	134.240.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Transmigrasi
						Meningkatnya calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan ****	%	2,83	1,51	1,68	24.599.000	1,75	24.686.000	1,83	24.773.000	1,91	25.765.000	2	28.342.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.07.04.1.04.0002			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik *****							20.079.000		20.150.000		20.221.000		21.030.000		23.133.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Kegiatan yang dilakukan untuk verifikasi dan pemberian Izin kepada cabang Perusahaan PMI secara Online	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online *****	Perusahaan	N/A	N/A	15	20.079.000	15	20.150.000	15	20.221.000	15	21.030.000	15	23.133.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.04.1.04.0003			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran *****							4.520.000		4.536.000		4.552.000		4.735.000		5.209.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA *****	Orang	9	2	2	4.520.000	2	4.536.000	2	4.552.000	2	4.735.000	2	5.209.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						grasi
						Meningkatnya penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal ***	%	14,24	20	21,75	78.000.000	23,5	88.000.000	25,25	99.000.000	27	110.000.000	28,75	110.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04.1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****								78.000.000		88.000.000		99.000.000		110.000.000		110.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya penyandang disabilitas yang ditempatkan	Persentase penyandang disabilitas yang ditempatkan ****	%	46,67	53,33	58,82	78.000.000	60	88.000.000	65	99.000.000	68,18	110.000.000	70,83	110.000.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.04.1.01.0006			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan *****							78.000.000		88.000.000		99.000.000		110.000.000		110.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD *****	Orang	4520	47250	49300	78.000.000	51350	88.000.000	53400	99.000.000	55450	110.000.000	55450	110.000.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Meningkatnya pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Pesentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi ***	%	61,6	66,89	67,71	94.788.000	68,52	95.120.000	69,34	95.453.000	70,15	99.272.000	70,47	109.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.04.1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja ****								94.788.000		95.120.000		95.453.000		99.272.000		109.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi ****	%	36,91	37,77	38,63	94.788.000	39,5	95.120.000	40,36	95.453.000	41,22	99.272.000	42,07	109.200.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.03.0001			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online *****							94.788.000		95.120.000		95.453.000		99.272.000		109.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online *****	Dokumen	N/A	N/A	1	94.788.000	1	95.120.000	1	95.453.000	1	99.272.000	1	109.200.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI ***									116.673.000		117.082.000		117.492.000		122.192.000		134.412.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	Persentase penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi ***	%	4,44	1,04	2,06	116.673.000	5,11	117.082.000	7,14	117.492.000	8,08	122.192.000	10,02	134.412.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3.32.03.1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ****								116.673.000		117.082.000		117.492.000		122.192.000		134.412.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi	Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi ****	%	10	10,2	10,31	116.673.000	10,42	117.082.000	10,53	117.492.000	10,64	122.192.000	10,71	134.412.000	Pokja Transmigrasi	
		3.32.03.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah							116.673.000		117.082.000		117.492.000		122.192.000		134.412.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Provinsi *****																	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****	Laporan	5	1	1	116.673.000	1	117.082.000	1	117.492.000	1	122.192.000	1	134.412.000	Pokja Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI ***									30.000.000		30.000.000		30.000.000		70.000.000		77.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya pelatihan transmigrasi terhadap penempatan transmigrasi	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi di Balai Latihan Kerja Pertanian ***	%	4,44	1,2	1,2	30.000.000	1,28	30.000.000	1,37	30.000.000	1,5	70.000.000	1,6	77.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
		3.32.03.1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		70.000.000		77.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Meningkatnya calon transmigran yang diberikan pelatihan	Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan ****	%	N/A	80	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	70.000.000	100	77.000.000	Pokja Pelatihan	
		3.32.03.1.01.0006			Pelatihan Transmigrasi *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		70.000.000		77.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terselenggaranya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan *****	Orang	16	10	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	16	70.000.000	16	77.000.000	Pokja Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan **	%	61,82	62,49	63,15	246.740.000	63,82	246.740.000	64,48	246.740.000	65,15	256.610.000	65,81	282.273.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA ***									246.740.000		246.740.000		246.740.000		256.610.000		282.273.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten/ Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah ***	%	62,85	68,57	85,71	246.740.000	91,42	246.740.000	94,28	246.740.000	97,14	256.610.000	100	282.273.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.02.1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) ****								246.740.000		246.740.000		246.740.000		256.610.000		282.273.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja ****	%	75	80	84	246.740.000	88	246.740.000	92	246.740.000	96	256.610.000	100	282.273.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0001			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro *****							80.850.000		80.850.000		80.850.000		84.084.000		92.493.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro *****	Dokumen	N/A	N/A	1	80.850.000	1	80.850.000	1	80.850.000	1	84.084.000	1	92.493.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.02.1.01.0003			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro *****							77.370.000		77.370.000		77.370.000		80.465.000		88.512.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Kabupaten/ Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro *****	Orang	N/A	N/A	35	77.370.000	35	77.370.000	35	77.370.000	35	80.465.000	35	88.512.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.02.1.01.0004			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro *****							88.520.000		88.520.000		88.520.000		92.061.000		101.268.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/ Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro *****	Orang	N/A	N/A	35	88.520.000	35	88.520.000	35	88.520.000	35	92.061.000	35	101.268.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja **											5.650.562.000		5.442.343.000		5.629.897.000		6.683.810.000		10.349.205.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja **	Juta Rupiah	55,47	56	56,4	5.650.562.000	56,9	5.442.343.000	57,2	5.629.897.000	57,6	6.683.810.000	58	10.349.205.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ***									747.043.000		749.648.000		749.648.000		894.312.000		983.744.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
						Meningkatnya perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas ***	%	62,2	64	68	747.043.000	70	749.648.000	71,85	749.648.000	72,26	894.312.000	73,64	983.744.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		2.07.03.1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah ****								704.040.000		706.645.000		706.645.000		841.309.000		925.440.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas ****	%	21	20,67	21,5	704.040.000	21,95	706.645.000	22,93	706.645.000	23,41	841.309.000	23,81	925.440.000	Pokja Produktivitas	
		2.07.03.1.03.0001			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah *****							704.040.000		706.645.000		706.645.000		841.309.000		925.440.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
						Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas *****	Perusahaan	N/A	330	275	704.040.000	275	706.645.000	275	706.645.000	300	841.309.000	320	925.440.000	Pokja Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.03.1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi ****								43.003.000		43.003.000		43.003.000		53.003.000		58.304.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
						Meningkatnya pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan ****	%	4	2	2	43.003.000	2	43.003.000	2	43.003.000	2	53.003.000	2	58.304.000	Pokja Produktivitas	
		2.07.03.1.04.0001			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja *****							43.003.000		43.003.000		43.003.000		53.003.000		58.304.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
						Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produkti	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing	Dokumen	N/A	N/A	1	43.003.000	1	43.003.000	1	43.003.000	1	53.003.000	1	58.304.000	Pokja Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						vitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja di Tingkat daerah *****															Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ***									1.778.391.000		1.457.285.000		1.634.170.000		2.161.562.000		4.374.726.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Meningkatnya tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan	Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan Produktivitas ***	%	70	72	73	1.778.391.000	74	1.457.285.000	75	1.634.170.000	76	2.161.562.000	76	4.374.726.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ****								1.768.451.000		1.447.345.000		1.624.230.000		2.131.622.000		4.344.786.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					A	
						Meningkatnya peningkatan sarana pelatihan kerja	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja ****	%	N/A	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	70.000.000	100	2.077.000.000	Pokja Pelatihan Produktivitas	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja *****							25.000.000		25.000.000		25.000.000		70.000.000		2.077.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja *****	Unit	N/A	N/A	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	2	70.000.000	50	2.077.000.000	Pokja Pelatihan Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan lembaga pendidikan diberikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas / kewirausahaan	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan lembaga pendidikan diberikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas / kewirausahaan ****	%	71	67,08	72,99	1.605.530.000	73,88	1.284.424.000	74,33	1.461.309.000	75,55	1.923.701.000	76,36	2.116.072.000	Pokja Pelatihan Produktivitas	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi *****							1.605.530.000		1.284.424.000		1.461.309.000		1.923.701.000		2.116.072.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun *****	Orang	1225	839	790	1.605.530.000	630	1.284.424.000	720	1.461.309.000	940	1.923.701.000	1040	2.116.072.000	Pokja Pelatihan Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
						Meningkatnya jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/ kesepakatan dan kerjasama dengan BLK ****	%	18,75	23,53	27,78	137.921.000	31,58	137.921.000	35	137.921.000	38,1	137.921.000	40,91	151.714.000	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkatan Produktivitas	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan							137.921.000		137.921.000		137.921.000		137.921.000		151.714.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja *****																A	
						Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n *****	Lembaga	N/A	1	3	137.921.000	4	137.921.000	4	137.921.000	4	137.921.000	5	151.714.000	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkatan Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		2.07.03.1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah ****								9.940.000		9.940.000		9.940.000		29.940.000		29.940.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					A	
						Meningkatnya pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan ****	%	N/A	8,06	5	9.940.000	5	9.940.000	5	9.940.000	5	29.940.000	5	29.940.000	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkatan Produktivitas	
		2.07.03.1.03.0001			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah *****							9.940.000		9.940.000		9.940.000		29.940.000		29.940.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas *****	Perusahaan	N/A	5	5	9.940.000	5	9.940.000	5	9.940.000	6	29.940.000	6	29.940.000	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkatan Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL ***									1.191.461.000		1.294.973.000		1.298.848.000		1.372.306.000		1.509.540.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
						Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ***	%	38,59	47,56	51,03	173.250.000	53,64	173.858.000	56,38	174.468.000	59,26	181.448.000	62,4	199.593.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.05.1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota ****								173.250.000		173.858.000		174.468.000		181.448.000		199.593.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
						Meningkatnya perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB ****	%	92,34	93,04	93,75	173.250.000	94,46	173.858.000	95,16	174.468.000	95,86	181.448.000	96,57	199.593.000	Pokja Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial	
		2.07.05.1.01.0001			Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial *****							62.931.000		63.152.000		63.374.000		65.909.000		72.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online *****	Perusahaan	105	105	58	62.931.000	60	63.152.000	60	63.374.000	62	65.909.000	65	72.500.000	Pokja Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		2.07.05.1.01.0002			Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial *****							14.158.000		14.208.000		14.258.000		14.829.000		16.312.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
						Terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online *****	Perusahaan	105	105	57	14.158.000	57	14.208.000	57	14.258.000	57	14.829.000	60	16.312.000	Pokja Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jamina

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terdaftar di WLKP Online																n Sosial
		2.07.05.1.01.0003			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja *****								96.161.000		96.498.000		96.836.000		100.710.000		110.781.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
						Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek *****	Laporan	70	140	70	96.161.000	70	96.498.000	70	96.836.000	70	100.710.000	70	110.781.000	Pokja Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Peserta Jamsostek																
						Meningkatnya LKS Bipartit yang terbentuk	Persentase LKS Bipartit yang terbentuk ***	%	49,75	49,77	49,8	496.868.000	51,13	498.608.000	5,59	500.355.000	52,06	520.371.000	52,53	572.409.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
		2.07.05.1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1								496.868.000		498.608.000		500.355.000		520.371.000		572.409.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				(satu) Daerah Provinsi ****																		
						Meningkatnya Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk ****	%	49,72	50,19	50,66	353.175.000	51,13	354.412.000	51,59	355.654.000	52,06	369.881.000	52,53	406.870.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
		2.07.05.1.02.0003			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat							142.133.000		142.631.000		143.131.000		148.857.000		163.743.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi *****																	
						Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi *****	Asosiasi dan Serikat Pekerja	1000	1000	1000	142.133.000	1000	142.631.000	1000	143.131.000	1000	148.857.000	1000	163.743.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		2.07.05.1.02.0004			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi							211.042.000		211.781.000		212.523.000		221.024.000		243.127.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					*****																Industrial dan Jaminan Sosial	
						Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina *****	Lembaga	1	36	36	211.042.000	40	211.781.000	44	212.523.000	48	221.024.000	53	243.127.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
						Meningkatnya perusahaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi	Persentase perusahaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi ****	%	85	85,68	86,85	143.693.000	88,02	144.196.000	89,19	144.701.000	90,37	150.490.000	91,54	165.539.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.05.1.02.0005			Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi *****							143.693.000		144.196.000		144.701.000		150.490.000		165.539.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
						Terlaksananya Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi *****	Perusahaan	75	100	39	143.693.000	39	144.196.000	40	144.701.000	50	150.490.000	60	165.539.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
						Meningkatnya perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah ***	%	8,35	43,13	43,26	332.139.000	43,39	433.303.000	43,52	434.821.000	43,65	462.362.000	43,77	508.600.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.05.1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ****								332.139.000		433.303.000		434.821.000		462.362.000		508.600.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
						Meningkatnya pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota	Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota ****	%	1,76	1,17	1,41	332.139.000	1,64	433.303.000	1,88	434.821.000	2,11	462.362.000	2,34	508.600.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
		2.07.05.1.03.0001			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) *****							221.210.000		221.985.000		222.762.000		223.542.000		245.897.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Sosial	
						Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP *****	Surat Keputusan	1	1	1	221.210.000	1	221.985.000	1	222.762.000	1	223.542.000	1	245.897.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		2.07.05.1.03.0003			Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) *****							45.577.000		45.737.000		45.898.000		47.734.000		52.508.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
						Ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK *****	Surat Keputusan	1	1	1	45.577.000	1	45.737.000	1	45.898.000	1	47.734.000	1	52.508.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Jaminan Sosial
		2.07.05.1.03.0005			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja *****							65.352.000		165.581.000		166.161.000		191.086.000		210.195.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
						Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan *****	Orang	75	100	100	65.352.000	260	165.581.000	271	166.161.000	283	191.086.000	296	210.195.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
						Meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industria	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial ***	%	96,15	96,69	96,75	189.204.000	96,79	189.204.000	96,84	189.204.000	96,88	208.125.000	96,91	228.938.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						1															dan Jaminan Sosial	
		2.07.05.1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi ****								189.204.000		189.204.000		189.204.000		208.125.000		228.938.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
						Meningkatnya Penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja dan penanganan kasus	Persentase Penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja dan penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ****	%	96	96,67	96,77	47.272.000	96,83	47.272.000	96,88	47.272.000	96,92	51.999.000	96,97	57.199.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Pekerja Migran Indonesia (PMI)															ketenagakerjaan	
		2.07.05.1.02.0002			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi *****							47.272.000		47.272.000		47.272.000		51.999.000		57.199.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
						Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusaha	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan *****	Perkara	N/A	N/A	125	47.272.000	138	47.272.000	151	47.272.000	166	51.999.000	183	57.199.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						an yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi															ketenagakerjaan	
						Meningkatnya perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan ****	%	96,15	96,69	96,74	141.932.000	96,77	141.932.000	96,81	141.932.000	96,84	156.126.000	96,88	171.739.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
		2.07.05.1.02.0001			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada							141.932.000		141.932.000		141.932.000		156.126.000		171.739.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi *****																	
						Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah *****	%	N/A	30	196	141.932.000	196	141.932.000	196	141.932.000	197	156.126.000	200	171.739.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN ***									1.469.705.000		1.474.851.000		1.480.015.000		1.596.625.000		1.756.289.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Pengawasan Ketenagakerjaan	
						Menurunnya pelanggaran norma ketenagakerjaan	Persentase kejadian pelanggaran norma ketenagakerjaan ***	%	81,53	80,96	80,8	1.469.705.000	80,67	1.474.851.000	80,53	1.480.015.000	80,27	1.596.625.000	80	1.756.289.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	
		2.07.06.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan ****								1.469.705.000		1.474.851.000		1.480.015.000		1.596.625.000		1.756.289.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	
						Meningkatnya perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja ****	%	29,41	33,56	37,87	355.180.000	43,03	356.424.000	49,91	357.672.000	56,8	375.556.000	63,68	413.112.000	Pokja Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
		2.07.06.1.01.0003			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di							355.180.000		356.424.000		357.672.000		375.556.000		413.112.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Perusahaan *****																Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	
						Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 *****	Perusahaan	90	195	195	355.180.000	195	356.424.000	195	357.672.000	197	375.556.000	200	413.112.000	Pokja Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
						Meningkatnya penanganan kasus ketenagakerjaan	Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan ****	%	55,17	55,2	55,21	268.305.000	55,27	269.245.000	55,34	270.188.000	55,37	283.698.000	55,46	312.068.000	Pokja Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	
		2.07.06.1.01.0002			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan *****							268.305.000		269.245.000		270.188.000		283.698.000		312.068.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	
						Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan *****	Kasus	140	260	92	268.305.000	95	269.245.000	95	270.188.000	95	283.698.000	100	312.068.000	Pokja Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Perusahaan																Pengawasan Ketenagakerjaan
						Meningkatnya perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan ****	%	62,08	62,61	62,92	846.220.000	63,26	849.182.000	63,71	852.155.000	64	937.371.000	64,27	1.031.109.000	Pokja Norma Kerja	
		2.07.06.1.01.0001			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan *****							846.220.000		849.182.000		852.155.000		937.371.000		1.031.109.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	
						Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) *****	Perusahaan	925	1190	1119	846.220.000	1119	849.182.000	1119	852.155.000	1120	937.371.000	1130	1.031.109.000	Pokja Norma Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN ***									463.962.000		465.586.000		467.216.000		659.005.000		1.724.906.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Meningkatnya perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	Persentase perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 ***	%	26,41	26,67	27,06	463.962.000	27,49	465.586.000	27,91	467.216.000	28,32	659.005.000	28,74	1.724.906.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
		2.07.06.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan ****								463.962.000		465.586.000		467.216.000		659.005.000		1.724.906.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya kegiatan penerapan K3 di perusahaan yang dilakukan oleh Balai K2 (semula Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan)	Persentase kegiatan penerapan K3 di perusahaan yang dilakukan oleh Balai K3 (semula Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan) ****	%	60,16	61,67	62,86	463.962.000	63,13	465.586.000	63,41	467.216.000	63,64	659.005.000	63,83	1.724.906.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
		2.07.06.1.01.0003			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan *****							463.962.000		465.586.000		467.216.000		659.005.000		1.724.906.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 *****	Perusahaan	90	60	60	463.962.000	60	465.586.000	60	467.216.000	65	659.005.000	65	1.724.906.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						an Kerja (Balai K3)
	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja **											6.944.454.000		7.340.977.000		7.403.844.000		10.035.028.000		22.342.639.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten **	%	9,03	9,54	10	6.944.454.000	10,47	7.340.977.000	11	7.403.844.000	11,53	10.035.028.000	12,05	22.342.639.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ***									532.851.000		534.717.000		536.591.000		940.251.000		1.034.278.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
						Meningkatnya pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ***	%	8,36	8,39	9,28	424.346.000	9,34	425.832.000	9,66	427.324.000	10	770.057.000	10,67	847.064.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ****								424.346.000		425.832.000		427.324.000		770.057.000		847.064.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
						Meningkatnya penganggur/pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri	Persentase penganggur/pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri ****	%	30,77	27,62	33,33	424.346.000	35,14	425.832.000	37,84	427.324.000	40,54	770.057.000	44,44	847.064.000	Pokja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pemagangan	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi *****							362.486.000		363.755.000		365.029.000		651.532.000		716.686.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun *****	Orang	137	N/A	74	362.486.000	74	363.755.000	74	365.029.000	133	651.532.000	140	716.686.000	Pokja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pemagangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja *****							61.860.000		62.077.000		62.295.000		118.525.000		128.378.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n *****	Lembaga	6	N/A	3	61.860.000	3	62.077.000	3	62.295.000	6	118.525.000	8	128.378.000	Pokja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pemagangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		2.07.03.1.01.0004			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivit							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					as *****																	
						Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n *****	Kesepakatan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	Pokja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pemagangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
						Meningkatnya lembaga pelatihan yang	Persentase lembaga pelatihan yang terakreditas	%	14	14,09	14,29	108.505.000	15,56	108.885.000	16	109.267.000	17,31	170.194.000	17,78	187.214.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						terakreditasi	i ***														Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		2.07.03.1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja ****								108.505.000		108.885.000		109.267.000		170.194.000		187.214.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
						Meningkatnya LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga	Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga ****	%	29,09	30	31,82	108.505.000	36,36	108.885.000	37,5	109.267.000	40	170.194.000	41,67	187.214.000	Pokja Standarisasi dan Sertifikasi	
		2.07.03.1.02.0001			Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja *****							108.505.000		108.885.000		109.267.000		170.194.000		187.214.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktiv	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					itas Tenaga Kerja	
						Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi *****	LPK	20	N/A	15	108.505.000	15	108.885.000	15	109.267.000	25	170.194.000	30	187.214.000	Pokja Standarisasi dan Sertifikasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ***									1.559.283.000		1.942.796.000		2.717.155.000		3.615.306.000		7.451.729.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri di Balai Latihan Kerja	%	70	75,13	83,68	1.559.283.000	83,87	1.942.796.000	84,05	2.717.155.000	84,21	3.615.306.000	84,36	7.451.729.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Industri ***															
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ****								1.559.283.000		1.942.796.000		2.717.155.000		3.615.306.000		7.451.729.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Meningkatnya penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri	Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri ****	%	12,61	49,33	83,68	1.513.621.000	83,87	1.897.134.000	84,05	2.671.493.000	84,21	3.504.644.000	84,36	5.330.000.000	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi							1.513.621.000		1.897.134.000		2.671.493.000		3.504.644.000		5.330.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					*****																	
						Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun *****	Orang	1060	264	264	1.513.621.000	330	1.897.134.000	466	2.671.493.000	610	3.504.644.000	930	5.330.000.000	Pokja Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
						Meningkatnya peningkatan sarana pelatihan kerja	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja ****	%	100	12,5	77,78	25.000.000	70	25.000.000	63,64	25.000.000	58,33	70.000.000	53,85	2.077.000.000	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja *****							25.000.000		25.000.000		25.000.000		70.000.000		2.077.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja *****	Unit	476	N/A	7	25.000.000	8	25.000.000	9	25.000.000	10	70.000.000	50	2.077.000.000	Pokja Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
						Meningkatnya jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/ kesepakatan dan kerjasama dengan BLK ****	%	3	5	9,09	20.662.000	12,5	20.662.000	15,38	20.662.000	17,86	40.662.000	20	44.729.000	Pokja Pemasaran	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga							20.662.000		20.662.000		20.662.000		40.662.000		44.729.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Pelatihan Kerja *****																	
						Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n *****	Lembaga	N/A	N/A	2	20.662.000	2	20.662.000	3	20.662.000	3	40.662.000	4	44.729.000	Pokja Pemasaran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ***									2.667.870.000		1.659.060.000		1.905.103.000		2.511.980.000		7.851.245.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian di Balai Latihan Kerja Pertanian ***	%	9	9,6	10	2.667.870.000	10,67	1.659.060.000	11,2	1.905.103.000	12,27	2.511.980.000	12,67	7.851.245.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ****								2.667.870.000		1.659.060.000		1.905.103.000		2.511.980.000		7.851.245.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Meningkatnya penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian	Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian ****	%	54	54	55,6	2.639.025.000	57,2	1.630.215.000	58,6	1.876.258.000	60,2	2.463.135.000	61,7	5.797.515.000	Pokja Pelatihan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi *****							2.639.025.000		1.630.215.000		1.876.258.000		2.463.135.000		5.797.515.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun *****	Orang	1372	628	650	2.639.025.000	400	1.630.215.000	462	1.876.258.000	600	2.463.135.000	1426	5.797.515.000	Pokja Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
						Meningkatnya peningkatan sarana pelatihan kerja	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja ****	%	100	74,75	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	2.027.500.000	Pokja Pelatihan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja *****							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		2.027.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja *****	Unit	638	75	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	5	25.000.000	50	2.027.500.000	Pokja Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
						Meningkatnya jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/ kesepakatan dan kerjasama dengan BLK ****	%	N/A	80	100	3.845.000	100	3.845.000	100	3.845.000	100	23.845.000	100	26.230.000	Pokja Pemasaran	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja *****							3.845.000		3.845.000		3.845.000		23.845.000		26.230.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n *****	Lembaga	N/A	3	3	3.845.000	3	3.845.000	3	3.845.000	4	23.845.000	4	26.230.000	Pokja Pemasaran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ***									2.184.450.000		3.204.404.000		2.244.995.000		2.967.491.000		6.005.387.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata ***	%	21	22,4	23,38	2.184.450.000	23,7	3.204.404.000	24	2.244.995.000	24,28	2.967.491.000	25,38	6.005.387.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ****								2.184.450.000		3.204.404.000		2.244.995.000		2.967.491.000		6.005.387.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI) diberikan pelatihan	Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI) diberikan pelatihan ****	%	146,32	22,67	23,38	2.154.241.000	23,7	3.141.362.000	24	2.181.953.000	24,28	2.860.539.000	24,28	3.887.739.000	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi *****						2.154.241.000		3.141.362.000		2.181.953.000		2.860.539.000		3.887.739.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun *****	Orang	556	288	290	2.154.241.000	420	3.141.362.000	290	2.181.953.000	390	2.860.539.000	520	3.887.739.000	Pokja Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						kan Klaster Kompetensi																ta Kelas A
						Meningkatnya peningkatan sarana pelatihan kerja	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja ****	%	100	100	100	25.000.000	100	57.833.000	100	57.833.000	100	81.743.000	100	2.089.918.000	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja *****							25.000.000		57.833.000		57.833.000		81.743.000		2.089.918.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja *****	Unit	551	12	3	25.000.000	3	57.833.000	4	57.833.000	5	81.743.000	50	2.089.918.000	Pokja Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/ kesepakatan dan kerjasama dengan BLK ****	%	12,5	40	40	5.209.000	41,67	5.209.000	41,67	5.209.000	42,86	25.209.000	42,86	27.730.000	Pokja Pemasaran	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja *****							5.209.000		5.209.000		5.209.000		25.209.000		27.730.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n *****	Lembaga	N/A	4	4	5.209.000	4	5.209.000	5	5.209.000	5	25.209.000	6	27.730.000	Pokja Pemasaran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi *												91.947.853.000		92.759.464.000		93.533.174.000		94.758.898.000		139.308.405.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi *	Angka	79,19	79,5	79,8		80		80,3		80,6		81		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi **											703.260.000		703.260.000		703.260.000		731.392.000		804.532.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi **	Angka	2,955	3	3,01	703.260.000	3,02	703.260.000	3,03	703.260.000	3,04	731.392.000	3,05	804.532.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									703.260.000		703.260.000		703.260.000		731.392.000		804.532.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ***	%	100	100	100	703.260.000	100	703.260.000	100	703.260.000	100	731.392.000	100	804.532.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****								703.260.000		703.260.000		703.260.000		731.392.000		804.532.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	N/A	N/A	81	703.260.000	82	703.260.000	83	703.260.000	84	731.392.000	85	804.532.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							459.605.000		459.605.000		459.605.000		477.990.000		525.789.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					*****																	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	7	7	7	459.605.000	7	459.605.000	7	459.605.000	7	477.990.000	7	525.789.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							142.655.000		142.655.000		142.655.000		152.402.000		177.743.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	N/A	N/A	5	142.655.000	5	142.655.000	6	142.655.000	6	152.402.000	7	177.743.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****							72.000.000		72.000.000		72.000.000		72.000.000		72.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa	Data	N/A	N/A	17	72.000.000	18	72.000.000	19	72.000.000	20	72.000.000	21	72.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Lingkup Perangkat Daerah *****															
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							29.000.000		29.000.000		29.000.000		29.000.000		29.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	1	29.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi **											91.244.593.000		92.056.204.000		92.829.914.000		94.027.506.000		138.503.873.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	87,5	87,55	87,6	91.244.593.000	87,65	92.056.204.000	87,7	92.829.914.000	87,75	94.027.506.000	87,8	138.503.873.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi **															
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									85.277.641.000		85.736.914.000		86.341.375.000		87.046.107.000		95.327.426.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ***	%	100	100	100	85.277.641.000	100	85.736.914.000	100	86.341.375.000	100	87.046.107.000	100	95.327.426.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								76.257.467.000		76.267.467.000		76.337.467.000		76.373.877.000		77.089.964.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya layanan administrasi	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan	Dokumen	12	12	12	76.257.467.000	12	76.267.467.000	12	76.337.467.000	12	76.373.877.000	12	77.089.964.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						keuangan perangkat daerah	perangkat daerah yang disusun ****															
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							75.347.243.000		75.357.243.000		75.427.243.000		75.427.243.000		76.046.666.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/ Bulan	420	420	420	75.347.243.000	441	75.357.243.000	450	75.427.243.000	460	75.427.243.000	470	76.046.666.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							644.516.000		644.516.000		644.516.000		670.297.000		737.327.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	644.516.000	12	644.516.000	12	644.516.000	12	670.297.000	12	737.327.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD *****							194.266.000		194.266.000		194.266.000		202.037.000		222.241.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	12	12	12	194.266.000	12	194.266.000	12	194.266.000	12	202.037.000	12	222.241.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****							71.442.000		71.442.000		71.442.000		74.300.000		81.730.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	1	1	1	71.442.000	1	71.442.000	1	71.442.000	1	74.300.000	1	81.730.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Realisasi Anggaran *****																	
						Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								50.000.000		50.000.000		50.000.000		52.000.000		63.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	52.000.000	1	63.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Milik Daerah SKPD *****																	
						Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		52.000.000		57.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	11	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	52.000.000	2	57.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						pada SKPD	*****															
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ****								44.220.000		44.220.000		44.220.000		45.989.000		51.588.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah ****	Laporan	1	1	1	44.220.000	1	44.220.000	1	44.220.000	1	45.989.000	1	51.588.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.04.0002			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****							44.220.000		44.220.000		44.220.000		45.989.000		50.588.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	12	1	12	44.220.000	12	44.220.000	12	44.220.000	12	45.989.000	12	50.588.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawai								102.220.000		102.220.000		102.220.000		106.309.000		118.941.000	Dinas Tenaga Kerja dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				an Perangkat Daerah ****																	Transmigrasi	
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	102.220.000	100	102.220.000	100	102.220.000	100	106.309.000	100	118.941.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						an Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian *****														WAIAN	grasi
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****							36.300.000		36.300.000		36.300.000		37.752.000		41.528.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****	Dokumen	1	1	1	36.300.000	1	36.300.000	1	36.300.000	1	37.752.000	1	41.528.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.400.000		11.440.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	10	4	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.400.000	1	11.440.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****							22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.880.000		25.168.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	100	100	20	22.000.000	22	22.000.000	24	22.000.000	26	22.880.000	29	25.168.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****							33.920.000		33.920.000		33.920.000		35.277.000		38.805.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	N/A	50	20	33.920.000	22	33.920.000	24	33.920.000	26	35.277.000	29	38.805.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								2.801.909.000		2.856.909.000		2.917.409.000		3.054.073.000		3.360.483.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	2.801.909.000	100	2.856.909.000	100	2.917.409.000	100	3.054.073.000	100	3.360.483.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		52.000.000		57.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	52.000.000	12	57.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							135.780.000		135.780.000		135.780.000		141.212.000		155.334.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	135.780.000	1	135.780.000	1	135.780.000	1	141.212.000	1	155.334.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							*****															
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		104.000.000		114.400.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	104.000.000	1	114.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							180.000.000		180.000.000		180.000.000		187.200.000		205.920.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	187.200.000	1	205.920.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							73.240.000		73.240.000		73.240.000		76.170.000		83.787.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa	Paket	1	N/A	1	73.240.000	1	73.240.000	1	73.240.000	1	76.170.000	1	83.787.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						daan	n yang Disediakan *****															
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.200.000		5.720.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.200.000	1	5.720.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							41.562.000		41.562.000		41.562.000		43.225.000		47.548.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	12	41.562.000	12	41.562.000	12	41.562.000	12	43.225.000	12	47.548.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi							1.666.327.000		1.666.327.000		1.666.327.000		1.732.981.000		1.906.280.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					SKPD *****																	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	12	1.666.327.000	12	1.666.327.000	12	1.666.327.000	12	1.732.981.000	12	1.906.280.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	3	6	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							550.000.000		605.000.000		665.500.000		712.085.000		783.294.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Dokumen	12	12	12	550.000.000	12	605.000.000	12	665.500.000	12	712.085.000	12	783.294.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Elektronik pada SKPD *****															
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								236.713.000		236.713.000		236.713.000		246.182.000		2.754.801.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	29	30	236.713.000	31	236.713.000	32	236.713.000	33	246.182.000	34	2.754.801.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							0		0		0		0		0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		0		0		300.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar *****							0		0		0		0		100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	171	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							206.713.000		206.713.000		206.713.000		214.982.000		236.481.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	3	15	10	206.713.000	10	206.713.000	10	206.713.000	10	214.982.000	10	236.481.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		31.200.000		34.320.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	31.200.000	1	34.320.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.028.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2.028.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						atau Bangunan Lainnya	Disediakan *****															
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								4.663.510.000		5.012.915.000		5.315.552.000		5.776.370.000		6.354.009.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	40	40	40	4.663.510.000	40	5.012.915.000	40	5.315.552.000	40	5.776.370.000	40	6.354.009.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							13.941.000		21.765.000		21.765.000		22.636.000		24.900.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	12	12	13.941.000	12	21.765.000	12	21.765.000	12	22.636.000	12	24.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							1.183.350.000		1.183.350.000		1.183.350.000		1.230.684.000		1.353.753.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	1.183.350.000	12	1.183.350.000	12	1.183.350.000	12	1.230.684.000	12	1.353.753.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							166.219.000		177.800.000		177.800.000		184.912.000		203.404.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	6	166.219.000	7	177.800.000	7	177.800.000	8	184.912.000	9	203.404.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							3.300.000.000		3.630.000.000		3.932.637.000		4.338.138.000		4.771.952.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					*****																	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	3.300.000.000	12	3.630.000.000	12	3.932.637.000	12	4.338.138.000	12	4.771.952.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.121.602.000		1.166.470.000		1.337.794.000		1.391.307.000		5.534.440.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	70	75	1.121.602.000	80	1.166.470.000	85	1.337.794.000	90	1.391.307.000	95	5.534.440.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							0		0		0		0		0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasiona							368.107.000		382.832.000		440.000.000		457.600.000		503.360.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					l atau Lapangan *****																	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	20	20	368.107.000	20	382.832.000	20	440.000.000	20	457.600.000	20	503.360.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Besar																
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							26.902.000		27.979.000		42.000.000		43.680.000		48.048.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	10	50	20	26.902.000	20	27.979.000	20	42.000.000	20	43.680.000	20	48.048.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							93.463.000		97.202.000		122.600.000		127.504.000		140.255.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	5	25	25	93.463.000	27	97.202.000	30	122.600.000	33	127.504.000	36	140.255.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							85.600.000		89.024.000		85.600.000		89.024.000		97.927.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	3	3	4	85.600.000	5	89.024.000	5	85.600.000	5	89.024.000	5	97.927.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							405.229.000		421.439.000		488.804.000		508.357.000		4.557.193.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	5	5	5	405.229.000	5	421.439.000	5	488.804.000	5	508.357.000	10	4.557.193.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							75.251.000		78.262.000		91.740.000		95.410.000		104.951.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	3	N/A	6	75.251.000	6	78.262.000	6	91.740.000	6	95.410.000	6	104.951.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						atau Bangunan Lainnya																
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							67.050.000		69.732.000		67.050.000		69.732.000		76.706.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	67.050.000	1	69.732.000	1	67.050.000	1	69.732.000	1	76.706.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									1.702.178.000		1.788.720.000		1.815.120.000		1.944.847.000		12.139.337.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			DAERAH PROVINSI ***																		Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri ***	%	100	100	100	1.702.178.000	100	1.788.720.000	100	1.815.120.000	100	1.944.847.000	100	12.139.337.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								54.000.000		54.000.000		54.000.000		56.160.000		61.776.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	12	54.000.000	12	54.000.000	12	54.000.000	12	56.160.000	12	61.776.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							54.000.000		54.000.000		54.000.000		56.160.000		60.776.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	54.000.000	12	54.000.000	12	54.000.000	12	56.160.000	12	60.776.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****															Kelas A
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								195.380.000		195.380.000		195.380.000		203.197.000		227.519.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	195.380.000	100	195.380.000	100	195.380.000	100	203.197.000	100	227.519.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan							27.188.000		27.188.000		27.188.000		28.276.000		31.104.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Kantor *****																Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	27.188.000	1	27.188.000	1	27.188.000	1	28.276.000	1	31.104.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							990.000		990.000		990.000		1.030.000		1.133.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	990.000	1	990.000	1	990.000	1	1.030.000	1	1.133.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							10.273.000		10.273.000		10.273.000		10.684.000		11.753.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	6	1	10.273.000	1	10.273.000	1	10.273.000	1	10.684.000	1	11.753.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							42.281.000		42.281.000		42.281.000		43.973.000		48.371.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	2	1	42.281.000	1	42.281.000	1	42.281.000	1	43.973.000	1	48.371.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Kelas A
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an *****							1.100.000		1.100.000		1.100.000		1.144.000		1.259.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.144.000	1	1.259.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Peraturan Perundang-Undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan *****															grasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							113.548.000		113.548.000		113.548.000		118.090.000		129.899.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	12	113.548.000	12	113.548.000	12	113.548.000	12	118.090.000	12	129.899.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								86.875.000		86.875.000		86.875.000		90.350.000		4.557.385.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	2	2	86.875.000	2	86.875.000	2	86.875.000	2	90.350.000	2	4.557.385.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		0		0		300.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar *****							0		0		0		0		100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Kelas A
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Disediakan *****															grasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		3.998.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	3	3.998.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							86.875.000		86.875.000		86.875.000		90.350.000		99.385.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	3	2	86.875.000	2	86.875.000	2	86.875.000	2	90.350.000	2	99.385.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Lainnya *****																Industri Kelas A	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.131.348.000		1.217.890.000		1.244.290.000		1.351.180.000		1.486.299.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangka	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	N/A	27	27	1.131.348.000	27	1.217.890.000	27	1.244.290.000	27	1.351.180.000	27	1.486.299.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						t daerah																
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.920.000		1.920.000		1.920.000		1.997.000		2.197.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	3	1	3	1.920.000	3	1.920.000	3	1.920.000	3	1.997.000	3	2.197.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							264.000.000		264.000.000		290.400.000		302.016.000		332.218.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	264.000.000	12	264.000.000	12	290.400.000	12	302.016.000	12	332.218.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							865.428.000		951.970.000		951.970.000		1.047.167.000		1.151.884.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	865.428.000	12	951.970.000	12	951.970.000	12	1.047.167.000	12	1.151.884.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan								234.575.000		234.575.000		234.575.000		243.960.000		5.804.358.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Daerah ****																	Kelas A	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	15	15	234.575.000	15	234.575.000	15	234.575.000	15	243.960.000	15	5.804.358.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							44.226.000		44.226.000		44.226.000		45.996.000		50.596.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	Unit	4	1	4	44.226.000	4	44.226.000	4	44.226.000	4	45.996.000	4	50.596.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya *****															Kelas A
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar *****							0		0		0		0		10.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		20.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							69.904.000		69.904.000		69.904.000		72.701.000		79.972.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Kerja Industri Kelas A	
						Terlaksanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	66	3	69.904.000	3	69.904.000	3	69.904.000	3	72.701.000	3	79.972.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							53.750.000		53.750.000		53.750.000		55.900.000		61.490.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Terlaksanya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	5	2	53.750.000	2	53.750.000	2	53.750.000	2	55.900.000	2	61.490.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		5.500.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	10	5.500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Lainnya																Kelas A
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	40	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan							66.695.000		66.695.000		66.695.000		69.363.000		76.300.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Lainnya *****																	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	5	66.695.000	5	66.695.000	5	66.695.000	5	69.363.000	5	76.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.536.513.000		1.625.041.000		1.639.944.000		1.763.976.000		10.937.263.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok ***	%	100	100	100	1.536.513.000	100	1.625.041.000	100	1.639.944.000	100	1.763.976.000	100	10.937.263.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								53.286.000		53.286.000		53.286.000		55.418.000		61.960.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	12	53.286.000	12	53.286.000	12	53.286.000	12	55.418.000	12	61.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas							53.286.000		53.286.000		53.286.000		55.418.000		59.960.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					ASN *****																Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	53.286.000	12	53.286.000	12	53.286.000	12	55.418.000	12	59.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	wulanan/Semesteran SKPD *****																
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								49.865.000		49.865.000		49.865.000		51.860.000		59.049.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	49.865.000	100	49.865.000	100	49.865.000	100	51.860.000	100	59.049.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							3.601.000		3.601.000		3.601.000		3.742.000		4.117.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.601.000	1	3.601.000	1	3.601.000	1	3.742.000	1	4.117.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							5.330.000		5.330.000		5.330.000		5.544.000		6.099.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	5.330.000	1	5.330.000	1	5.330.000	1	5.544.000	1	6.099.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							*****															Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							3.162.000		3.162.000		3.162.000		3.289.000		3.618.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.162.000	1	3.162.000	1	3.162.000	1	3.289.000	1	3.618.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan *****							4.012.000		4.012.000		4.012.000		4.173.000		4.591.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	4.012.000	1	4.012.000	1	4.012.000	1	4.173.000	1	4.591.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan							158.000		158.000		158.000		165.000		182.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Perundang-Undangan *****																Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	1	1	158.000	1	158.000	1	158.000	1	165.000	1	182.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							4.153.000		4.153.000		4.153.000		4.320.000		4.752.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	1	4.153.000	1	4.153.000	1	4.153.000	1	4.320.000	1	4.752.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							29.449.000		29.449.000		29.449.000		30.627.000		33.690.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	12	29.449.000	12	29.449.000	12	29.449.000	12	30.627.000	12	33.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.800.000		4.018.880.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerint	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang	Unit	N/A	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.800.000	1	4.018.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						ah daerah yang memiliki nilai aset	disediakan ****															
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		0		0		300.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar *****							0		0		0		0		100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		3.536.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	3	3.536.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.800.000		22.880.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.800.000	1	22.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.037.390.000		1.125.918.000		1.140.821.000		1.244.885.000		1.366.258.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	36	36	36	1.037.390.000	36	1.125.918.000	36	1.140.821.000	36	1.244.885.000	36	1.366.258.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							3.077.000		3.077.000		3.077.000		3.201.000		3.522.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	12	3.077.000	12	3.077.000	12	3.077.000	12	3.201.000	12	3.522.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							149.030.000		149.030.000		163.933.000		170.491.000		184.423.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	149.030.000	12	149.030.000	12	163.933.000	12	170.491.000	12	184.423.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							885.283.000		973.811.000		973.811.000		1.071.193.000		1.178.313.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	885.283.000	12	973.811.000	12	973.811.000	12	1.071.193.000	12	1.178.313.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								375.972.000		375.972.000		375.972.000		391.013.000		5.430.116.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	N/A	40	375.972.000	45	375.972.000	50	375.972.000	55	391.013.000	60	5.430.116.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							39.751.000		39.751.000		39.751.000		41.342.000		45.477.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	6	3	39.751.000	7	39.751.000	7	39.751.000	8	41.342.000	8	45.477.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							12.810.000		12.810.000		12.810.000		13.323.000		14.656.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	8	1	12.810.000	1	12.810.000	1	12.810.000	1	13.323.000	1	14.656.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							70.000.000		70.000.000		70.000.000		72.800.000		80.080.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	3	72.800.000	3	80.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							230.000.000		230.000.000		230.000.000		239.200.000		5.257.120.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	2	1	2	230.000.000	2	230.000.000	2	230.000.000	3	239.200.000	10	5.257.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****																Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							23.411.000		23.411.000		23.411.000		24.348.000		26.783.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	N/A	1	2	23.411.000	2	23.411.000	2	23.411.000	3	24.348.000	3	26.783.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						a Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****																Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									853.598.000		907.446.000		987.799.000		1.066.411.000		6.173.059.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas ***	%	100	100	100	853.598.000	100	907.446.000	100	987.799.000	100	1.066.411.000	100	6.173.059.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX. 01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								34.800.000		34.800.000		34.800.000		36.192.000		39.812.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	12	34.800.000	12	34.800.000	12	34.800.000	12	36.192.000	12	39.812.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX. 01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							34.800.000		34.800.000		34.800.000		36.192.000		39.812.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	34.800.000	12	34.800.000	12	34.800.000	12	36.192.000	12	39.812.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produkt

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						ivitas Kelas A
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD *****							0		0		0		0		0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Sem	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						esteran SKPD																
		X.XX. 01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX. 01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktiv	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					itas Kelas A	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								33.740.000		33.740.000		33.740.000		35.093.000		41.606.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	33.740.000	100	33.740.000	100	33.740.000	100	35.093.000	100	41.606.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							4.589.000		4.589.000		4.589.000		4.773.000		5.251.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.589.000	1	4.589.000	1	4.589.000	1	4.773.000	1	5.251.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Disediakan *****															Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							3.103.000		3.103.000		3.103.000		3.228.000		3.551.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	12	12	3.103.000	12	3.103.000	12	3.103.000	12	3.228.000	12	3.551.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							3.927.000		3.927.000		3.927.000		4.085.000		4.494.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	1	1	3.927.000	1	3.927.000	1	3.927.000	1	4.085.000	1	4.494.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an *****							1.924.000		1.924.000		1.924.000		2.001.000		2.202.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	12	1	1	1.924.000	1	1.924.000	1	1.924.000	1	2.001.000	1	2.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							1.637.000		1.637.000		1.637.000		1.703.000		1.874.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	1	1	1.637.000	1	1.637.000	1	1.637.000	1	1.703.000	1	1.874.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							18.560.000		18.560.000		18.560.000		19.303.000		21.234.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	12	18.560.000	12	18.560.000	12	18.560.000	12	19.303.000	12	21.234.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		2.362.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	N/A	13	0	14	0	15	0	16	0	17	2.362.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		0		0		300.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	3	2.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	N/A	50	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Disediakan *****															Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								750.640.000		804.488.000		884.841.000		959.330.000		1.055.264.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktiv	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					itas Kelas A	
						Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	36	36	36	750.640.000	36	804.488.000	36	884.841.000	36	959.330.000	36	1.055.264.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							960.000		960.000		960.000		999.000		1.099.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	1	1	960.000	1	960.000	1	960.000	1	999.000	1	1.099.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produkt

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						ivitas Kelas A
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							211.200.000		211.200.000		232.320.000		241.614.000		265.775.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	211.200.000	12	211.200.000	12	232.320.000	12	241.614.000	12	265.775.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							538.480.000		592.328.000		651.561.000		716.717.000		788.390.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	538.480.000	12	592.328.000	12	651.561.000	12	716.717.000	12	788.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								34.418.000		34.418.000		34.418.000		35.796.000		2.672.377.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	N/A	40	34.418.000	45	34.418.000	50	34.418.000	55	35.796.000	60	2.672.377.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							21.835.000		21.835.000		21.835.000		22.709.000		24.980.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	3	3	3	21.835.000	3	21.835.000	4	21.835.000	4	22.709.000	5	24.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					*****																	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produkt

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						ivitas Kelas A
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							10.021.000		10.021.000		10.021.000		10.422.000		11.465.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	11	3	10.021.000	3	10.021.000	3	10.021.000	4	10.422.000	4	11.465.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							2.562.000		2.562.000		2.562.000		2.665.000		2.932.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	7	3	2.562.000	3	2.562.000	3	2.562.000	4	2.665.000	4	2.932.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.623.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	4	2.623.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****															Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									920.130.000		961.990.000		982.280.000		1.059.310.000		3.665.244.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) ***	%	100	100	100	920.130.000	100	961.990.000	100	982.280.000	100	1.059.310.000	100	3.665.244.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								43.060.000		43.060.000		43.060.000		44.783.000		49.262.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	12	43.060.000	12	43.060.000	12	43.060.000	12	44.783.000	12	49.262.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.100.000		42.100.000		42.100.000		43.784.000		48.163.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	N/A	12	12	42.100.000	12	42.100.000	12	42.100.000	12	43.784.000	12	48.163.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan							960.000		960.000		960.000		999.000		1.099.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselama	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					/Semesteran SKPD *****																tan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	12	12	12	960.000	12	960.000	12	960.000	12	999.000	12	1.099.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.720.000		20.592.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehata	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					n Kerja (Balai K3)	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.720.000	1	20.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.720.000		20.592.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.720.000	1	20.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								61.254.000		61.254.000		61.254.000		63.706.000		73.078.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	61.254.000	100	61.254.000	100	61.254.000	100	63.706.000	100	73.078.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							8.350.000		8.350.000		8.350.000		8.684.000		9.553.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	1	1	8.350.000	1	8.350.000	1	8.350.000	1	8.684.000	1	9.553.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							3.266.000		3.266.000		3.266.000		3.397.000		3.737.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	1	1	3.266.000	1	3.266.000	1	3.266.000	1	3.397.000	1	3.737.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.400.000		11.440.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.400.000	1	11.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							6.246.000		6.246.000		6.246.000		6.496.000		7.146.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	6.246.000	1	6.246.000	1	6.246.000	1	6.496.000	1	7.146.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an *****							2.585.000		2.585.000		2.585.000		2.689.000		2.958.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	2.585.000	1	2.585.000	1	2.585.000	1	2.689.000	1	2.958.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Peraturan Perundang-Undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan *****															grasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							30.807.000		30.807.000		30.807.000		32.040.000		35.244.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselama	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					tan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	12	30.807.000	12	30.807.000	12	30.807.000	12	32.040.000	12	35.244.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		2.386.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	N/A	18	0	19	0	20	0	21	0	22	2.386.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						memiliki nilai aset																
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		0		0		300.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar *****							0		0		0		0		100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	6	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		1.924.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	N/A	7	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	5	1.924.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Lainnya	yang Disediakan *****															grasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	4	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselama	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					tan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						an Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								629.362.000		671.222.000		691.512.000		746.801.000		821.482.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	36	36	36	629.362.000	36	671.222.000	36	691.512.000	36	746.801.000	36	821.482.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							7.862.000		7.862.000		7.862.000		8.177.000		8.995.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	12	7.862.000	12	7.862.000	12	7.862.000	12	8.177.000	12	8.995.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							202.900.000		202.900.000		223.190.000		232.118.000		255.330.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	Laporan	12	12	12	202.900.000	12	202.900.000	12	223.190.000	12	232.118.000	12	255.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Daya Air dan Listrik	, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****															grasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							418.600.000		460.460.000		460.460.000		506.506.000		557.157.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	12	418.600.000	12	460.460.000	12	460.460.000	12	506.506.000	12	557.157.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								168.454.000		168.454.000		168.454.000		185.300.000		314.830.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselama	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Pemerintahan Daerah ****																	tan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	N/A	50	168.454.000	55	168.454.000	60	168.454.000	65	185.300.000	70	314.830.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							96.654.000		96.654.000		96.654.000		106.320.000		116.952.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	Unit	3	N/A	N/A	96.654.000	N/A	96.654.000	N/A	96.654.000	N/A	106.320.000	N/A	116.952.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya *****															Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehata	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Darat Tak Bermotor *****																n Kerja (Balai K3)	
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		11.000.000		12.100.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						61.800.000		61.800.000		61.800.000		67.980.000		74.778.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	1	61.800.000	1	61.800.000	1	61.800.000	1	67.980.000	1	74.778.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Bangunan Lainnya																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									954.533.000		1.036.093.000		1.063.396.000		1.146.855.000		10.261.544.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata ***	%	100	100	100	954.533.000	100	1.036.093.000	100	1.063.396.000	100	1.146.855.000	100	10.261.544.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								45.000.000		45.000.000		45.000.000		46.800.000		51.480.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	46.800.000	12	51.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							45.000.000		45.000.000		45.000.000		46.800.000		50.480.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	1	1	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	46.800.000	1	50.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada								0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Perangkat Daerah ****																	Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						A
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								14.907.000		33.467.000		33.467.000		34.808.000		48.291.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	14.907.000	100	33.467.000	100	33.467.000	100	34.808.000	100	48.291.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							1.601.000		1.601.000		1.601.000		1.666.000		1.833.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene	Paket	N/A	N/A	12	1.601.000	12	1.601.000	12	1.601.000	12	1.666.000	12	1.833.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	rangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****															grasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							13.306.000		13.306.000		13.306.000		13.839.000		15.224.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	13.306.000	1	13.306.000	1	13.306.000	1	13.839.000	1	15.224.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							0		18.560.000		18.560.000		19.303.000		21.234.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	12	18.560.000	12	18.560.000	12	19.303.000	12	21.234.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		4.462.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya barang milik daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang	Unit	N/A	20	22	0	24	0	26	0	28	0	30	4.462.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	urusan pemerintah daerah yang disediakan ****															
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		0		0		300.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar *****							0		0		0		0		100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		4.000.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	3	4.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Bangunan Lainnya	Lainnya yang Disediakan *****															grasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Bangunan Lainnya *****																Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								893.026.000		956.026.000		983.329.000		1.063.583.000		1.169.942.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	36	36	36	893.026.000	36	956.026.000	36	983.329.000	36	1.063.583.000	36	1.169.942.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						perangkat daerah																
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							0		1.000.000		1.000.000		1.040.000		1.144.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksanya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.040.000	1	1.144.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							273.026.000		273.026.000		300.329.000		312.343.000		343.578.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	1	12	273.026.000	12	273.026.000	12	300.329.000	12	312.343.000	12	343.578.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							620.000.000		682.000.000		682.000.000		750.200.000		825.220.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	620.000.000	12	682.000.000	12	682.000.000	12	750.200.000	12	825.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.600.000		1.600.000		1.600.000		1.664.000		4.527.831.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	8	9	1.600.000	10	1.600.000	11	1.600.000	12	1.664.000	13	4.527.831.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							1.600.000		1.600.000		1.600.000		1.664.000		1.831.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					*****																	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	8	1	1.600.000	1	1.600.000	1	1.600.000	1	1.664.000	1	1.831.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Perizinan Alat Besar																Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksanya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		4.510.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	4	4.510.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A

Tabel 4.1.2
Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam mendukung Program Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Penyusunan/pembaruan Kurikulum Pelatihan yang Sesuai Pasar Kerja	4 Dokumen Tahun : 2025 Target - Dok 2026 Target 4 Dok 2027 Target - Dok 2028 Target - Dok 2029 Target 4 Dok	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja ; Kegiatan Pelaksanaan Latihan kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ; Sub kegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	1) Balai Latihan Kerja Industri 2) Balai Latihan Kerja Pertanian 3) Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata 4) Balai Pengembangan Produktivitas	Dinas Kabupaten/Kota /Provinsi dan Pusat ; Pasar Kerja dan atau Perusahaan / DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Pendidikan) ; dan Akademisi
		Bursa Kerja atau Job Fair	1 Kegiatan Tahun : 2025 Target 200 org 2026 Target 200 org 2027 Target 200 org 2028 Target 200 org	Program Penempatan Tenaga Kerja; Kegiatan pengelolaan Informasi pasar kerja ; Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa kerja	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Kabupaten/Kota /Provinsi dan Pusat ; Lintas Sektor bersama Perangkat Daerah ; Pasar Kerja atau DUDI (Dunia Usaha dan

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
			2029 Target 200 org			Dunia Pendidikan) ; dan Akademisi
		Pelatihan yang Sesuai Pasar Kerja	10.271 orang Tahun : 2025Target 2019 org 2026Target 1994 org 2027Target 1780 org 2028Target 1938 org 2029Target 2540 org	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; Kegiatan Pelaksanaan Latihan kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ; Sub kegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	1) Balai Latihan Kerja Industri 2) Balai Latihan Kerja Pertanian 3) Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata 4) Balai Pengembangan Produktivitas	Dinas Kabupaten/Kota /Provinsi dan Pusat ; Pasar Kerja dan atau Perusahaan / DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Pendidikan) ; dan Akademisi.
2	Day care untuk buruh di Kawasan Industri	Penyusunan Pergub tentang Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Bagi Pekerja	1 Dokumen Tahun : 2025 Target 1 Dok 2026 Target 1 Dok 2027 Target - Dok 2028 Target - Dok 2029 Target - Dok	Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial; Kegiatan Penetapan Upah Minimum Penetapan Upah Minimum Provinsi	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ; Perusahaan / Kawasan Industri ; Dinas di Kabupaten/

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				(UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Kota/Provinsi dan Pusat .
		Koordinasi dengan pengusaha dan pengelola kawasan industri/ perusahaan	1 Kegiatan Target: 2025 Target 4 perush 2026 Target 4 perush 2027 Target 4 perush 2028 Target 4 perush 2029 Target 4 perush	Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kegiatan Penetapan Upah Minimum Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Pengelola/Perusahaan di Kawasan Industri

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		
3	Perlindungan Hak Buruh melalui Fasilitasi Peraturan Gubernur tentang Payung Hukum Ketenaga-kerjaan	-Jaminan cuti hamil, melahirkan bagi pekerja perempuan dan laki –laki -Perlindungan atas hubungan Industrial -Jaminan keterlibatan kaum buruh dalam penetapan upah	Telah dinaungi dalam Perda Jateng No. 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Fokus pengawasan dan penyelesaian kasus) Tahun Perush 2025 Target 475 2026 Target 778 2027 Target 525 2028 Target 550	Program Pengawasan Ketenagakerjaan ; Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan ; Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas di Kab/Kota dan Pusat ; DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah ; Perusahaan ; Dinas Kesehatan ; BPJS Ketenagakerjaan

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
			2029 Target 575			
			Tahun Kasus 2025 Target 260 2026 Target 260 2027 Target 250 2028 Target 240 2029 Target 230	Program Pengawasan Ketenagakerjaan ; Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan ; Sub Kegiatan Penegakan hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas di Kab/Kota dan Pusat ; DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah ; Perusahaan ; Dinas Kesehatan ; BPJS Ketenagakerjaan
			Tahun Kasus 2025 Target 125 2026 Target 125 2027 Target 138 2028 Target 151 2029 Target 166	Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi ;	Bidang Hubungan Industrial	Dinas di Kab/Kota dan Pusat ; DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah ; Perusahaan ; BPJS Ketenagakerjaan; Pengadilan Hubungan Industrial

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				Sub Kegiatan ; Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi		
4	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Aplikasi Ayo Kerjo untuk Pencari Kerja	Tahun orang 2025 Target 50 2026 Target 50 2027 Target 55 2028 Target 61 2029 Target 67	Program Penempatan Tenaga Kerja; Kegiatan Pengelolaan Informasi pasar kerja ; Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Antar Lokal)	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Kepemudaan , Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ; Dinas Komunikasi dan Digitalisasi Provinsi Jawa Tengah ;
			Tahun orang 2025 Target 350 2026 Target 100	Program Penempatan Tenaga Kerja; Kegiatan Pelayanan	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas di Kabupaten/Kota /Provinsi dan Pusat ;

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
			2027 Target 100 2028 Target 100 2029 Target 100	Antar Kerja Lintas Daerah Kab/Kota Informasi pasar kerja ; Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja		Dunia Usaha dan Dunia Pendidikan (DUDI)
	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Aplikasi Ayo Kerjo untuk Pencari Kerja	Pemeliharaan Asset Tak Berwujud (diantaranya untuk pemeliharaan Aplikasi Ayo Kerjo) Tahun Aplikasi 2025 Target 1 2026 Target 1 2027 Target 1 2028 Target 1 2029 Target 1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ; Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah; Sub Kegiatan : Pemeliharaan Asset Tak Berwujud.	Sekretariat	Dinas Komunikasi dan Digitalisasi Provinsi Jawa Tengah

Dalam sub bab ini juga menjelaskan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung 136 Program Daerah sebagaimana telah tercantum dalam tabel 4.1.2 tersebut diatas yang di laksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu 4 (empat) Balai Latihan Kerja di lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
2. Balai Latihan Kerja Pertanian Kelas A
3. Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
4. Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Tabel 4.2.1

Indikator Kinerja Utama Renstra

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun		Target Capaian						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Indikator Kinerja Tujuan 1									
I	**Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (EPR : Employment to Population Ratio)**	**68,04**	**70,21**	**69,06**	**69,54**	**70,03**	**70,55**	**71,08**	**71,40**	
	Indikator Kinerja Sasaran									
1	Persentase tenaga kerja yang kompeten	8,26	9.03	9,54	10,00	10,47	11,00	11,53	12,05	
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	55,16	55,47	56,00	56,40	56,90	57,20	57,60	58,00	
3	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja (%)	71,18	73,76	74,07	74,39	74,70	75,02	75,34	75,65	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	58,92	61,82	62,49	63,15	63,82	64,48	65,15	65,81	
	Indikator Kinerja Tujuan 2									
II.	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**NA**	**79,19**	**79,50**	**79,80**	**80,00**	**80,30**	**80,60**	**81,00**	
	Indikator Kinerja Sasaran									
1	Indeks Manajemen Resiko Indeks (MRI) perangkat daerah	NA	2,955	3,00	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	
2	Indek Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	84,09	87,50	87,55	87,60	87,65	87,70	87,75	87,80	

Kinerja Perangkat Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel 4.2.1 tersebut diatas adalah merupakan indikator tujuan dan atau sasaran yang dirumuskan sebagai berikut yaitu :

a. Indikator Tujuan 1 dan 3 Indikator Kinerja Sasaran 1

b. Indikator Tujuan 2

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, juga ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan pemerintah daerah urusan Wajib yang tidak berkaitan Pelayanan Dasar : urusan Tenaga Kerja sebagaimana tabel 4.2.2 disebalik halaman ini.

Tabel 4.2.2
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2024	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja									
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	65,71	68,57	68,57	85,71	91,43	94,29	97,14	100,00	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	8,26	9,03	9,54	9,98	10,47	10,98	11,53	12,05	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp)	55,16	55,47	56,00	56,36	56,86	57,23	57,60	58,00	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	17,38	19,07	19,25	19,43	19,62	19,80	19,98	20,17	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	71,18	73,76	73,80	73,85	73,90	73,95	74,00	74,05	
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	9,54	9,96	10,00	10,51	10,93	11,12	11,71	12,20	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang merupakan indikator penyelenggaraan pemerintah daerah urusan Wajib yang tidak berkaitan Pelayanan Dasar : Urusan Tenaga Kerja Tahun 2025 – 2029 sebanyak 6 (enam) Indikator sebagaimana tabel 4.1 diatas .

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagai upaya menjelaskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan keterkaitan serta mendukung komitmen RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Transmigrasi RI sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan nasional/RPJMN, dinamika serta perubahan perundang-undangan, serta mendasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024, maka perlu dilakukan penyusunan Renstra Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis ini akan menjadi dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan/pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi , kewenangan dan peran dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

Pada saat Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 belum tersusun maka untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan Renja setelah renstra berakhir, maka Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun pertama Renstra periode berikutnya.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu , konsistensi, kerjasama, dan koordinasi serta tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

----000----

LAMPIRAN

POHON KINERJA
DISNAKERTRANS JATENG
TAHUN 2025 - 2029

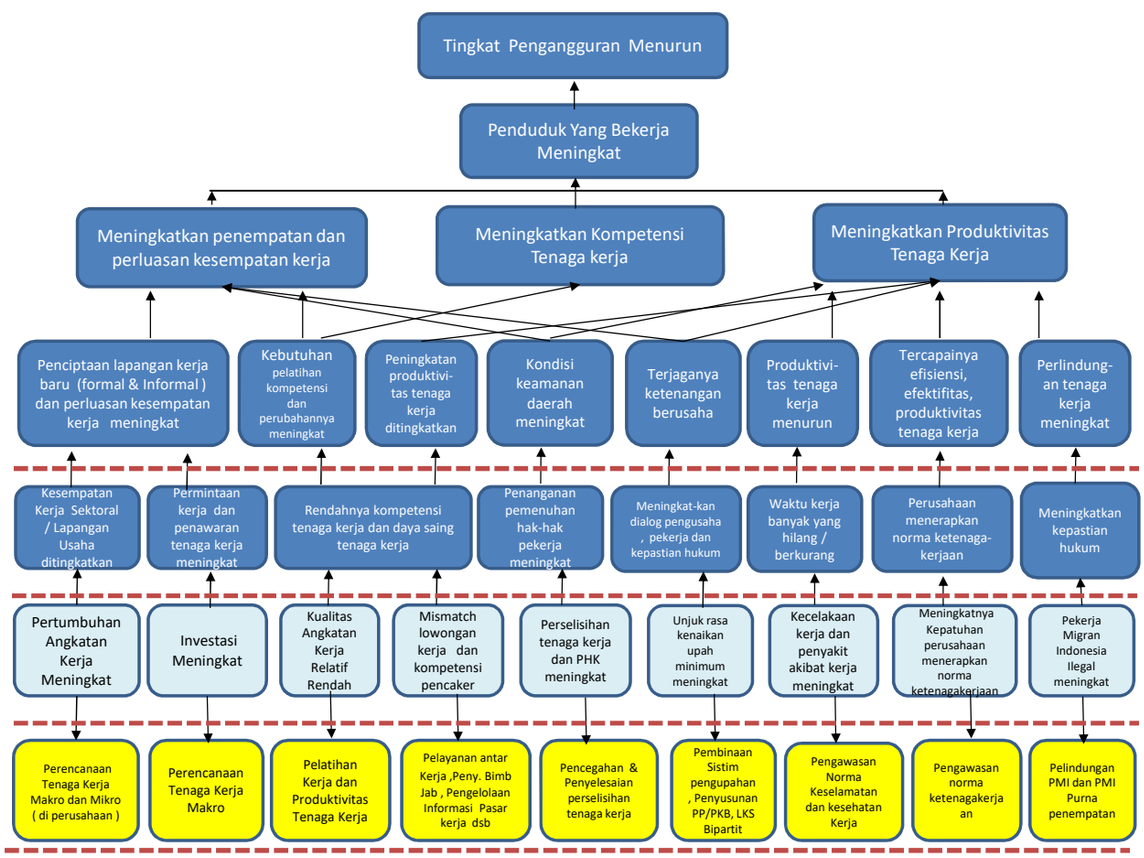

Cascading

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah

2025-2029

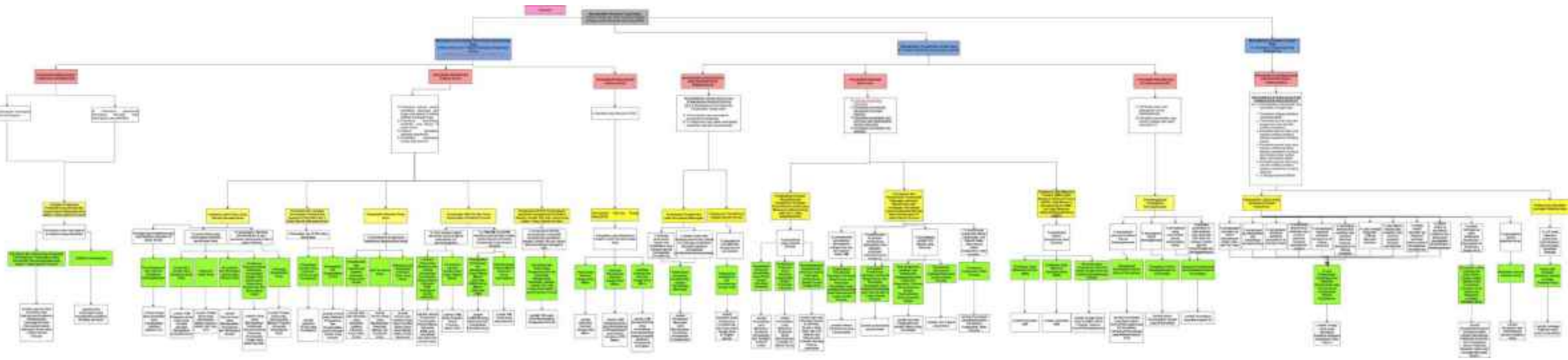

LAMPIRAN 3

Manajemen Resiko Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

a. Identifikasi Resiko

Tabel
Identifikasi Resiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	Pencari kerja belum dapat ditempatkan karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja (tidak mempunyai ijazah SD atau penyetaraan)	Risiko Strategis	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar kerja yang inklusif	Pencari kerja yang belum ditempatkan menambah jumlah pengangguran	Balai pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	- Calon Transmigrasi mengundurkan diri saat pemberangkatan ke daerah tujuan penempatan transmigrasi - Daerah Tujuan transmigrasi menolak sebagai lokasi penempatan transmigran, walaupun sudah terbit surat penetapan oleh Pusat /Kementerian Transmigrasi	Risiko Strategis	Kebijakan daerah tujuan transmigrasi terkait penolakan transmigran	Penempatan Transmigrasi tidak memenuhi target	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Strategis	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	Risiko Strategis	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing	Pemerintah Daerah dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Strategis	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	Risiko Strategis	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	-Pemerintah Daerah dan Masyarakat - Pengusaha dan Pekerja .
5	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	Risiko Strategis	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/ merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb."	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan /belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri"	Pemerintah Daerah dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	Risiko Strategis	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. -Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian	Masyarakat
7	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terdapat indikasi adanya pengancaman/intimidasi yang dilakukan pemeriksa dari Inspektorat sebagai peminat barang terhadap pengurus barang terkait dengan proses lelang/penjualan aset	Risiko Strategis	Seseorang sebagai peminat lelang/penjualan aset mempunyai keinginan untuk memenangkan lelang tersebut tanpa prosedur yang benar	Proses lelang/penjualan aset tanpa prosedur sehingga tidak sesuai dengan aturan dan Pengurus barang menjadi ketakutan karena diintimidasi sehingga mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas kerja	ASN

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunanan dengan Data dan infromasi seadanya /kurang optimal	Risiko Strategis	-Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi , menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat . - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi opersional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan dserta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans)	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik , sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya , kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik - Kemnaker)	Msyarakat

b. Analisis Resiko

Tabel
Analisis Resiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pencari kerja belum dapat ditempatkan karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja (tidak mempunyai ijazah SD atau penyetaraan)	3	4	12	Ada	Menginformasikan persyaratan tersebut kepada pencari kerja termasuk penyandang disabilitas dan stake holder / Dinas Pendidikan dan lainnya yang terkait persyaratan minimal untuk bekerja di perusahaan tsb harus lulus SD /ijazah SD atau penyetaraan . Serta menyampaikan usulan kepada PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	Memadai	3	4	12
- Calon Transmigrasi mengundurkan diri saat pemberangkatan ke daerah tujuan penempatan transmigrasi - Daerah Tujuan transmigrasi menolak sebagai lokasi penempatan transmigran, walaupun sudah terbit surat penetapan oleh Pusat /Kementerian Transmigrasi	3	4	12	Ada	Melakukan Sosialisasi, rekrutmen dan seleksi calon peserta kembali dengan pengganti yang telah diseleksi atau diulang kembali melakukan konsolidasi dengan kab/kota yang bersedia mengirimkan calon transmigran untuk ditempatkan di daerah tujuan, sesuai surat penetapan kuota dari Pusat /Kementerian Transmigrasi . Proses wawancara lebih detail	Memadai	3	3	9
Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	3	4	12	Ada	- Melakukan pembinaan dan pendampingan pada pegwai di Kab/Kota/Prov dalam menyusun Dokumen RTKD/RTK Makro dan RTK Mikro di Perusahaan - Melakukan Reviu terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah - Melaporkan hasil keakurasian pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari 6 indikator ketenagakerjaan antara proyeksi /perkiraan dan realisasi nya pada tahun berjalan (Sakernas - BPS)	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	4	4	16	Ada	- Sosialisasi, pelatihan/bimtek peningkatan produktivitas, pengukuran produktivitas baik untuk pencari kerja, tenaga kerja di perusahaan dan wirausaha baru di masyarakat serta pengusaha / pengelola perusahaan - Perusahaan membuat SOP tentang bidang pekerjaan untuk tenaga kerja -Memaksimalkan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan. Berkoordinasi dengan stakeholder pengusaha , pekerja , serikat pekerja	Memadai	3	4	12
Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	3	4	12	Ada	- Intensifikasi dalam peningkatan kapasitas pegawai terkait etos kerja dan budaya kerja supaya berintegritas yang tinggi - Sosialisasi Rekrutmen magang ke Jepang tidak dikenakan biaya"	Memadai	3	4	12
Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	3	4	12	Ada	" - Menegur yang bersangkutan di kegiatan tersebut untuk mengajukan nota dinas sebelum menggunakan aset - Pengelolaan aset diberikan kepada Pihak lain sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku - Menyusun aturan/kebijakan serta Berita Acara dalam pengelolaan aset berkolaborasi dengan BPKAD Prov. Jateng, Biro APBJ Setda Prov. Jateng, Biro Hukum Setda Prov. Jateng sesuai dengan prosedur yang berlaku"	Memadai	3	4	12
Terdapat indikasi adanya pengancaman/intimidasi yang dilakukan pemeriksa dari Inspektorat sebagai peminat barang terhadap pengurus barang terkait dengan proses lelang/penjualan aset	3	4	12	Ada	Melaporkan secara lisan kepada Inspektorat Prov. Jateng	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunanan dengan Data dan infromasi seadanya /kurang optimal	3	4	12	Ada	- Menyusun SK Satu Data ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah yang harus ditanda tangani oleh Gubernur (Tahun 2025 sampai saat ini belum ditanda tangani Gub) yang anggotanya dari Bidang dan UPTD Disnakertrans serta SDM Kab/Kota Dinas yang membidangi ketenagakerjaan. - Mengkoordinasikan dengan Pusat Data dan Informasi ketenagakerjaan dan BPS , Bappeda serta Diskomfo Jateng terkait data dan informasi ketenagakerjaan F34	Memadai	3	4	12

c. Penetapan Resiko Prioritas

Tabel
Resiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pencari kerja belum dapat ditempatkan karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja (tidak mempunyai ijazah SD atau penyetaraan)	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar kerja yang inklusif	Pencari kerja yang belum ditempatkan menambah jumlah pengangguran
Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing
Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing
-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun
-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun
-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/ merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb."	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan /belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri"
Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/ merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb."	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan /belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri"
Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. -Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian
Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. -Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian
Terdapat indikasi adanya pengancaman/intimidasi yang dilakukan pemeriksa dari Inspektorat sebagai peminat barang terhadap pengurus barang terkait dengan proses lelang/penjualan aset	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Seseorang sebagai peminat lelang/penjualan aset mempunyai keinginan untuk memenangkan lelang tersebut tanpa prosedur yang benar	Proses lelang/penjualan aset tanpa prosedur sehingga tidak sesuai dengan aturan dan Pengurus barang menjadi ketakutan karena diintimidasi sehingga mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas kerja

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunanan dengan Data dan infromasi seadanya /kurang optimal	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	-Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi , menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat . - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi opersional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan dserta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans)	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik , sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya , kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik - Kemnaker)
- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunanan dengan Data dan infromasi seadanya /kurang optimal	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	-Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi , menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat . - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi opersional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan dserta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans)	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik , sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya , kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik - Kemnaker)

d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Tabel
Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	Pencari kerja belum dapat ditempatkan karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja (tidak mempunyai ijazah SD atau penyetaraan)	12	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar kerja yang inklusif	Pencari kerja yang belum ditempatkan menambah jumlah pengangguran	Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan, Pembekalan, dan Pengembangan Aplikasi Ayo Kerjo	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing	Melakukan pembinaan dan pendampingan pada pegwai di Kab/Kota/Prov dalam menyusun Dokumen RTKD/RTK Makro dan RTK Mikro di perusahaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing	Melakukan Reviu terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing	Melakukan Evaluasi dan Monitoring terkait penyusunan RTK Makro / RTK Mikro pada Dinas di Kab/Kota/Prov dan perusahaan di Jateng	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing	Melakukan Bimtek penyusunan RTKD/RTK Makro dan RTK Mikro di perusahaan bagi Pegawai Kab/Kota/Provinsi dan perusahaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	Memaksimalkan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan, Berkolaborasi dengan stake holder pengusaha, pekerja serikat pekerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	Sosialisasi, pelatihan/bimtek peningkatan produktivitas, pengukuran produktivitas baik untuk pencari kerja, tenaga kerja di perusahaan dan wirausaha baru di masyarakat serta pengusaha / pengelola perusahaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	Perusahaan membuat SOP tentang bidang pekerjaan untuk tenaga kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	12	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/ merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb."	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan /belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri"	Intensifikasi dalam peningkatan kapasitas pegawai terkait etos kerja dan budaya kerja supaya berintegritas yang tinggi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	12	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan /belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta	Sosialisasi Rekrutmen magang ke Jepang tidak dikenakan biaya	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb."	magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri"			
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	12	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. -Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian	- Pengelolaan aset diberikan kepada Pihak lain sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku Menyusun aturan/kebijakan serta Berita Acara dalam pengelolaan aset berkolaborasi dengan BPKAD Prov. Jateng, Biro APBJ Setda Prov. Jateng, Biro Hukum Setda Prov. Jateng sesuai dengan prosedur yang berlaku	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	12	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. -Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian	Menegur yang bersangkutan di kegiatan tersebut untuk mengajukan nota dinas sebelum menggunakan aset	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terdapat indikasi adanya pengancaman/intimidasi yang dilakukan pemeriksa dari Inspektorat sebagai peminat barang terhadap pengurus barang terkait dengan proses lelang/penjualan aset	12	Seseorang sebagai peminat lelang/penjualan aset mempunyai keinginan untuk memenangkan lelang tersebut tanpa prosedur yang benar	Proses lelang/penjualan aset tanpa prosedur sehingga tidak sesuai dengan aturan dan Pengurus barang menjadi ketakutan karena diintimidasi sehingga mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas kerja	Melaporkan secara lisan kepada Inspektorat Prov. Jateng	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunanan dengan Data dan infromasi seadanya /kurang optimal	12	-Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi , menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat . - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi opersional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan dserta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans)	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik , sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya , kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik - Kemnaker)	Mengkoordinasikan dengan Pusat Data dan Informasi ketenagakerjaan dan BPS , Bappeda serta Diskomfo Jateng terkait data dan informasi ketenagakerjaan F34	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 Bulan

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunanan dengan Data dan infromasi seadanya /kurang optimal	12	-Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi , menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat . - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi opersional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan dserta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans)	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik , sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya , kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik - Kemnaker)	Menyusun SK Satu Data ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah yang harus ditanda tangani oleh Gubernur (Tahun 2025 sampai saat ini belum ditanda tangani Gub) yang anggotanya dari Bidang dan UPTD Disnakertrans serta SDM Kab/Kota Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 Bulan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 524 /2025

TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sesuai tahapan dalam pelaksanaan pembangunan perlu disusun Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menyiapkan dan menyusun Rencana Strategis Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menyiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
d. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang – Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU mengamanahkan pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota secara bersama-sama dan serentak pada tahun 2024;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
7. Undang – Undang Nomor : 59 Tahun 2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59/2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 / Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan dan RKPD ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan terakhir dengan Kepmendagri Nomor : 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD tahun 2025 – 2029 ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistim Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 -2045.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

KESATU : Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029.

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat para pejabat/pegawai sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini yang terdiri dari:

1. Penanggungjawab mempunyai tugas
   a. Memberikan arahan dan petunjuk proses persiapan, pelaksanaan serta pelaporan kegiatan agar tercapainya 4 tepat (tepat waktu, sasaran, administrasi, pelaporan)
   b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Ketua Tim mempunyai tugas :
   a. Mengkoordinir dan membagi tugas/tanggung jawab pelaksanaan kegiatan.
   b. Melaporkan hasil kegiatan.
   c. Dalam melaksanakan tugas tanggung jawab terhadap Kepala Dinas sebagai penanggunjawab kegiatan.
3. Sekretaris mempunyai tugas :
   a. Membantu kelancaran pengadministrasian kegiatan.
   b. Mengkoordinasikan dengan steakholder terkait dengan perencanaan didaerah dan pusat baik dengan pemerintah di Provinsi Jawa Tengah, Kab/Kota Pusat.
   c. Mengkoordinir Data-data dan informasi serta permasalahan dari Sekretariat/Bidang/Unit Pelaksana Teknis Daerah dari lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
   d. Mengkoordinir Isu – isu Strategis, Program dan Kegiatan, kebutuhan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang sesuai arah kebijakan bidang ketenagakerjaa n dan ketransmigrasian.
   e. Mengkoordinir penyusunan renstra baik secara teknis maupun administrasi.
   f. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab terhadap penanggung jawab melalui ketua tim.

4. Tim Teknis mempunyai tugas :
   a. Menyusun data-data dan informasi terkait target dan kinerja sesuai dengan TUPOKSI selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 s/d 2029 dan evaluasi renstra tahun 2024 s/d 2025.
   b. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan, isu strategis sesuai dengan tupoksinya.
   c. Mengkompilasi, menganalisa, mengkaji hasil kinerja selama (lima) tahun dari tahun 2024 s/d 2025 dan menyusun rencana.
   d. Menyusun draft kebijakan pembangunan bidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian.
   e. Menyusun draft rencana, target sasaran, program/kegiatan serta pendanaanya baik untuk APBD/APBN selama periode 5 (lima) tahun yaitu 2025 s/d 2029.
   f. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 2025 s/d 2029.

5. Anggota mempunyai tugas :
   a. Membantu sekretaris dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi.
   b. Mengkomplikasi, mengkaji data–data dan informasi serta menyusun Renstra Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.
d. Membantu kelancaran penyelenggaraan rapat-rapat dan pembahasan dalam penyusunan Renstra Dinas.
e. Menghubungi Narasumber dan Tim Penyusun Renstra.
f. Menyusun Renstra Dinas.
g. Menyusun laporan.
h. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab terhadap ketua tim.

KETIGA : Menunjuk dan mengangkat nara sumber/tenaga ahli untuk memberikan pendampingan/bimbingan secara teknis dalam penyusunan Renstra Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini .

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan diterbit - kannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 11 - 3 - 2025

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

AHMAD AZIZ

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah:
2. Pegawai yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 524 /2025
Tanggal : 11 -3 2025

TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DISNAKERTRANS TAHUN 2025-2029
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN		KET
		DALAM KEDINASAN	DALAM TIM	
1	2	3	4	5
1.	Ahmad Aziz, SE,M.Si	Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab	
2.	Mumpuniati, SH,MM	Sekretaris	Ketua Tim	
3.	Masduqi, SE,M.Si	Kepala Bidang Lantas	Wakil Ketua I	
4.	Candra Yuliawan, AP,M.Si	Kepala Bidang Pentatrans	Wakil Ketua II	
5.	Mumpuni, SH,MM	Plt.Kepala Bidang HI dan Jamsos	Wakil Ketua III	
6.	Moh Wachju Alamsyah, SH	Kepala Bidang Wasnaker	Wakil Ketua IV	
7.	Arief Arge Dewanto, SH, M.Kn	Kepala subbag program	Sekretaris	
8.	Dra. Yuli Ratna Wahyuning Tyas, M.Si	Perencana Ahli Madya pada Subbag Program	Tim Teknis	
9.	Saptono,SE	Staf Subbag Program	Anggota Tim Teknis	
10.	Danik Endarsani,SE	Staf Subbag Program	Anggota	
11.	Dian Ade Nugroho, A.Md	Staf Subbag Program	Anggota	
12.	Umi Hani, SH,M.Hum	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
13.	Triyuliani Astuti, SH	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
14.	Nur Siswandari, SH,MM	Kepala Subbag Keuangan	Anggota	

15.	Ary Lusiawaty, SE, M.Si	Ketua Kelompok Kerja Pelatihan dan Pemagangan	Anggota	
16.	Dwi Ariastuti, SE,MM	Ketua Kelompok Kerja Produktivitas	Anggota	
17.	Sulistiyo Ardi Nugroho, S.AP, M.Si	Ketua Kelompok Kerja Penempatan Tenaga Kerja	Anggota	
18.	Desta Nurmalita, SE	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota	
19.	Fendi Anggara, SE,MM	Ketua Kelompok Kerja Perluasan Tenaga Kerja	Anggota	
20.	Tri Kartika Martijana, S.Psi	Ketua Kelompok Transmigrasi	Anggota	
21.	Bayu Angga Nugroho	Staf Sie Transmigrasi	Anggota	
22.	Novian Heru R, SH	Ketua Kelompok Kerja Syarat Kerja dan Jaminan Sosial	Anggota	
23.	Dwi Maryono, SH,MAP	Ketua Kelompok Kerja Kelembagaan dan Hubungan Industrial	Anggota	
24.	Fahmi Arief Nasrullah, SH	Ketua Kelompok Kerja Pengupahan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Anggota	
25.	Bayu Kusdiansyah, SH	Ketua Kelompok Kerja Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Anggota	
26.	Nashrudin Anwar, ST	Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan	Anggota	
27.	Edy Suprijanto, SH	Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Norma Kerja	Anggota	
28.	Siti Zubaedah Atauchidijah, S.Sos	Kepala BLK Semarang 1	Anggota	
29.	Puji Rahardjo, SH	Kasubbag TU BLK Semarang 1	Anggota	
30.	Emiliana Bekti Widhiningsih, S.S	Ketua Kelompok Kerja Pelatihan BLK Semarang 1	Anggota	
31.	Aditya Jati Prabawa, S.STP, M.Si	Ketua Kelompok Kerja Pemasaran BLK Semarang 1	Anggota	
32.	A. Amrih Widhi Caksono, S.IP	Kepala BLK Semarang 2	Anggota	
33.	Yurisa Fitri Pradipta, SH	Kasubbag TU BLK Semarang 2	Anggota	
34.	Lisqi, SE	Ketua Kelompok Kerja Pelatihan BLK Semarang 2	Anggota	

35.	Titik Suwarti, SE	Ketua Kelompok Kerja Pemasaran BLK Semarang 2	Anggota	
36.	Eko Mulyadi,S.Pd,MM	Kepala BLK Cilacap	Anggota	
37.	Agus Supriyono,SE	Subbag TU BLK Cilacap	Anggota	
38.	Suharjito, S.Sos	Ketua Kelompok Kerja Pemasaran BLK Cilacap	Anggota	
39.	Ir.Asih Suciati, MP	Kepala Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi	Anggota	
40.	Timotius Setiawan, ST.MTP	Ketua Kelompok Kerja Pelatihan Balatkertrans	Anggota	
41.	Hadi Prabowo, SIP	Kepala Balai Keselamatan Kerja	Anggota	
42.	Kuntodi. PGDipSc, M. Si	Kasubbag TU Balai K2	Anggota	
43.	Gatot Priyanto,S.Sos	Ketua Kelompok Kerja Pelayanan Teknis Balai K2	Anggota	
44.	Erry Dyah Nurhidayah, SH	Kepala BPPPTK	Anggota	
45.	Titus Puguh Nugroho, SH	Kasubbag TU BPPPTK	Anggota	
46.	Bernanda Daniar,SIP,M.Si	Ketua Kelompok Kerja Standarisasi Sertifikasi	Anggota	
47.	Tutut Rahmawati,S.Psi	Analisa Jabatan Subbag Umpeg	Anggota	

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

AHMAD AZIZ

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 524 / 2025
Tanggal : 11 - 3 - 2025

NARASUMBER FORUM PD PENYUSUNAN RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN		KET
		DALAM KEDINASAN	DALAM TIM	
1	2	3	4	5
1.	Prof. Firmansyah,SE, M.Si, Ph.d	Guru Besar FEB – UNDIP Semarang	Narasumber Penyusunan Renstra	Diberikan Honorarium sesuaiketentuan dan dipotong pajak pph pasal 21
2.	Drs. Gunarto Taslim, MM	Tenaga Ahli dari LPPSP – Semarang	Narasumber Penyusunan Renstra	

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

AHMAD AZIZ

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Pahlawan No. 16 Telp. (024) 8311713 Fax. (024) 8311713 Semarang 50241
Website : www.disnakertrans.jatengprov.go.id
Email : disnakertrans@jatengprov.go.id

BERITA ACARA
HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 050 / 1778

Pada hari **Rabu** tanggal **Enam belas** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh lima** telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rentra Tahun 2025-2029 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

a. Pemaparan materi Rancangan awal Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Rabu / 16 April 2025
J a m : 09 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Rimba Bujang Disnakertrans Prov. Jateng

MENYEPAKATI

KESATU : Isu strategis (pelayanan) SKPD, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini

KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini

KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;

KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil forum Perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ini; dan

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 April 2025

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

AHMAD AZIZ, S.E, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	ZAENUDIN	DPRD		
2	SALSABILA I.	TAPD		
3	BAGUS R.	Unsur Perangkat Daerah		
4	GUNARTO	Unsur Masyarakat		
5	FIRMANSYAH . Prof	UNDIP		

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

NOMOR :

TANGGAL : 16 APRIL 2025

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

Provinsi : Jawa Tengah
Tanggal : 16 April 2025
Tempat : Ruang Rapat Rimbo Bujang, Gedung B, Lantai 4
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

No	Nama	Lembaga/Instansi	No.Telp.	Tanda Tangan
1	Ahmad Aziz	Kadisnakertrans Jateng		1
2	Mumpuniati	Sekdinakertrans Jateng		2
3	Yuli Ratna W	Dinakertrans	082137451381	3
4	Arih Suciati	BLK Klepak	08121555627	4
5	Elia Malyadi	BLK Klaropo	08157562203	5
6	Jose Antonio	BLK KIP	081215929586	6
7	Pamrih P	BP3MI Jateng	08787782 8080	7
8	Rozo S.	BLK Klaropo	08578244 2122	8
9	Novemela A.H.	DPMPTSP Jateng	085641288800	9
10	LINNEA N.	SATWAS SMRC	082134504777	10
11	Vanny Suryawati	PHKD Jateng	08128143047	11
12	Rodli	BP3MI	08213653 6725	12
13	Guntur G	Pinas LHK	081 22710110	13
14	DWI ARIASTUTI	Lattas	0817452833	14

No	Nama	Lembaga/Instansi	No.Telp.	Tanda Tangan
15	Cantika Yulianza	pentabrans		15
16	Frans Kongi	KADIN		16
17	BUDI'S	BPKAD		17
18	[illegible]	BKZ		18
19	[illegible]	APJAT		19
20	[illegible]	FIK BKK		20
21	[illegible]	BKZ		21
22	WIDIATTIO	Sahaw Pelag		22
23	Dave H.	Sekwilar [illegible]		23
24	[illegible]	[illegible]		24
25	Eko Prstiawan	Diskop UKM	08727673788	25
26	Erry Dyah N	BP3TL		26
27	Titi Agustina	Kadin Jateng	0823264994 27	27
28	ZAINUDDIN	BPPA [illegible]	081225777000	28
29	[illegible]	Dwgs.	081904169223	29
30	WIRODO	BIRD Banyak		30
31	Leny Indriya	-11-		31
32	Sri Purwati	Disperindag		32
33	Aina Uly F.S	Disperindag		33

No	Nama	Lembaga/Instansi	No.Telp.	Tanda Tangan
34	Sayf	Salaga		34
35	Fenri A	Dua Penta		35
36	Estu	PO Kisro	082250009718	36
37	Hananti	— " —	082129635036	37
38	Tri Kartika	Pentatrans		38
39	Eki. A.	BBPVP Semarang	081288218146	39
40	Ryi R	BLK SMG		40
41	[illegible]	BBPVP Sekar	0856 1796 1761	41
42	Hidayat H	BBPVP Semarang	085211679731	42
43	Y. Gawati	Disnaker Blg	085776349668	43
44	Hendro	Disperinaker Kdl		44
45	M. Shafiyullah	Disperinaker Kdl		45
46	Frans Arsinta K	DISDIKBUD	08995559761	46
47	Vina Boudhlin S.	DPRD Prov		47
48	Atif Agus	Disnaker Lab Smg	081225776997	48
49	Wimas Ayodyant	Disnaker Kab Smg	085617312212	49
50	Subandos	BLK I	082134302678	50
51	Fajar	Dua Sekarsa	08413204445	
52	Dian Ade IY	Pregas		

No	Nama	Lembaga/Instansi	No.Telp.	Tanda Tangan
53	Devi H	DP3AP2KB	0812153[illegible]	
54	HARIJO TEESH	BPS PROV	081326825396	
55	Bagus R	R. [illegible]		
56	Eddy P	Wasnaker		
57	Lilik	Dinsos Sng		
58	Setyo P	Satwasnaker Pat		
59	Gigih Erlik	Satwasnaker Pat		
60	Claudia Christele	HI Bamsoi		
61	Noyana Kantika	BPDSTK JDIY	082134387475	
62	Ellier Dbh	— " —		
63	Arif Akbar	" —	0817447201[illegible]	
64	RHEMAN P	— " —	[illegible]	
65	Salsabila I	Bappeda Stg	085866005[illegible]	
66	Septiana	Program		
67	[illegible]	Pentahelix		
68	Tatok	Aspatak	081227443[illegible]	
69	Danik	Program		
70	Tambar	Program		
71	BAGO	— " —		

No	Nama	Lembaga/Instansi	No.Telp.	Tanda Tangan
72	Azalia Shete	Umpeg		
73	Fahmal [illegible]	umpeg		
74	DEWAN A	umpeg		
75	ENDAH	Umpeg		
76	Wisan	Umpeg		
77	W. YOGI [illegible]	Umpeg		
78	Y. [illegible]	Umpeg		
79	Pidekso W	Umpeg		
80	Colicheatum	Umpeg		
81	Rello [illegible]	umpeg		
82	Tri Yuwani	Umpeg		
83	Tulut R	—		
84	Lipun	Umpeg		
85	Soraya	Umpeg		
86	Ornella	Umpeg		
87	Sanusi	Umpeg		
88	Khapidi	—		
89	Firman	Kemangan		
90	Dimas	HI & Jamsos		

No	Nama	Lembaga/Instansi	No.Telp.	Tanda Tangan
91	PURWANTO	H.I. JAMSOS		
92	TITIK	KU		
93	Nur Siswandari	Keu		
94	~~[illegible]~~ Dolmi	Ku		
95	Hildha Hidayah	Keu		
96	Maria	Ku		
97	Tasya	Ku		
98	Linu	Ku		
99	Zamel anjar	—		
100	Reni	PKL		
101	Desta	Pentatrans		
102	Riswanto AN	—		
103	Gusti Ayu Dewi	Penta		
104	Ilham Maulana S	Wasnalur		
105	Terus Diliana	Penta		
106	Puja Budi Prayoga	Wasnalur.		
107	Dutra Appulah	Laftas		
108	SINDHUNG W	PROGRAM		
109	Renan Gonggo	PROGRAM		

No	Nama	Lembaga/Instansi	No.Telp.	Tanda Tangan
110	Dwi Maryoso	H.I d Kanjo		
111	Dedy Gigh P.	Lattas		
112	M. FAHRURROZI	Umpeg		
113	Eman Sena	Umpeg		
114	YANDAR ALVIN A	UMPEG		
115	Supriyani	Pemsolan		
116	Dedy W	Lattas		
117	Ibillyuman Wiwi S	Lattas		
118	Nanny Ilen	Ile Jalo		
119	Sabrina Rizka S	Umpeg		
120	Nur Farida	Wasnaker		
121	Sora Wesekan	Wasnaker		
122	N. Anwar	Wasnaker		
123	Diana Dwi P.	wasnaker		
124	Surya W	wasnaker		
125	Yan Wijayanto	—//—		
126	Baya Kusdiawati	—//—		
127	[illegible]	—//—		
128	Bernanda Danior	Lattas	087812500808	

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rentra Tahun 2025-2029 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra.

Tanggal : 16 April 2025

Tempat : Aula Rimba Bujang Disnakertrans Prov. Jateng

Visi : "Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045"			
Misi 6 : Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah, serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan Pendu-duk Yang Bekerja	1. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Penguatan Pelatihan Ber-basis Kompetensi (PBK) dan pelatihan Vokasi untuk sektor tumbuh tinggi, sertifikasi tenaga kerja untuk sektor dengan kebutuhan kompetensi spesifik (contoh akuntansi, pemasaran digital, pelayanan publik, operator manufaktur dan sebagai-nya), link and Match dengan sektor jasa dan industri modern.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan ketrampilan tenaga kerja dan pengembangan ket-rampilan pada masyara-kat pencari kerja untuk menghasilkan sumber daya manusia atau tena-ga kerja yang kompeten dan berdaya saing .
		Penguatan kelembagaan pelatihan dan sumber daya pelatihan di Balai Latihan kerja (BLK) Pemerintah dan Lembaga Pelatihan kerja Swasta (LPKS)	Meningkatkan penguatan kelembagaan pelatihan dan sumber daya pelatihan di Balai Latihan kerja (BLK) Pemerintah dan LPKS, untuk menghasil-kan Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi dan mampu menghasilkan luaran atau tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing
	2. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan pelatihan, kom-petensi produktivitas dan daya saing tenaga kerja yang fokus pelatihan pening-katan efisiensi kerja, manaje-men usaha mikro dan adap-tasi teknologi sederhana.	Melakukan pelatihan peningkatan efisiensi kerja, manajemen usaha mikro , dan adaptasi teknologi sederhana untuk mening-katkan produktivitas tenaga kerja

		Membangun ekosistem kerja produktif di sektor informal dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) dan mendorong kolaborasi dunia usaha untuk peningkatan produktivitas berbasis pelatihan berkelanjutan .	Meningkatkan penguatan ekosistem kerja produktif di sektor informal dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) dan mendorong kolabororasi dunia usaha untuk peningkatan produktivitas berbasis pelatihan berkelanjutan.
		Pengelolaan iklim kerja yang kondusif , perlindungan jaminan sosial dan penguatan kelem-bagaan Hubungan Industrial, mendorong perusahaan dalam kepesertaan jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan bagi tenaga kerja .	Meningkatkan dan menjaga pengelolaan iklim kerja yang kondusif, untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja dan meningkatkan kondisi kerja dan produktivitas tenaga kerja serta kesejahteraan mereka.
		Peningkatan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan dan norma Keselamatan dan kesehataan Kerja (Norma K3) serta penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga perusahaan dapat terjaga ketenangan dalam berusaha , yang berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja .	Meningkatkan koordinasi , pengawasan dan pemeriksaan serta pembinaan ketenagakerjaan melalui penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan secara berkesinambungan yang diprioritaskan pada perusahaan yang memiliki penyerapan tenaga kerja besar dan memiliki risiko keselamatan tenaga kerja menengah dan besar .
	3. Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Pembinaan dan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) atau RTK Makro bagi Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/ Kota/Prov. dan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro di perusahaan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah (Prov. / Kabupaten/Kota)	Melakukan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) atau RTK Makro di Provinsi Jawa Tengah dan pembinaan serta pendampingan dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)/RTK Makro dan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro di perusahaan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah (Provinsi/Kab./Kota).

		Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri (Pekerja Migran Indonesia) , perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna, pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) serta peningkatan tenaga kerja disabilitas yang bekerja di sektor formal dan informal , pembinaan tenaga kerja pendamping Tenaga kerja Asing (TKA) dan penyelenggaraan penyebarluasan informasi pasar kerja dan penguatan sistim informasi pasar kerja melalui Bursa Kerja Online (e-Makaryo) , Bursa Kerja Khusus (BKK), Job Market Fair (Job Fair Digital) /atau Bursa Kerja Offline serta difokuskan Fasilitasi penciptaan lapangan kerja yang di sektor yang sedang tumbuh (manufaktur , konstruksi ,jasa) , mendorong tenaga kerja mandiri /wirausaha baru disektor yang menyerap tenagakerja informal (perdagangan, kuliner , pariwisata) dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyerapan kerja berbasis proyek investasi (pembangunan fisik dan proyeksi PMTB)	Melakukan peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri (Pekerja Migran Indonesia) , perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna, pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) serta peningkatan tenaga kerja disabilitas yang bekerja di sektor formal dan informal , pembinaan tenaga kerja pendamping Tenaga kerja Asing (TKA) dan penyelenggaraan penyebarluasan informasi pasar kerja dan penguatan sistim informasi pasar kerja melalui Bursa Kerja Online (e-Makaryo), Bursa Kerja Khusus (BKK), Job Market Fair (Job Fair Digital) /atau Bursa Kerja Offline serta difokuskan Fasilitasi penciptaan lapangan kerja yang di sektor yang sedang tumbuh (manufaktur, konstruksi ,jasa), mendorong tenaga kerja mandiri /wirausaha baru disektor yang menyerap tenagaker-ja informal (perdagangan, kuliner , pariwisata) dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyerapan kerja berbasis proyek investasi (pembangunan fisik dan proyeksi PMTB)
		Peningkatan koordinasi dan integrasi kerjasama pelaksanaan transmigrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kab/Kota daerah tujuan transmigrasi , dalam pelatihan dan penempatan calon transmigran.	Peningkatan koordinasi dan integrasi kerjasama pelaksanaan transmigrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kab/Kota daerah tujuan transmigrasi , dalam pelatihan dan penempatan calon transmigran.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah	Peningkatan kualitas penilaian mandiri terhadap pengelolaan resiko melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berbasis resiko di	Melakukan Peningkatan kualitas penilaian mandiri terhadap pengelolaan resiko melalui Sistem Pengendalian Internal

dinamis		Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah	Pemerintah berbasis resiko di Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi dengan Rencana Strategis Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik , berupa pelayanan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Perangkat Daerah melalui survei kepuasan masyarakat secara mandiri (9 unsur) dan atau menyediakan berbagai pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berbasis elektronik / digital .	Meningkatkan kualitas pelayanan publik , berupa pelayanan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Perangkat Daerah melalui survei kepuasan masyarakat secara mandiri (9 unsur) dan atau menyediakan berbagai pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berbasis elektronik / digital .

	TUJUAN DAN SASARAN	IK	PROGRAM DAN KEGIATAN	IK	Baseline Tahun 2025	TARGET KINERJA										KONPI RI
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan	2	2	30.000.000	2	33.000.000	2	36.300.000	2	39.930.000	2	43.923.000	
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan**	13,22	73	2.439.743.000	74	2.703.717.000	75	2.991.589.000	76	3.305.747.000	76	3.648.822.000	
			Kegiatan :													
			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
			Kegiatan :													
			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan lembaga pendidikan diberikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas / kewirausahaan	67,08	72,99	2.279.100.000	73,88	2.507.010.000	74,73	2.757.711.000	75,55	3.033.482.000	76,35	3.336.830.000	
				Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	23,53	27,78	110.643.000	31,58	121.707.000	35	133.878.000	38,1	147.265.000	40,91	161.992.000	
			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	8,06	10	50.000.000	12	75.000.000	13,13	100.000.000	14,29	125.000.000	15	150.000.000	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL ***	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	39,97	41,99	384.886.000	44,01	423.372.800	46,03	465.710.780	48,05	512.281.858	50,08	563.509.744	

	TUJUAN DAN SASARAN	IK	PROGRAM DAN KEGIATAN	IK	Baseline Tahun 2025	TARGET KINERJA										KON P R
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			KEGIATAN													
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	93,04	93,75	384.886.000	94,46	423.372.800	95,16	465.710.780	95,86	512.281.858	96,57	563.509.744	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase LKS Bipartit yang terbentuk	49,77	49,8	908.303.000	51,13	999.131.000	5,59	1.099.045.000	52,06	1.208.950.000	52,53	1.329.845.000	
			Kegiatan :													
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk ****	50,19	50,66	628.479.000	51,13	691.325.000	51,59	760.458.000	52,06	836.505.000	52,53	920.155.000	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL ***	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	96,69	96,75	521.854.000	96,79	574.038.900	96,84	631.442.000	96,88	1.577.857.000	96,91	764.045.000	
				KEGIATAN												
			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota ****	1,17	1,41	521.854.000	1,64	574.038.900	1,88	631.442.000	2,11	1.577.857.000	2,34	764.045.000	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	96,69	96,75	379.782.000	96,79	417.759.000	96,84	459.535.000	96,88	505.489.000	96,91	556.038.000	

	TUJUAN DAN SASARAN	IK	PROGRAM DAN KEGIATAN	IK	Baseline Tahun 2025	TARGET KINERJA										KONI PI RE
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Kegiatan													
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja dan penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI	96,67	96,77	194.023.000	96,83	213.425.000	96,88	234.767.000	96,92	258.244.000	96,97	284.069.000	
				Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan ****	96,69	95,74	185.759.000	96,77	204.334.000	96,81	224.768.000	96,84	247.245.000	96,88	271.969.000	
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN ***	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	80,96	80,8	2.693.206.000	80,67	2.962.526.000	80,53	3.258.779.000	80,27	3.584.657.000	80	3.943.122.000	
			Kegiatan													
			Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	33,56	37,87	803.206.000	43,03	883.526.000	49,91	971.879.000	56,8	1.069.067.000	63,68	1.175.973.000	
				Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan *	55,2	55,21	590.000.000	55,27	649.000.000	55,34	713.900.000	55,37	785.290.000	55,46	863.819.000	
				Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan ****	62,61	62,92	1.300.000.000	63,26	1.430.000.000	63,71	1.573.000.000	64	1.730.300.000	64,27	1.903.330.000	
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN ***	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	26,67	27,06	1.039.830.000	27,49	1.115.000.000	27,91	1.225.000.000	28,32	1.350.000.000	28,74	1.475.000.000	
			Kegiatan :													

	TUJUAN DAN SASARAN	IK	PROGRAM DAN KEGIATAN	IK	Baseline Tahun 2025	TARGET KINERJA										KONI PI RI
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan ****	Persentase kegiatan penerapan K3 di perusahaan yang dilakukan oleh Balai K2 (semula Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan)	61,67	62,86	1.039.830.000	63,13	1.115.000.000	63,41	1.225.000.000	63,64	1.350.000.000	63,83	1.475.000.000	
1.2	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten (%)			9,54	10	12.082.052.000	10,471	13.871.255.000	11,53	15.085.880.000	11,53	16.403.968.000	12,05	17.914.364.000	
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	8,39	9,28	1.086.125.000	9,34	1.194.737.000	9,66	1.314.211.000	10	1.445.632.000	10,67	1.590.194.000	
			Kegiatan :													
			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penganggur/pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri	27,62	33,33	1.086.125.000	35,14	1.194.737.000	37,84	1.314.211.000	40,54	1.445.632.000	44,44	1.590.194.000	
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi												
			Kegiatan :													
			Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga	30	31,82	176.875.000	36,36	194.562.000	37,5	214.018.000	40	235.420.000	41,67	258.962.000	
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetnsi dibidang industri	3,2	83,68	3.396.822.000	83,87	3.736.504.000	84,05	4.110.154.000	84,21	4.521.169.000	84,36	4.973.286.000	
			Kegiatan :													
			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri	89,7	83,68	2.651.322.000	83,87	2.916.454.000	84,05	3.208.099.000	84,21	3.528.909.000	84,36	3.881.800.000	
				Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	12,5	22,22	700.000.000	30	770.000.000	36,36	847.000.000	41,67	931.700.000	46,15	12,5	

	TUJUAN DAN SASARAN	IK	PROGRAM DAN KEGIATAN	IK	Baseline Tahun 2025	TARGET KINERJA										KONI PI RI
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	5	9,09	45.500.000	12,5	50.050.000	15,38	55.055.000	17,86	60.560.000	20	5	
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian												
			Kegiatan :													
			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian	54	55,6	3.159.893.000	57,2	3.475.882.000	58,6	3.823.470.000	60,2	4.205.817.000	61,7	4.626.399.000	
				Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	74,75	100	200.000.000	100	220.000.000	100	242.000.000	100	266.200.000	100	292.820.000	
				Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	80	100	22.337.000	100	24.570.000	100	27.027.000	100	29.730.000	100	32.703.000	
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran	46,98	23,38	4.040.000.000	23,7	5.025.000.000	24	5.355.000.000	24,28	5.700.000.000	25,38	6.140.000.000	
			Kegiatan :													
			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI) diberikan pelatihan	22,67	23,38	2.820.000.000	23,7	3.000.000.000	24	3.125.000.000	24,28	3.265.000.000	24,28	3.500.000.000	
				Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	100	100	1.200.000.000	100	2.000.000.000	100	2.200.000.000	100	2.400.000.000	100	2.600.000.000	

	TUJUAN DAN SASARAN	IK	PROGRAM DAN KEGIATAN	IK	Baseline Tahun 2025	TARGET KINERJA										KOND PE RE
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	40	40	20.000.000	41,67	25.000.000	41,67	30.000.000	42,86	35.000.000	42,86	40.000.000	
	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja **	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) **			74,07	74,39	5.304.778.000	74,7	5.838.702.000	75,02	6.417.922.000	75,34	7.063.464.000	75,65	7.764.860.000	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Proporsi penciptaan lapangan kerja di sektor formal	71,05	71,07	1.887.347.000	71,08	2.077.330.000	71,1	2.278.213.000	71,12	2.508.685.000	71,14	2.755.603.000	
			Kegiatan													
			Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi perantaraan kerja	75	75	1.084.482.000	75	1.192.929.000	75	1.312.222.000	75	1.443.445.000	75	1.587.789.000	
			Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ijin LPTKS yang diterbitkan ****	60	60	81.000.000	60	98.000.000	60	108.000.000	60	129.000.000	60	141.000.000	
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja ****	Presentase pelaporan Informasi Pasar Kerja Kabupaten/Kota yang meliputi data pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja	83,33	83,33	543.340.000	95,24	590.024.000	95,24	641.976.000	95,24	698.624.000	95,24	765.436.000	
				Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	100	100	178.525.000	100	196.377.000	100	216.015.000	100	237.616.000	100	261.378.000	

	TUJUAN DAN SASARAN	IK	PROGRAM DAN KEGIATAN	IK	Baseline Tahun 2025	TARGET KINERJA										KOND PE RE
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal												
			Kegiatan													
			Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****	Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .	47,5	47,68	2.004.839.000	48	2.205.322.000	48,1	2.425.855.000	48,3	2.668.440.000	48,5	2.935.284.000	
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi ****	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI Purna diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	1,51	1,68	679.792.000	1,75	747.771.000	1,83	822.548.000	1,91	904.802.000	2	995.283.000	
				Persentase calon pekerja migran Indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	50	51,25	193.670.000	51,25	213.036.000	52	234.339.000	53	257.773.000	53,33	283.551.000	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	20	21,75	78.000.000	23,5	88.000.000	25,25	99.000.000	27	110.000.000	28,75	120.000.000	
			Kegiatan													
			Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****	Persentase tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan pekerjaan di sektor formal ****	19,4	22,22	78.000.000	25	88.000.000	27,77	99.000.000	30,55	110.000.000	33,3	120.000.000	
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja ****	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	37,77	38,63	154.130.000	39,5	169.543.000	40,36	186.497.000	41,22	205.147.000	42,07	225.661.000	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rasio penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	1,04	2,06	231.000.000	5,11	254.100.000	7,14	279.510.000	8,08	307.461.000	10,02	338.207.000	

	TUJUAN DAN SASARAN	IK	PROGRAM DAN KEGIATAN	IK	Baseline Tahun 2025	TARGET KINERJA										KON P R
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Kegiatan													
			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi ****	10,2	10,31	231.000.000	10,42	254.100.000	10,53	279.510.000	10,64	307.461.000	10,71	338.207.000	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	1,2	1,2	76.000.000	1,28	83.600.000	1,37	91.960.000	1,5	101.156.000	1,6	111.271.000	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan			68,57	85,71	276.915.000	91,42	304.606.000	94,28	335.066.000	97,14	368.572.800	100	405.429.580	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	68,57	85,71	276.915.000	91,42	304.606.000	94,28	335.066.000	97,14	368.572.800	100	405.429.580	
			KEGIATAN													
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	75	84	276.915.000	88	304.606.000	92	335.066.000	96	368.572.800	100	405.429.580	

Lampiran IV : Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
Nomor :
Tanggal :

:

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Forum terhadap Indikator kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Tanggal : 16 April 2025
Tempat : Aula Rimba Bujang Disnakertrans Prov. Jateng

.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Penduduk Bekerja						
1.1	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)	74,07	74,39	74,7	75,02	75,34	75,65
1.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	59,69	60,05	60,45	60,87	61,32	62
1.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta/RP)	56	56,4	56,9	57,2	57,6	58
1.4	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	9,54	10	10,471	11,53	11,53	12,05